



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KABUPATEN TEMANGGUNG 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami haturkan ke kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kemudahan yang diberikan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan akuntabel, sekaligus sebagai media pelaporan kinerja dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 merupakan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga mencerminkan upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun 2025.

Secara garis besar, laporan kinerja tahun 2025 ini menyajikan informasi mengenai capaian, faktor pendukung, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja. Diharapkan LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas kinerja yang lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung di masa mendatang.

Temanggung, 26 Maret 2026

Bupati Temanggung,



Agus Setyawan, S.E.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG	2
1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH.....	2
2. KONDISI TOPOGRAFI.....	5
3. GEOLOGI.....	7
4. KONDISI DEMOGRAFI.....	8
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	10
1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BUPATI.....	10
2. PERANGKAT DAERAH	13
3. SUMBER DAYA APARATUR.....	17
4. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI	18
D. ISU STRATEGIS.....	19
1. KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS.....	19
2. KETAHANAN PANGAN	21
3. DIVERSIFIKASI PEREKONOMIAN UNTUK PENGHIDUPAN YANG STABIL.....	22
4. PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	24
5. KELESTARIAN LINGKUNGAN	25
6. PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	29
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	31
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	32
C. TUJUAN DAN SASARAN	33
D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN.....	43
F. RENCANA KINERJA TAHUNAN	51
G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	51

H. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA	52
1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN MONITORING EVALUASI	52
2. PELAKSANAAN	54
3. PENGENDALIAN	56
4. PELAPORAN	57
I. PERENCANAAN ANGGARAN.....	57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	65
B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	66
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN.....	90
D. AKUNTABILITAS ANGGARAN	157
E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN PADA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.....	172
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA.....	178
B. STRATEGI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA MASA MENDATANG	179
LAMPIRAN	
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	
3. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	5
Tabel 1.3 Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian Kabupaten Temanggung	7
Tabel 1.4 Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2025	8
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	9
Tabel 1.6 Profil Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Temanggung	17
Tabel 1.7 Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025	19
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama	32
Tabel 2.2 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Kabupaten Temanggung.....	34
Tabel 2.3 Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029.....	38
Tabel 2.4 Anggaran Per Program Tahun 2025	58
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	65
Tabel 3.2 Target Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025	66
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	67
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi dengan Target Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	69
Tabel 3.5 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2021-2025	70
Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021 – 2025	72
Tabel 3.7 Realisasi Program Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	74
Tabel 3.8 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya dan Target Kinerja di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025	78

Tabel 3.9	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	79
Tabel 3.10	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	79
Tabel 3.11	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin, Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin dengan Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	81
Tabel 3.12	Capaian Kinerja berdasarkan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	82
Tabel 3.13	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	86
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	87
Tabel 3.15	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung, Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2025.....	88
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	90
Tabel 3.17	Perkembangan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Target Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	92
Tabel 3.18	Perbandingan IPM Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025.....	92
Tabel 3.19	Perkembangan Capaian Dimensi Penyusun IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	93
Tabel 3.20	Program, Anggaran, dan Realisasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian IPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	97
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	101
Tabel 3.22	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dengan Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021 – 2025	101
Tabel 3.23	Rata-Rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Penganggur di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	103

Tabel	3.24	Program, Anggaran, dan Realisasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian TPT di Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	104
Tabel	3.25	Perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	106
Tabel	3.26	Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	107
Tabel	3.27	Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025 dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional.....	107
Tabel	3.28	Program, Anggaran, dan Realisasi Anggaran yang Mendukung PDRB per Kapita di Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	111
Tabel	3.29	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	115
Tabel	3.30	Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020 s/d 2025	115
Tabel	3.31	Perbandingan Realisasi IKLH Tahun 2025	116
Tabel	3.32	Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025	117
Tabel	3.33	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3	120
Tabel	3.34	Persentase Infrastruktur Wilayah Berdaya Saing Tahun 2025	121
Tabel	3.35	Persentase Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	123
Tabel	3.36	Klasifikasi Skor hasil Hasil Survei Penilaian Integritas	128
Tabel	3.37	Realisasi Kinerja Indeks Integritas Nasional Tahun 2025	129
Tabel	3.38	Penilaian Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	133
Tabel	3.39	Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung Tahun 2021 – 2025	134
Tabel	3.40	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2024-2025	134
Tabel	3.41	Anggaran dan Capaian Kinerja Program Yang Mendukung Pencapaian Sasaran 3	139
Tabel	3.42	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4	142
Tabel	3.43	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender	143
Tabel	3.44	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender	145

Tabel	3.45	Perbandingan Rasio Gini pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dengan Capaian Jawa Tengah dan Nasional Tahun Sebelumnya.....	145
Tabel	3.46	Perbandingan Rasio Perubahan Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Nasional Tahun 2021-2025.....	146
Tabel	3.47	Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025.....	146
Tabel	3.48	Program yang Mendukung Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kesetaraan Akses dan Partisiapasi Seluruh Masyarakat dalam seluruh aspek Pembangunan	147
Tabel	3.49	Tabulasi Skor PPA; Skor Variabel Xi, Skor Dimensi Di dan Skor IHaI Kabupaten Temanggung Tahun 2025	151
Tabel	3.50	Capaian Kinerja Sasaran 5.....	152
Tabel	3.51	Realisasi APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (<i>unaudited</i>)	157
Tabel	3.52	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	163

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Peta Posisi Kabupaten Temanggung Terhadap Provinsi Jawa Tengah	3
Gambar 1.2 Peta Ketinggian Kabupaten Temanggung	6
Gambar 2.1 SIPD	53
Gambar 2.2 <i>Planning Decission Support System</i>	53
Gambar 2.3 Sistem Informasi Pendapatan Daerah	54
Gambar 2.4 e-keuangan	54
Gambar 2.5 Simpeg	55
Gambar 2.6 Mapatda	55
Gambar 2.7 Simpelbangda.....	56
Gambar 2.8 SIMWAS.....	56
Gambar 2.9 EVAKIP	57
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	69
Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 – 2025.....	73
Gambar 3.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	77
Gambar 3.4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung, Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021 – 2025.....	80
Gambar 3.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung Dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	80
Gambar 3.6 Penyerahan Alat Bantu Dengar	85
Gambar 3.7 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	87
Gambar 3.8 Penggalangan komitmen jejaring ambulans se-Kabupaten Temanggung dan Sosialisasi INCAKAP (program literasi digital untuk pelajar) oleh Dinkominfo	99
Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi TPT dengan Target Daerah Tahun 2021 – 2025	100
Gambar 3.10 Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	100

Gambar 3.11	Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan produktivitas di BLK Kabupaten Temanggung.....	105
Gambar 3.12	Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021–2025.....	108
Gambar 3.13	Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021–2025	109
Gambar 3.14	Peningkatan ekonomi masyarakat melalui inovasi Bata Kingdom dan Car Free Day (CFD) Panorama Ngadirejo	113
Gambar 3.15	Kegiatan Penanaman Pohon di Kabupaten Temanggung	118
Gambar 3.16	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penyusunan RDTR Kota Parakan	125
Gambar 3.17	Peningkatan kualitas infrastruktur	126
Gambar 3.18	Rumus Perhitungan Indeks Integritas Tahun 2025	128
Gambar 3.19	Hasil Penilaian Survey Penilaian Integritas Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	128
Gambar 3.20	Kegiatan pendukung Indeks Integritas Nasional	131
Gambar 3.21	Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	138
Gambar 3.22	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	143
Gambar 3.23	Kegiatan Penanganan Ketimpangan	149
Gambar 3.24	Nilai Indeks Harmoni Kabupaten Temanggung dengan 4 Dimensi ..	153
Gambar 3.25	Perbandingan Nilai Indeks Harmoni Tahun 2025 Kabupaten Temanggung, Magelang, Wonosobo dan rata-rata Jawa Tengah....	154
Gambar 3.26	Perbandingan Indeks Harmoni dari Dimensi Ekonomi	155
Gambar 3.27	Perbandingan Indeks Harmoni dari Dimensi Sosial	155
Gambar 3.28	Perbandingan Indeks Harmoni dari Dimensi Budaya	156
Gambar 3.29	Perbandingan Indeks Harmoni dari Dimensi Keberagaman.....	156
Gambar 3.30	Piagam Penghargaan Kabupaten Terinovatif IGA Tahun 2025.....	172
Gambar 3.31	Perbandingan Indeks Harmoni dari Dimensi Budaya	172
Gambar 3.32	Piagam Penghargaan Juara 1 PPD Tingkat Nasional Tahun 2025	173
Gambar 3.33	Bupati Temanggung menerima penghargaan dalam ajang “Smart City Award” Tahun 2025 dari Kementerian Komunikasi dan Digital	173
Gambar 3.34	Opini WTP 2024 yang diterima di tahun 2025.....	174
Gambar 3.35	Piagam Penghargaan Juara 1 PPD Tingkat Provinsi Jawa Tengah	174

Gambar 3.36	Piagam Penghargaan TOP 4 SDG's Action Award Tahun 2025	175
Gambar 3.37	Juara I kategori Infografis Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.....	175
Gambar 3.38	KPID Award 2025 sebagai LPPL dengan Kelembagaan Terbaik.....	176
Gambar 3.39	Juara III Lomba Pertunjukan FK Metra Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Tengah.....	176
Gambar 3.40	Penghargaan Juara Harapan III kategori Film Pendek Program Diseminasi Informasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)	177
Gambar 3.41	Penerimaan Penghargaan KIP Award Tahun 2025.....	177

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu upaya sistematis dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang orientasinya tidak hanya terbatas pada keluaran (*output*) yang diperoleh dari suatu kegiatan yang dilaksanakan, namun juga berorientasi pada hasil (*outcome*), yaitu berfungsinya keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. SAKIP juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil. Pelaporan kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan SAKIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan merupakan perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja. Pelaporan kinerja oleh Pemerintah Daerah terdiri atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD dan diukur melalui target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi salah satu kunci dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana didalamnya disebutkan mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk mengukur pencapaian sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Pengukuran pencapaian target kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target pada Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2025 dengan realisasi kinerja atas pelaksanaan anggaran tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Temanggung.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat 110°23'–110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'–7°32'35" Lintang Selatan. Posisi Geografis Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang

(77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).



Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Gambar 1.1
Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap
Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah seluas $\pm$ 86.483 Ha, berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas wilayah secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

No.	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan	Desa yang berbatasan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Candiroti, Gemawang, Kandangan	) Desa Bejen, Desa Selosabrang, Desa Petung, Desa Duren, dan Desa Ngaliyan di Kecamatan Bejen.) Desa Canggal di Kecamatan Candiroti.) Desa Muncar dan Desa Karangseneng di Kecamatan Gemawang.) Desa Margolelo dan Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan.

No.	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan	Desa yang berbatasan
2.	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kandangan, Kaloran, Pringsurat	) Desa Tlogopucang dan Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan.) Desa Kaloran, Desa Kalimanggis, dan Desa Getas di Kecamatan Kaloran.) Desa Wonokerso, Desa Soborejo, dan Desa Klepu di Kecamatan Pringsurat
3.	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Pringsurat, Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Bulu	) Desa Soropadan, Desa Kupan, Desa Kebumen, Desa Pringsurat, dan Desa Rejosari di Kecamatan Pringsurat.) Desa Nguwet, Desa Pare, dan Desa Bengkal di Kecamatan Kranggan.) Desa Bagus, Desa Kebonagung, Desa Gambasan, Desa Salamrejo, Desa Selopampang, dan Desa Tanggulanom di Kecamatan Selopampang.) Desa Losari dan Desa Pagersari di Kecamatan Tlogomulyo
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Candirot, Wonoboyo	) Desa Batusari dan Desa Kledung di Kecamatan Kledung.) Desa Canggal di Kecamatan Candirot.) Desa Cemoro di Kecamatan Wonoboyo.

Sumber : RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Dari kondisi geografis tersebut maka dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Temanggung harus memperhatikan kondisi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan penanganan daerah perbatasan memerlukan pencermatan dan harus bersinergi dengan pemerintah daerah yang menjadi batas wilayah, serta bersinergi dengan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731

lingkungan, 1.506 RW, dan 5.921 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung.

Tabel 1.2
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

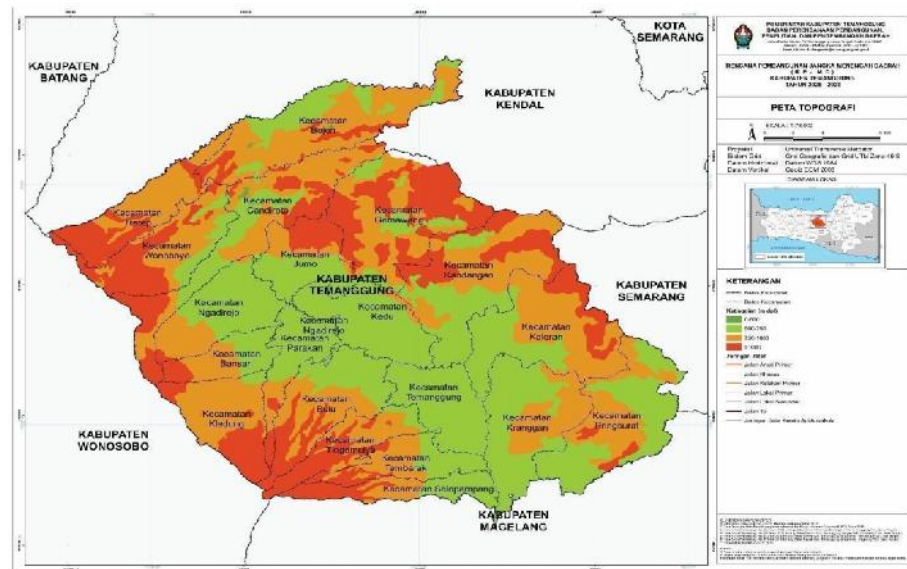
No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Kecamatan Tretep	11	-
2	Kecamatan Wonobojo	13	-
3	Kecamatan Bejen	14	-
4	Kecamatan Candiroto	14	-
5	Kecamatan Ngadirejo	19	1
6	Kecamatan Parakan	14	2
7	Kecamatan Bansari	13	-
8	Kecamatan Kledung	13	-
9	Kecamatan Bulu	19	-
10	Kecamatan Temanggung	6	19
11	Kecamatan Tlogomulyo	12	-
12	Kecamatan Tembarak	13	-
13	Kecamatan Selopampang	12	-
14	Kecamatan Kranggan	12	1
15	Kecamatan Pringsurat	14	-
16	Kecamatan Kaloran	14	-
17	Kecamatan Kandangan	16	-
18	Kecamatan Gemawang	10	-
19	Kecamatan Jumo	13	-
20	Kecamatan Kedu	14	-
Jumlah		266	23

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2025

2. KONDISI TOPOGRAFI

Kabupaten Temanggung termasuk ke dalam wilayah dataran tinggi dengan pola topografi secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, dibatasi oleh dua buah gunung yaitu Gunung Sumbing (3.260 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.151 m dpl) di

bagian Selatan dan Barat. Bagian Utara Kabupaten Temanggung dibatasi oleh pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Kondisi topografi tersebut menciptakan wilayah Kabupaten Temanggung yang memiliki permukaan sangat beragam ditinjau dari ketinggian yang dapat dilihat pada gambar.



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 1.2
Peta Ketinggian Kabupaten Temanggung

Perbedaan ketinggian yang sangat beragam menghasilkan variasi kelerengannya di Kabupaten Temanggung yang diklasifikasikan menjadi lima kelas yaitu 0-8% (Datar), 8-15% (Landai), 15-25% (Agak curam), 25-40% (Curam), dan >40% (Sangat curam).

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400->1.500 mdpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian
Kabupaten Temanggung

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0 - 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kanda-ngan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500 - 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat,
3	750 - 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000 - 1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250 - 3.550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024

3. GEOLOGI

Dilihat dari sisi geologi Kabupaten Temanggung terdiri dari 11 batuan diantaranya adalah 1) Batuan Gunung Api Gilipetung, 2) Batuan Gunung Api Jembangan, 3) Batuan Gunung Api

Merbabu, 4) Batuan Gunung Api Sindoro, 5) Batuan Gunung Api Sindoro Lama, 6) Batuan Gunung Api Sumbing, 7) Endapan Kerucut Gunung Berapi, 8) Formasi Kali Getas, 9) Formasi Kerek, 10) Formasi Pernyataan, 11) lava Gunung Sumbing.

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis tanah lahan seluas Lahan seluas 86.483 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi latosol merah kekuningan yakni seluas 31.979,81 Ha (36,98%), latosol coklat seluas 28.915,25 Ha (33,43%), regosol coklat keabuan seluas 12.119,95 Ha (14,01%), latosol coklat kemerahan seluas 8.559,87 Ha (9,90%), regosol kuning seluas 2.856,40 Ha (3,30%) dan andosol seluas 2.052,14 Ha (2,37%).

4. KONDISI DEMOGRAFI

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk pada tahun 2025 adalah 826.710 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 416.903 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 409.807 jiwa. Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2025

Kabupaten: TEMANGGUNG								Rasio Jenis Kelamin
No	Kecamatan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah		
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%	
1	Bulu	25.886	50,72	25.149	49,28	51.035	6,17	102,93
2	Tembarak	16.681	51,09	15.972	48,91	32.653	3,95	104,44
3	Temanggung	42.496	49,76	42.908	50,24	85.404	10,33	99,04
4	Pringsurat	27.177	50,03	27.142	49,97	54.319	6,57	100,13
5	Kaloran	23.856	50,09	23.773	49,91	47.629	5,79	100,35
6	Kandangan	28.052	50,73	27.241	49,27	55.293	6,72	102,98
7	Kedu	31.102	50,52	30.467	49,48	61.569	7,48	102,08
8	Parakan	27.628	50,40	27.187	49,60	54.815	6,66	101,62
9	Ngadirejo	30.024	50,57	29.348	49,43	59.372	7,22	102,30
10	Jumo	15.872	50,30	15.683	49,70	31.555	3,83	101,21
11	Tretep	11.425	51,16	10.905	48,84	22.330	2,71	104,77
12	Candiroto	17.232	50,26	17.056	49,74	34.288	4,17	101,03
13	Kranggan	25.654	49,75	25.907	50,25	51.561	6,27	99,02

Kabupaten: TEMANGGUNG								Rasio Jenis Kelamin
No	Kecamatan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah		
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%	
14	Tlogomulyo	12.171	51,01	11.690	48,99	23.861	2,90	104,11
15	Selopampang	10.783	50,78	10.453	49,22	21.236	2,58	103,16
16	Bansari	12.781	50,82	12.369	49,18	25.150	3,06	103,33
17	Kledung	14.785	50,93	14.243	49,07	29.028	3,53	103,81
18	Bejen	11.281	50,71	10.963	49,29	22.244	2,70	102,90
19	Wonoboyo	14.079	50,70	13.690	49,30	27.769	3,37	102,84
20	Gemawang	17.938	50,39	17.661	49,61	35.599	4,33	101,57
Jumlah		416.903	50,54	409.807	49,46	826.710	100	101,73

Sumber: DINDUKCAPIL Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan angka tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki (50,54%) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan (49,46%).

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian dan kemampuannya serta ilmu pengetahuan yang dimiliki. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka diharapkan semakin tinggi pula kemampuan maupun keahlian yang dimilikinya. Indikator jenjang pendidikan yang ditamatkan juga bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Komposisi penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Kecamatan	Tidak sekolah/ belum sekolah	Belum tamat SD/sederajat	Tamat SD/sederajat	SMP/sederajat	SMA/sederajat	Diploma I/II	Akademi/Diploma III	Diploma IV/S1	S2	S3
1	Bulu	13832	14268	9671	6253	5193	131	437	1188	61	1
2	Tembarak	11292	5170	6654	4889	3545	111	176	782	29	5
3	Temanggung	20585	10574	14430	11134	18565	619	2131	6861	490	15
4	Pringsurat	17751	3812	11808	11302	7826	163	329	1269	57	2
5	Kaloran	18886	4952	10022	7269	4978	183	259	1047	32	1

No	Kecamatan	Tidak sekolah/ belum sekolah	Belum tamat SD/sederajat	Tamat SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III	Diploma IV/S1	S2	S3
6	Kandangan	24464	6423	9987	7242	5475	209	328	1113	46	6
7	Kedu	18106	13320	12025	7851	7440	272	589	1874	91	1
8	Parakan	17050	8667	8964	7336	9213	270	790	2387	130	8
9	Ngadirejo	13547	9412	15554	11168	7290	242	542	1578	38	1
10	Jumo	10588	5358	6823	4467	3132	145	245	765	30	2
11	Tretep	7804	4578	5905	2927	851	39	50	168	7	1
12	Candiroto	7609	8819	8115	4617	3636	188	348	933	21	2
13	Kranggan	15896	7369	8558	9565	7889	197	434	1578	72	3
14	Tlogomulyo	6971	4427	5778	3863	2256	49	132	372	10	3
15	Selopampang	5755	3361	5494	3291	2605	72	128	519	10	1
16	Bansari	3972	8577	5140	4243	2467	61	158	513	18	1
17	Kledung	11252	3993	6984	4220	2133	36	107	290	13	0
18	Bejen	6601	2354	6042	4148	2485	78	138	376	21	1
19	Wonoboyo	8666	3605	8180	4766	1973	78	118	369	13	1
20	Gemawang	13077	7145	7809	4376	2520	87	135	435	14	1
Jumlah		253704	136184	173943	124927	101472	3230	7574	24417	1203	56
Persentase		30,69	16,47	21,04	15,11	12,27	0,39	0,92	2,95	0,15	0,01

Sumber: DINDUKAPIL Kabupaten Temanggung 2025

Tingkat pendidikan formal tertinggi yang ditamatkan terbanyak adalah jenjang SD sebesar 21,04%, kemudian jenjang SMP sebesar 15,11% dan jenjang SMA sebesar 12,27%. Untuk tamatan jenjang D4/Strata 1 sebesar 2,95% lebih tinggi dibanding tahun 2024 sebesar 2,81% tetapi angka ini masih relatif kecil. Faktor yang mempengaruhi sedikitnya D4/Strata 1 antara lain karena kemampuan ekonomi untuk mengakses biaya pendidikan serta baru ada 1 (satu) perguruan tinggi swasta di wilayah Kabupaten Temanggung, dan juga keinginan untuk bekerja setelah tamat SMA.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana disebutkan bahwa Bupati berkedudukan dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah. Guna pelaksanaan otonomi daerah Bupati memiliki Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak sebagai berikut:

a) Tugas Bupati Sebagai Kepala Daerah

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Bupati sebagai Wakil Kepala Daerah

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

d) Hak Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Bupati sebagai Wakil Kepala Daerah

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai Hak Protokoler dan Hak Keuangan. Hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.

2. PERANGKAT DAERAH

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindaklanjut dari kedua peraturan tersebut maka Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu penataan kelembagaan organisasi pemerintahan secara keseluruhan pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Peraturan tersebut menetapkan pembentukan Perangkat daerah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas Daerah terdiri dari 17 (tujuh belas) Dinas yang terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 12. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 14. Dinas Perhubungan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup;
 16. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- 5) Badan Daerah terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 4. Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
- 6) Kecamatan yang terdiri dari 20 (dua puluh) yaitu:
 1. Kecamatan Temanggung;
 2. Kecamatan Kranggan;
 3. Kecamatan Pringsurat;
 4. Kecamatan Kaloran;
 5. Kecamatan Kandangan;
 6. Kecamatan Kedu;
 7. Kecamatan Bulu;
 8. Kecamatan Tembarak;
 9. Kecamatan Selopampang;
 10. Kecamatan Tlogomulyo;
 11. Kecamatan Parakan;
 12. Kecamatan Kledung;
 13. Kecamatan Bansari;
 14. Kecamatan Ngadirejo;
 15. Kecamatan Jumo;
 16. Kecamatan Gemawang;
 17. Kecamatan Candiroto;
 18. Kecamatan Bejen;
 19. Kecamatan Wonobojo;
 20. Kecamatan Tretep;

Selain perangkat daerah diatas ada unit pelaksana kebencanaan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

dan UOBK (Unit Organisasi yang Bersifat Khusus) yaitu RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah).

Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai berikut:

1. UPT Laboratorium Kesehatan;
2. UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan;
3. UPT Rumah Susun Sederhana Sewa;
4. UPT Laboratorium Lingkungan
5. UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
6. UPT Rumah Singgah;
7. UPT Balai Benih Pertanian.
8. UPT Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
9. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
10. UPT Pengelolaan Pasar Daerah;
11. UPT Metrologi Legal; dan
12. UPT Balai Latihan Kerja.

Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah diatas masih ada unit organisasi bersifat fungsional yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung, Puskesmas di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Puskesmas Parakan;
2. Puskesmas Bulu;
3. Puskesmas Temanggung;
4. Puskesmas Dharma Rini;
5. Puskesmas Kedu;

6. Puskesmas Traji;
7. Puskesmas Kledung;
8. Puskesmas Bansari;
9. Puskesmas Tlogomulyo;
10. Puskesmas Tembarak;
11. Puskesmas Selopampang;
12. Puskesmas Pringsurat;
13. Puskesmas Kranggan;
14. Puskesmas Pare;
15. Puskesmas Kaloran;
16. Puskesmas Tepusen;
17. Puskesmas Kandangan;
18. Puskesmas Ngadirejo;
19. Puskesmas Jumo;
20. Puskesmas Gemawang;
21. Puskesmas Candirot;
22. Puskesmas Bejen;
23. Puskesmas Tretep;
24. Puskesmas Wonoboyo;
25. Puskesmas Rejosari; dan
26. Puskesmas Banjarsari.

3. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.6
Profil Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Temanggung

No.	Jenis Data	2021	2022	2023	2024	2025
I.	Jumlah PNS	5.865	6.345	5.908	5.526	5.209
	1. Golongan I	268	208	120	68	26
	2. Golongan II	858	1.312	1.261	1.224	1.125
	3. Golongan III	3.264	3.543	3.451	3.324	3.134
	4. Golongan IV	1.475	1.282	1.076	910	924
II.	Jumlah Pejabat Struktural	625	466	478	457	455

No.	Jenis Data	2021	2022	2023	2024	2025
	1. Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama)	27	31	31	29	29
	2. Eselon III (administrator)	154	152	151	144	150
	3. Eselon IV (Pengawas)	444	283	296	284	276
III.	Jumlah PNS	5.865	6.345	5.910	5.526	5.209
	Laki-Laki	2.516	2.524	2.287	2.110	1.946
	Perempuan	3.349	3.821	3.623	3.416	3.263
IV.	JUMLAH PPPK	222	1.682	2.180	2.560	2.917
	Golongan 5	92	477	50	52	122
	Golongan 7	130	205	1.659	24	66
	Golongan 9	222	1.182	1.709	2.484	2.724
	Golongan 10					4
	Golongan 11					1
V.	JUMLAH PPPK	222	1.682	2.180	2.560	2.917
	LAKI-LAKI	92	477	572	760	901
	PEREMPUAN	130	1.205	1.608	1.800	2.016
	JUMLAH TOTAL ASN	6.280	6.087	8.027	8.086	8.126

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas Jumlah ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sejumlah 8.126 orang yang terdiri dari 5.209 PNS dan 2.917 PPPK. Terjadi kenaikan jumlah PPPK dari tahun 2024 sejumlah 2.560 menjadi 2.917 pada tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun dimana jumlah PNS terendah jika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya.

4. Capaian Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adanya untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi

yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat.

Dari hasil penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2023-2025 menunjukkan peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.7
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2023-2025

No.	Penilaian	2023	2024	2025
1	RB General	62,13	74,79	75,51
2	RB Tematik	6,92	11,34	11,76
3	Indeks RB	69,05	86,13	87,27
	Kategori	B	A-	A-

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung tahun 2024 sebesar 86,13, pada tahun 2025 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi RB yang dilakukan oleh Kementerian PANRB bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung memperoleh Indeks RB sebesar 87,27 atau terdapat kenaikan sebesar 1,14.

D. ISU STRATEGIS

Perumusan isu strategis Kabupaten Temanggung tahun 2025 gambaran dan analisis kondisi daerah dan permasalahan daerah, kebutuhan daerah serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Adapun isu strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Konektivitas dan Aksesibilitas

Peningkatan konektivitas wilayah yang mencakup pembangunan infrastruktur baik jaringan transportasi,

telekomunikasi, energi, air, sanitasi, kesehatan dan pendidikan. Pengembangan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk pemenuhan sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan jalan serta sarana dan prasarana transportasi umum. Diperlukan pemerataan sarana dan prasarana transportasi umum serta pemenuhan sistem jaringan jalan yang memenuhi aspek aman, aspek nyaman dan aspek selamat.

Sarana transportasi umum dan barang yang harus dipenuhi adalah angkutan umum dan barang dengan jumlah mencukupi dan dalam kondisi layak, serta peningkatan prasarana terminal, halte dan simpul transportasi lainnya. Sarana dan prasarana transportasi umum dan barang yang memadai akan memberikan kemudahan pelayanan perpindahan manusia dan barang yang ada di Kabupaten Temanggung. Selain sarana dan prasarana transportasi dibutuhkan juga untuk timbulnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Sistem jaringan jalan yang memenuhi aspek aman, aspek nyaman dan aspek selamat juga akan memberikan dampak terhadap kemudahan distribusi dan perpindahan berbagai komoditas ekonomi yang ada di Kabupaten Temanggung. Sistem jaringan jalan yang ada harus dikelola dengan baik dengan membuat sistem manajemen perkerasan jalan terintegrasi mulai dari status kewenangan pengelolaan terendah yaitu jalan desa dan jalan lingkungan sampai dengan status kewenangan pengelolaan tertinggi yaitu jalan nasional, termasuk juga pemenuhan kelengkapan keselamatan jalan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan infrastruktur jalan memenuhi aspek aman, nyaman dan selamat.

Masih banyaknya ruas jalan kabupaten yang belum memenuhi standar aspek aman, aspek nyaman dan aspek selamat. Aspek aman dan aspek nyaman dilihat dari kondisi mantap (baik dan

sedang) serta pemenuhan lebar jalan yang sesuai standar lebar minimal jalan kabupaten yang berdasarkan fungsi terendahannya yaitu sebagai jalan lokal sekunder yaitu 4,50 m. Aspek selamat dilihat dari ketersediaan sarana keselamatan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, APILL dan bangunan keselamatan jalan lainnya. Termasuk juga pemenuhan sarana penerangan jalan umum.

2) Peningkatan pelayanan transportasi umum

Selain prasarana jalan, konektivitas antar wilayah juga dipengaruhi oleh sarana prasarana transportasi lainnya seperti angkutan umum, angkutan barang dan simpul transportasi lainnya. Dengan meningkatkan kinerja layanan angkutan umum diharapkan dapat memberikan layanan transportasi massal yang ada di Kabupaten Temanggung.

Selain itu juga diperlukan dukungan kegiatan intervensi kewenangan provinsi untuk meningkatkan konektivitas khususnya dalam hal pelayanan transportasi umum di Kabupaten Temanggung. Secara posisi geografis, Kabupaten Temanggung memiliki potensi untuk Pengembangan Simpul *Transport Oriented Development* (TOD) yang mendukung pengembangan pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*) yang terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan terpadu dengan Pengembangan Pariwisata DIY. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana transportasi (Trans Jateng Koridor DIY – Borobudur – Magelang – Temanggung – Dieng) yang selaras dengan dengan Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Gelangmanggung.

2. Ketahanan Pangan

Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung yang pengukurannya dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional menunjukkan perkembangan yang positif pada tahun 2024 ditunjukkan dengan peningkatan nilai IKP sebesar 1,07 poin pada tahun 2024 atau sebesar 78,91 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 77,84. Peningkatan

tersebut mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Temanggung. Faktor yang mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung diantaranya mempertahankan produksi pangan, penguatan distribusi pangan, efektivitas program yang menunjang ketahanan pangan serta dukungan terhadap petani melalui subsidi serta pelatihan pertanian berkelanjutan yang turut memperkuat ketahanan pangan. Meski mengalami peningkatan, untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim yang berdampak pada produksi pertanian serta fluktuasi harga pangan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung.

Upaya yang harus dilakukan adalah melakukan intervensi kebijakan seperti peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi sumber pangan, penguatan distribusi, serta mitigasi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah.

3. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

1) Pembangunan pertanian

Merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan pertanian terutama dalam meningkatkan pendapatan dan ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat akan memacu berkembangnya sektor industri dan jasa serta mempercepat transformasi struktur perekonomian daerah. Ketangguhan sektor industri akan semakin kokoh apabila didukung oleh berkembangnya sektor pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya untuk membangun pertanian yang efektif, efisien dan bernilai ekonomi tinggi.

Pertanian yang efektif adalah pola usahatani yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani,

serta berkelanjutan bagi lingkungan. Pengukuran efisiensi pertanian lazimnya menggunakan perhitungan efisiensi berorientasi input, dimana mengukur efisiensi dari minimisasi biaya penggunaan input dalam usahatani untuk mencapai output tertentu. Seorang petani dikatakan efisien secara teknis dalam usahatannya jika petani tersebut mampu menghasilkan output yang sama, tetapi dengan jumlah penggunaan kombinasi input yang lebih sedikit.

Keuntungan petani menjadi semakin besar jika produk hasil usahatannya bernilai ekonomi tinggi. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya melalui:

- a) Penerapan teknologi dan inovasi;
 - b) Pengelolaan sumber daya pertanian yang berkelanjutan (penggunaan pupuk ramah lingkungan dan pengelolaan hama terpadu);
 - c) Diversifikasi tanaman bernilai ekonomi tinggi; dan
 - d) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian.
- 2) Kemudahan Investasi

Berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat, karena investasi akan menciptakan lapangan kerja, mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi, meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong pemerataan ekonomi. Berapa wilayah di Jawa Tengah dianggap seksi untuk investasi. Dengan adanya exit toll Kabupaten Temanggung akan menjadi lokasi yang menarik bagi investor. Tetapi menarik saja tidak cukup bagi para investor, kemudahan investasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi faktor pendorong berkembangnya investasi di daerah. Kemudahan investasi juga sangat diperlukan bagi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.

Pemberian kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah dengan penyediaan fasilitas non fiskal kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi sehingga

dapat meningkatkan investasi di daerah. Bentuk Pemberian Kemudahan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal antara lain:

- a) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b) Penyediaan sarana dan prasarana;
- c) Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d) Pemberian bantuan teknis;
- e) Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu Satu pintu;
- f) Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g) Kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan
- i) Perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- j) Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- k) Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- l) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- m) Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- n) Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

1) Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia

Kualitas hidup sumber daya manusia (SDM) merupakan kemampuan dan keadaan individu untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan. Kualitas hidup dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas, inovasi dan kemandirian. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing daerah dan keberlanjutan pembangunan. Dalam mewujudkan kualitas hidup sumber daya manusia maupun daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan

menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat. Perwujudan kualitas hidup sumber daya manusia Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mendorong pada akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan perlindungan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat.

2) Penanganan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang menjadi prioritas pertama dalam SDGs. Selain itu kemiskinan merupakan salah satu kerangka pikir yang digunakan dalam Trisula Pembangunan Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Temanggung selalu mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya, tetapi secara angka absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung masih cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung per Maret tahun 2024 sebanyak 68,77 ribu jiwa atau 8,67% terhadap total jumlah penduduk. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka penanganan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi yakni pemerataan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, serta peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat miskin. Untuk melaksanakan ketiga strategi tersebut, perlu adanya kemitraan, baik antara Pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah/Swasta/Masyarakat atau Komunitas Peduli, maupun sinergi kebijakan.

5. Kelestarian Lingkungan

Kelestarian lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan yang harus dijaga oleh setiap daerah, termasuk Kabupaten Temanggung. Isu strategis dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung meliputi penanganan masalah persampahan, penurunan kualitas

lingkungan hidup, serta dampak perubahan iklim. Kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia di masa depan. Selain itu, permasalahan lingkungan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem antara alam dan manusia.

Permasalahan lingkungan terjadi akibat dari faktor alam maupun dampak dari aktivitas manusia. Aktivitas seperti alih fungsi lahan, penggunaan bahan kimia berlebihan, serta pengelolaan sampah yang tidak optimal menjadi penyumbang utama kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung untuk keberlanjutan dan generasi mendatang.

1) Pengoptimalan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yang optimal di Kabupaten Temanggung dapat diwujudkan melalui pendekatan aspek kelembagaan, teknis, sosial, dan teknologi. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah pada skala lingkungan yang berbasis partisipasi hingga skala terkecil yaitu rumah tangga. Partisipasi rumah tangga diperlukan untuk mengurangi timbulan sampah dengan melakukan pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah. Oleh karena itu peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sampah dari sumber rumah tangga. Kolaborasi dengan berbagai sektor dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan antara lain untuk meningkatkan pengolahan sampah dari hulu ke hilir. Pengembangan TPA dengan menerapkan teknologi pengolahan sampah yang memenuhi standar lingkungan sangat dibutuhkan di Kabupaten Temanggung untuk mengurangi ketergantungan pada metode sanitary landfill. Selain itu pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah perlu ditingkatkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong kewajiban pengelolaan sampah oleh semua pihak.

2) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Solusi penanganan penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung mencakup rehabilitasi lahan kritis melalui konservasi tanah, penguatan pengelolaan kawasan hulu, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta peningkatan kualitas air dengan pengendalian pencemaran dan erosi. Rehabilitasi tersebut dapat dilakukan melalui upaya vegetatif seperti penanaman pohon, penggunaan tanaman penutup tanah, dan agroforestri, serta upaya teknis seperti pembuatan terasering, rorak, dan bangunan pengendali erosi. Diperlukan juga pengelolaan terpadu sumber daya alam melalui sinergi lintas sektor, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Selain itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung.

3) Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana

Strategi terpadu yang mencakup penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan penguatan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim diperlukan dalam membentuk mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Temanggung. Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Temanggung dilakukan melalui strategi mitigasi yang mencakup pengelolaan sektor pertanian, limbah, dan transportasi. Beberapa upaya penurunan emisi GRK yang perlu dilakukan antara lain pada sektor lahan melalui pembangunan unit pengolahan pupuk organik dan pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) untuk padi unggul serta Gerakan Percepatan Pengelolaan Tanaman Terpadu Jagung, yang mendorong praktik pertanian ramah lingkungan. Selain itu, bantuan bibit tanaman seperti kopi robusta, arabika, dan mimba turut berkontribusi dalam

peningkatan tutupan lahan dan penyerapan karbon secara alami. Di sektor limbah, penurunan emisi didukung oleh pembangunan dan operasionalisasi TPST, TPS3R, bank sampah, IPAL, serta sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman. Sedangkan pada sektor transportasi perlu memperkuat aksi mitigasi melalui pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day), peremajaan armada transportasi umum, pembangunan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, dan manajemen parkir.

Di sisi lain, pengurangan risiko bencana juga menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Untuk memperkuat ketahanan terhadap risiko tersebut, peningkatan kapasitas adaptif masyarakat dan pemerintah sangat krusial. Langkah-langkah strategis yang perlu dioptimalkan meliputi penguatan sistem peringatan dini, pendidikan kebencanaan, serta pengembangan dan perluasan program Desa Tangguh Bencana (Destana). Selain itu, penggunaan teknologi informasi, pemetaan risiko secara berkala, serta integrasi kebijakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan menjadi pondasi penting dalam mendorong peningkatan ketahanan daerah terhadap kebencanaan

4) Penguatan Kualitas Pelayanan Lingkungan Permukiman

Pembangunan yang memperhatikan lingkungan bertujuan menciptakan ekosistem yang nyaman dan sehat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar. Dalam setiap aspek pembangunan, seperti infrastruktur, perumahan, dan kegiatan ekonomi, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, termasuk penyediaan udara dan air bersih serta ruang hijau. Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara kebutuhan masa kini dan generasi mendatang dengan prinsip pemeliharaan lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan

ekonomi inklusif. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan yang mendukung efisiensi sumber daya, perlindungan lingkungan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui inovasi, perubahan pola konsumsi, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

6. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pelayanan publik yang berkualitas memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat terpenuhi secara efektif, adil, dan efisien. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang baik memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang mengarah pada kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan adalah mencakup peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel dan berintegritas, peningkatan profesionalisme ASN, tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi, Tata Kelola keuangan Daerah yang akuntabel, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian LKjIP Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arah serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya agar mencapai target yang diinginkan. Dengan pengertian tersebut maka Rencana Strategis sangat diperlukan oleh kepala daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, melakukan proyeksi kondisi di masa datang secara efektif dan efisien sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perkembangan lingkungan strategis dan permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revaluasi dan evaluasi kinerja, sehingga Renstra menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan RPJMD Provinsi. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat memaksimalkan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tujuan: Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman		
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,75-5,28 (%)
2	Tingkat Kemiskinan	7,95-8,1 (%)
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,95 (Angka)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	72,76 (Angka)
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,30-2,17 (%)
		PDRB Perkapita	37,26 (Juta Rupiah)
2	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,46 (Angka)
3	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase Infrastruktur Kewilayahan Yang Berdaya Saing	71,62 (%)
		Indeks Integritas Nasional	77,72 (Angka)
		Indeks Reformasi Birokrasi	86,13 (Angka)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini/Gini Rasio	0,382-0,370 (Angka)
		Indeks Pembangunan Gender	96,78 (Angka)
5	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	6,72 (Angka)

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Temanggung yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya pada setiap misi sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Kabupaten Temanggung

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	URUSAN / BIDANG
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 2. Tingkat kemiskinan (%) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	1. Indeks Pembangunan Manusia (angka)	72,76	Statistik
			2. PDRB Perkapita (Juta Rupiah /tahun)	37,26	Statistik
			3. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,30 – 2,17	Statistik
		2. Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,46	Lingkungan Hidup
		3. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	5. Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing (%)	71,62	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			6. Indeks Integritas Nasional	77,72	Unsur Pengawasan
			7. Indeks Reformasi Birokrasi	86,13	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

		4. Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	8. Indeks Gini/Gini Rasio	0,382-0,370	Bidang Statistik
			9. Indeks Pembangunan Gender	96,78	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
		5. Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.	10. Indeks Harmoni	6,72	Pemerintahan Umum

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung (Data Diolah) Tahun 2025

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas adalah:

- a. Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan;
- b. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah.

2. Diversifikasi Perekonomian Untuk Penghidupan Yang Stabil

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Diversifikasi Perekonomian Untuk Penghidupan Yang Stabil adalah:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian;
- b. Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian.

3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan adalah:

- a. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan;
- b. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan Kesehatan;
- c. Peningkatan pembangunan literasi masyarakat;
- d. Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga;
- e. Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin;
- f. Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin;
- g. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
- h. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak;

- i. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- j. Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, keagamaan, dan keluarga berencana)

4. Mempromosikan kelestarian lingkungan

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Mempromosikan kelestarian lingkungan adalah:

- a. Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap perubahan iklim dan bencana.

5. Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif adalah:

- a. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi;
- b. Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat;
- c. Peningkatan keterbukaan informasi publik;
- d. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik;
- e. Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik;
- g. Peningkatan pendapatan asli daerah;
- h. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- i. Peningkatan kebijakan dan manajemen ASN;
- j. Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah.

Gambaran keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan : Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Sasaran 1: Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas	Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan	Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum
			Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
			Penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas
		Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan
			Penyediaan akses internet di seluruh wilayah
			Pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi
	Sasaran 2: Diversifikasi Perekonomian Untuk Penghidupan Yang Stabil	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian	Peningkatan sektor industri dalam pembangunan ekonomi
			Peningkatan nilai usaha perdagangan
			Peningkatan kinerja koperasi dan UMKM
			Peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
			Peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan
			Pembentukan ekosistem ekonomi syariah
		Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian	Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja
			Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan
			Peningkatan produksi perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan pemajuan kebudayaan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan SDM/lembaga kebudayaan
			Peningkatan investasi
			Peningkatan jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan)
	Sasaran 3 Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan	Peningkatan mutu layanan pendidikan
			Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan pemerataan dan keterjangkauan penyelenggaraan layanan pendidikan utamanya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
			Peningkatan capaian SPM bidang pendidikan
			Penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi/kearifan lokal
			Peningkatan rata -rata lama sekolah melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah
			Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan atau non formal
			Peningkatan koordinasi dengan Kantor Kemenag untuk mendorong peningkatan cakupan literasi serta numerasi siswa pada satuan pendidikan keagamaan
		Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan Kesehatan	Peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas
			Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan jiwa
			Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Penguatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan serta pembiayaan kesehatan
			Peningkatan kesehatan lingkungan
			Peningkatan kemajuan teknologi kesehatan
			Peningkatan capaian SPM bidang Kesehatan
		Peningkatan pembangunan literasi masyarakat	Peningkatan pemanfaatan perpustakaan
		Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga	Peningkatan gemar membaca untuk masyarakat
			Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda
			Pengembangan atlet dan prestasi keolahragaan serta sarana prasarana olahraga
		Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin	Peningkatan pembudayaan olahraga
			Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat miskin
		Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin	Fasilitasi pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin
			Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
			Penyediaan data yang akurat sebagai dasar penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran
		Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial
			Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi secara kolaboratif dan multisektor
		Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan pemenuhan hak anak
			Peningkatan perlindungan terhadap perempuan
			Peningkatan perlindungan khusus anak
			Pencegahan perkawinan anak
		Peningkatan kesetaraan	Peningkatan pengarusutamaan gender

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		gender dan pemberdayaan perempuan	Peningkatan pemberdayaan perempuan
		Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, keagamaan, dan keluarga berencana)	Peningkatan kualitas pembangunan keluarga
			Peningkatan pengendalian penduduk
			Peningkatan pembinaan keluarga berencana
	Sasaran 4 Mempromosikan kelestarian lingkungan	Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap perubahan iklim dan bencana	Penguatan pendidikan budi pekerti dan keagamaan
			Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui integrasi hulu-hilir sistem pengelolaan persampahan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta pengendalian pencemaran yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
	Sasaran 5 Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana
			Peningkatan kualitas kebijakan
			Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan ✓ melalui digitalisasi kearsipan
			Peningkatan tata kelola Pemerintah Desa
		Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
			Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan
		Peningkatan keterbukaan informasi publik	Peningkatan kerukunan umat beragama
			Pemberdayaan organisasi masyarakat
			Peningkatan layanan pengaduan dan konsultasi
			Peningkatan tata kelola dan layanan informasi public

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik	Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan publik
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
		Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan infrastruktur pendukung TIK
			Peningkatan ketersediaan jaringan internet ke seluruh rumah tangga
			Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi
		Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan digitalisasi pelayanan publik
		Peningkatan pendapatan asli daerah	Peningkatan pengelolaan pajak yang akuntabel
			Pemenuhan target pajak
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah
			Peningkatan kualitas perbendaharaan akuntansi dan pelaporan
		Peningkatan kebijakan dan manajemen ASN	Peningkatan pelayanan kepegawaian
			Peningkatan kualitas ASN
			Peningkatan ketepatan penempatan ASN
		Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah	Penguatan kebijakan yang mendukung budaya riset dan inovasi daerah
			Peningkatan kemitraan riset dan inovasi antar lembaga
			Peningkatan sumber daya pendukung riset dan inovasi daerah

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung (Data diolah) Tahun 2025

E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengelolaan Pendidikan.

2) Bidang Kesehatan:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- Program Penataan Bangunan Gedung;
- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;

- Program Penyelenggaraan Jalan;
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengembangan Perumahan;
- Program Kawasan Permukiman;
- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Program Penanggulangan Bencana;
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran.

6) Bidang Sosial

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pemberdayaan Sosial;
- Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- Program Rehabilitasi Sosial;
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- Program Penanganan Bencana;
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- Program Perencanaan Tenaga Kerja;
 - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - Program Penempatan Tenaga Kerja;
 - Program Hubungan Industrial.
- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
 - Program Perlindungan Perempuan;
 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - Program Pemenuhan Hak Anak/Pha;
 - Program Perlindungan Khusus Anak.
- 3) Bidang Pangan:
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 - Program Pengawasan Keamanan Pangan.
- 4) Bidang Lingkungan Hidup:
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - Program Pengelolaan Persampahan.
- 5) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Program Pendaftaran Penduduk;
 - Program Pencatatan Sipil;
 - Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- 6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Program Penataan Desa;
 - Program Peningkatan Kerjasama Desa;
 - Program Administrasi Pemerintahan Desa;
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.
- 7) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
- Program pengendalian penduduk;
 - Program pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
- 8) Bidang Perhubungan:
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- 9) Bidang Komunikasi dan Informatika:
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

- 10) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
 - Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM).
- 11) Bidang Penanaman Modal:
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - Program Promosi Penanaman Modal;
 - Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 12) Bidang Kepemudaan dan Olahraga:
- Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
 - Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
 - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
- 13) Bidang Statistik:
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
- 14) Bidang Persandian:
- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
- 15) Bidang Kebudayaan:
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Program Pengembangan Kebudayaan;
 - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- 16) Bidang Perpustakaan:
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Program Pembinaan Perpustakaan;

- Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

17) Bidang Kearsipan

- Program Pengelolaan Arsip.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan:

1) Bidang Kelautan dan Perikanan:

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2) Bidang Pariwisata:

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- Program Pemasaran Pariwisata;
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3) Bidang Pertanian:

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- Program Penyuluhan Pertanian.

4) Bidang Perdagangan:

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- Program Pengembangan Ekspor;
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

5) Bidang Perindustrian:

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

d. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:

1) Sekretariat Daerah:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Program Perekonomian dan Pembangunan.

2) Perencanaan:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

3) Keuangan:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

4) Kepegawaian:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Kepegawaian Daerah.

5) Pendidikan dan Pelatihan:

- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

6) Penelitian dan Pengembangan:

- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Program Riset dan Inovasi Daerah.

e. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

f. Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum;
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

g. Unsur Pemerintahan Umum

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

F. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Pada dasarnya perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung mengacu pada dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/427 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

H. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka peningkatan kinerja baik pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan telah diterapkan beberapa inovasi sistem teknologi informasi yang saling terintegrasi antara lain:

1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MONITORING EVALUASI

a. SIPD : Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Sistem ini dibangun oleh pemerintah Pusat (Kemendagri) sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah, sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras. Dengan adanya sistem ini perangkat daerah dipaksa untuk melakukan perencanaan dengan teliti dan cermat dan tidak akan ada lagi perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan tanpa ada perencanaan. SIPD dirancang untuk digunakan dari proses perencanan, penganggaran, sampai pada monitoring

b. Planning Decision Support System (Planning DSS)

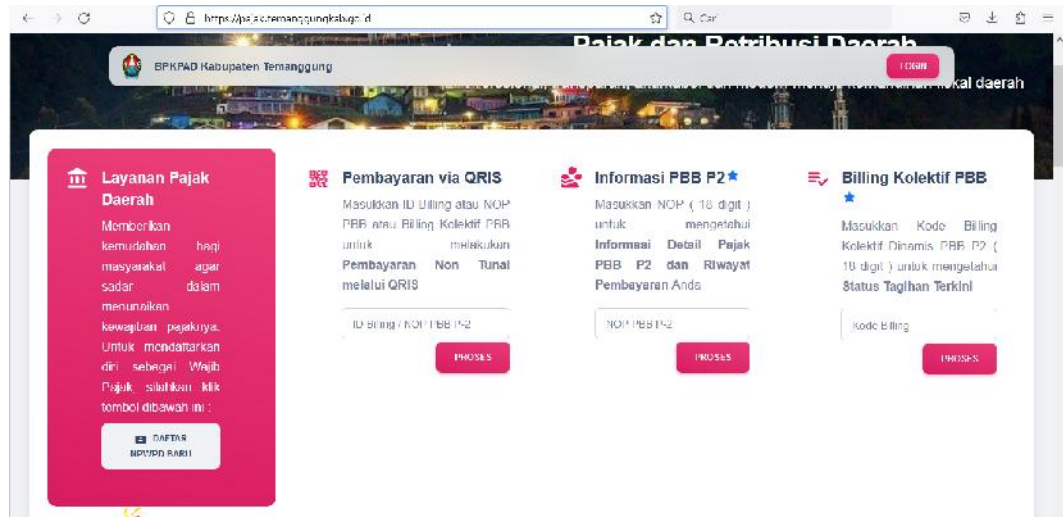
[illegible]

LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2025

2. PELAKSANAAN

a. SIAP PAKDE: Sistem Informasi Pendapatan Daerah

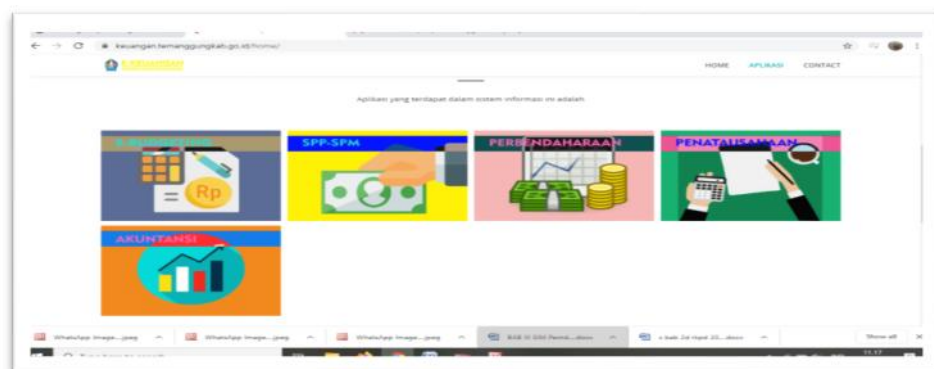
Sistem ini membantu dalam pengelolaan pendapatan daerah, pada masing-masing Perangkat Daerah dimulai dari proses penatausahaan penerimaan sampai pelaporan pendapatan daerah.



Gambar 2.3
Sistem Informasi Pendapatan Daerah

b. e-keuangan : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

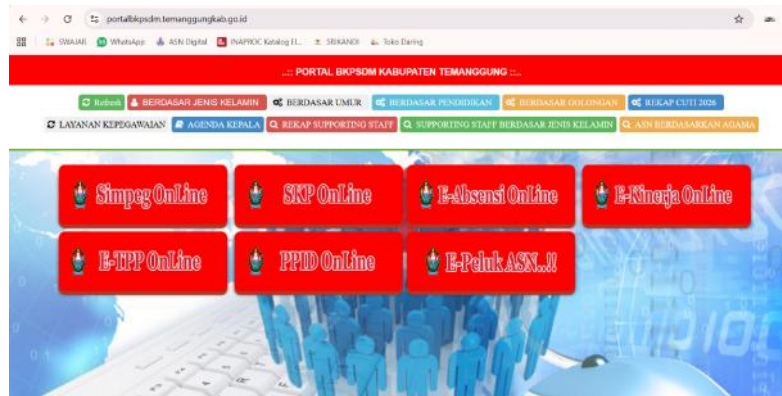
Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, pada masing-masing Perangkat Daerah dimulai dari proses penatausahaan pengeluaran sampai akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga diketahui penyerapan anggaran setiap bulannya.



Gambar 2.4
e-keuangan Temanggung

c. Simpeg

Merupakan sistem informasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian yang digunakan untuk mengukur dan mewujudkan profesionalitas ASN.



Gambar 2.5
Simpeg

d. Mapatda : Manajemen Pendapatan Daerah

Merupakan aplikasi pelayanan pajak daerah berbasis kinerja integrasi data.

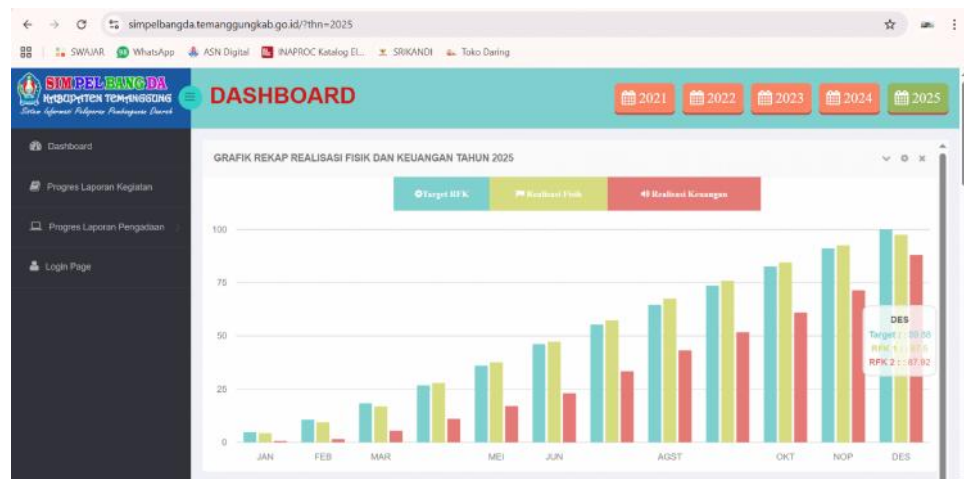


Gambar 2.6
Mapatda

3. PENGENDALIAN

a. SIMPELBANGDA: Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah

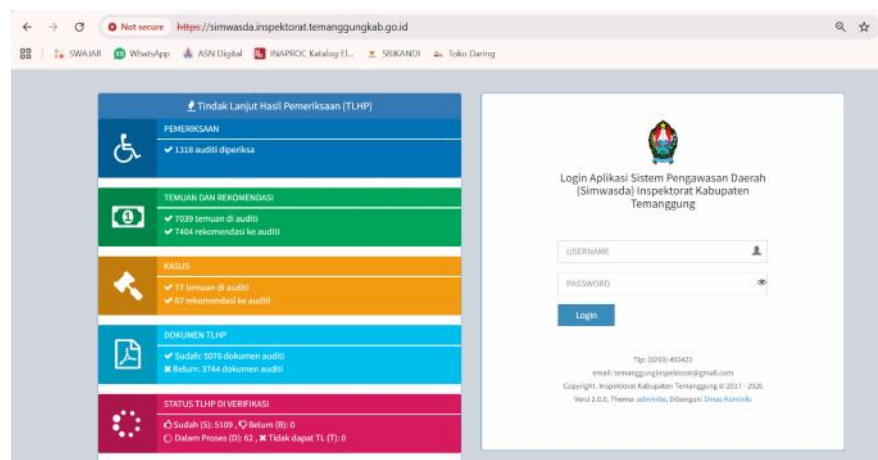
Merupakan sistem informasi dalam mengendalikan kegiatan di tahun berjalan, terutama yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa.



Gambar 2.7
Simpelbangda

b. SIMWAS : Sistem Informasi Pengawasan

Merupakan sistem aplikasi berbasis web untuk pengelolaan data dan pelaporan hasil pengawasan, serta tindak lanjutnya. Aplikasi SIMWAS dipergunakan untuk menghasilkan informasi dan berbagai laporan secara cepat dan akurat, menghindari duplikasi pekerjaan, mengurangi risiko kemungkinan salah input data.

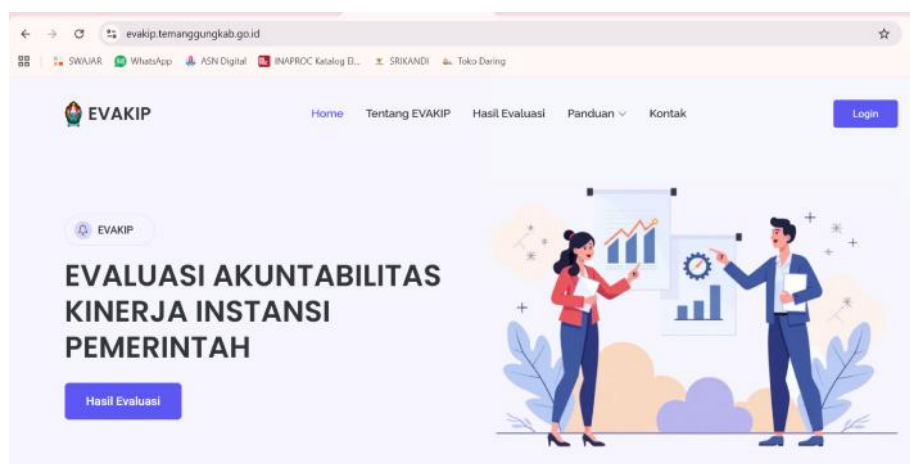


Gambar 2.8
SIMWAS

4. PELAPORAN

a. EVAKIP : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya agar dapat mencapai tujuan dan misi organisasi secara transparan dan akuntabel, serta untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Gambar 2.9
EVAKIP

I. PERENCANAAN ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam rangka mewujudkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025 dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sedangkan untuk perubahan anggaran di tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan APBD seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan.

Perubahan APBD tahun 2025 juga dilakukan karena terjadi beberapa perubahan pada asumsi kebijakan Umum Anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan, seiring adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan. Hal yang sangat mendasar adalah penanganan inflasi dan mengatasi dampak badai El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan dan berpotensi menyebabkan gagal panen pada beberapa komoditas pertanian terutama padi, sehingga hal ini otomatis berakibat pula pada perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.049.661.519.130,- dan dengan adanya perubahan APBD tahun 2025 berkurang menjadi Rp. 1.999.866.507.130,-. Adapun komposisi belanja APBD Perubahan Tahun 2025 yang berasal dari program/kegiatan yang menunjang sasaran RPD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Anggaran Per Program Tahun 2025

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	596.588.535.875
2	Program Pengelolaan Pendidikan	140.911.833.310
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	338.706.655.034
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	111.330.061.352

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.149.970.500
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	205.937.000
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	596.665.000
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.679.559.465
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.057.697.200
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	109.713.000
11	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.526.245.500
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.655.398.000
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	285.577.800
14	Program Penataan Bangunan Gedung	1.041.688.258
15	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.998.828.500
16	Program Penyelenggaraan Jalan	29.544.252.700
17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	14.469.600
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	221.448.950
19	Program Pengembangan Perumahan	306.119.500
20	Program Kawasan Permukiman	1.192.231.300
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.274.134.512
22	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.006.377.500
23	Program Penanggulangan Bencana	1.552.920.000
24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	613.647.400
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.744.117.378
26	Program Pemberdayaan Sosial	137.671.600
27	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	13.602.350
28	Program Rehabilitasi Sosial	682.219.430

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
29	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	22.375.621.060
30	Program Penanganan Bencana	236.374.200
31	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	86.552.900
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.390.113.735
33	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	609.703.000
34	Program Penempatan Tenaga Kerja	128.947.700
35	Program Hubungan Industrial	110.289.700
36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.230.485.522
37	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	25.100.800
38	Program Perlindungan Perempuan	38.394.370
39	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	18.959.200
40	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	40.335.500
41	Program Perlindungan Khusus Anak	88.369.400
42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.330.224.240
43	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	300.000.000
44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	163.297.000
45	Program Pengawasan Keamanan Pangan	35.000.000
46	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.881.333.259
47	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	43.643.400
48	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	337.157.200
49	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	306.169.700
50	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	6.337.500
51	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	16.671.400
52	Program Pengelolaan Persampahan	6.266.970.700
53	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.545.704.472

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
	Kabupaten/Kota	
54	Program Pendaftaran Penduduk	679.262.800
55	Program Pencatatan Sipil	5.408.500
56	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	184.032.500
57	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.619.098.800
58	Program Penataan Desa	11.508.100
59	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	-
60	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.790.196.240
61	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	173.102.740
62	Program Pengendalian Penduduk	493.800.000
63	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.470.149.000
64	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.249.053.450
65	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.864.566.164
66	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.762.018.590
67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.170.370.502
68	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	559.768.450
69	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.129.479.500
70	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.377.198.120
71	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	15.486.400
72	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	318.335.000
73	Program Pengembangan UMKM	73.589.500
74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.356.088.148
75	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
76	Program Promosi Penanaman Modal	76.076.300
77	Program Pelayanan Penanaman Modal	119.042.000

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
78	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	25.010.500
79	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	255.485.600
80	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.162.409.080
81	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	225.000.000
82	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	9.901.500
83	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	374.880.000
84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.714.551.552
85	Program Pengembangan Kebudayaan	8.307.736.300
86	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.144.788.842
87	Program Pembinaan Perpustakaan	1.166.394.115
88	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	72.894.500
89	Program Pengelolaan Arsip	5.349.500
90	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	-
91	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	247.023.670
92	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	7.641.500
93	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	364.480.800
94	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.273.173.157
95	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.983.647.400
96	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	458.449.800
97	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-
98	Program Penyuluhan Pertanian	3.447.520.000
99	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	495.801.540
100	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	139.012.200
101	Program Pengembangan Ekspor	-

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
102	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	16.628.900
103	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	322.601.750
104	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	17.053.800
105	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.287.851.815
106	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	27.839.335.483
107	Program Perekonomian dan Pembangunan	855.132.136
108	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.267.785.577
109	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15.126.999.808
110	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.229.351.958
111	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	827.177.000
112	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	510.479.000
113	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.785.748.553
114	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	404.145.305.101
115	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	502.808.175
116	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	704.647.930
117	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.989.663.811
118	Program Kepegawaian Daerah	633.479.100
119	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	623.535.750
120	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	299.082.000
121	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.850.827.593
122	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.084.250.000
123	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	3.615.750.000
124	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.301.396.514
125	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.979.224.753
126	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	12.518.095.969

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
	Kelurahan	
127	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	264.000.000
128	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	456.491.757
129	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.267.441.237
130	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	495.522.680
131	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.874.832.100
132	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80.000.000
133	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	90.000.000
134	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	781.702.700

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 pada Lembar Kriteria Evaluasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$C_{ik} = \frac{R}{T} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$C_{ik} = \frac{T - (R - T)}{T_{rg}} \times 100\%$$

3. Guna mengukur capaian kinerja, digunakan skala nilai peringkat kinerja yang terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

4. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome* yaitu berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian kinerja pemerintah disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran indikator kinerja tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Proses pengukuran dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun target kinerja baik kinerja tujuan maupun kinerja sasaran daerah, sudah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Target Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Target
(1)	(2)	(3)
	Tujuan: Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,75-5,28 (%)

2	Tingkat Kemiskinan	7,95-8,1 (%)
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,95 (Angka)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	72,76 (Angka)
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,30-2,17 (%)
		PDRB Perkapita	37,26 (Juta Rupiah)
2	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,46 (Angka)
3	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase Infrastruktur Kewilayahan Yang Berdaya Saing	71,62 (%)
		Indeks Integritas Nasional	77,72 (Angka)
		Indeks Reformasi Birokrasi	86,13 (Angka)
4	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini/Gini Rasio	0,382-0,370 (Angka)
		Indeks Pembangunan Gender	96,78 (Angka)
5	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	6,72 (Angka)

Selanjutnya kami sampaikan capaian Kinerja tujuan dan kinerja sasaran daerah untuk Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TUJUAN : Mewujudkan Masyarakat Temanggung yang Sejahtera, Parsipatif, Setara, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Mudah Mengakses Layanan Publik dan Adanya Rasa Aman									
No	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			RPJMD 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2030	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	4,75 – 5,28	5,57	100	7,40 – 8,16	5,57	68 – 75%

TUJUAN : Mewujudkan Masyarakat Temanggung yang Sejahtera, Parsipatif, Setara, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Mudah Mengakses Layanan Publik dan Adanya Rasa Aman									
No	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			RPJMD 2025-2029		
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,67	7,95 – 8,1	7,78	100	6,40 – 6,00	7,78	70,33 – 78,44%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,91	86,95	87,66	100	90,00	87,66	97,4%
Capaian Kinerja Tujuan						100			78,58 – 83,61%

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, BPS Kabupaten Temanggung, BPS Provinsi Jawa Tengah 2025, Data Diolah.

Berdasarkan Tabel 3.3, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, di mana seluruh IKU yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 dapat tercapai sesuai target. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan uraian capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 1985). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,34% sebagai fase awal pemulihan pascapandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi kemudian menguat secara signifikan pada tahun 2022 menjadi 5,2%, dan selanjutnya relatif stabil pada kisaran 5% pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2025,

pertumbuhan ekonomi kembali meningkat dan mencapai capaian tertinggi sebesar 5,57%.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja makro daerah, Gambar 3.1 menyajikan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 beserta tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Gambar 3.1, perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pascapemulihan ekonomi.

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi dengan Target Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	Target	Realisasi	Perubahan	Kinerja Pencapaian Target RKPD	Skala Nilai
2021	2,50	3,34	5,47	100%	Sangat Tinggi
2022	3,50	5,2	1,86	100%	Sangat Tinggi
2023	4,80	5	-0,20	100%	Sangat Tinggi
2024	5,27	5,04	0,04	95,64%	Sangat Tinggi
2025	4.75 - 5.28	5,57	0,53	100%	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Pada tahun 2021, realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,34% melampaui target 2,50%, yang mencerminkan awal pemulihan ekonomi daerah. Tahun 2022 menunjukkan akselerasi signifikan dengan realisasi 5,2% dari target 3,50%, menandakan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada tahun 2023, realisasi sebesar 5% juga berada di atas target 4,80%, meskipun selisihnya relatif tipis. Tahun 2024 sedikit mengalami perlambatan dengan realisasi 5,04% dibanding target 5,27%, sehingga capaian kinerja mencapai 95,64%, namun tetap berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Sementara itu, pada tahun 2025 realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,57% melampaui batas atas target yang ditetapkan dalam rentang 4,75–5,28%.

Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,57% telah melampaui target tahunan yang ditetapkan dalam rentang 4,75–5,28%. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2030 sebesar 7,40–8,16%, capaian tahun 2025 tersebut baru mencapai sekitar 68–75% dari sasaran akhir yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja tahunan telah melampaui target RKPD, masih diperlukan upaya percepatan dan penguatan struktur ekonomi daerah agar pertumbuhan dapat meningkat secara bertahap mencapai target jangka menengah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 16.187,37 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 16.007,53 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 perekonomian Kabupaten Temanggung mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Peningkatan angka PDRB ini menandakan bahwa ekonomi mulai bergerak membaik seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang baik dan efektif (BPS, 2023).

Tabel 3.5
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)
Tahun 2021-2025

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.358,51	3.456,66	3.500,84	3.545,20	3.545,20
B	Pertambangan dan Penggalian	126,77	121,77	125,57	131,31	131,31

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*)
C	Industri Pengolahan	4.025,97	4.069,85	4.245,85	4.375,48	4.375,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,78	15,56	16,47	17,83	17,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,73	13,76	14,36	14,50	14,50
F	Konstruksi	806,12	836,12	901,12	1.023,65	1.023,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.559,94	3.712,94	3.928,94	4.163,86	4.163,86
H	Transportasi dan Pergudangan	548,56	907,26	978,95	1.035,97	1.035,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	264,11	303,84	341,79	376,51	376,51
J	Informasi dan Komunikasi	401,67	410,67	456,86	502,14	502,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	491,70	494,23	508,6	532,07	532,07
L	Real Estate	137,94	145,94	158,14	170,32	170,32
M,N	Jasa Perusahaan	56,33	59,51	64,76	72,06	72,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	395,00	401,33	421,83	455,64	455,64
P	Jasa Pendidikan	671,96	682,91	730,41	792,47	792,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	193,28	198,27	214,78	232,09	232,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	321,56	356,76	388,26	414,49	414,49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		15.214,06	15.387,93	16.187,37	17.855,59	17.855,59

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025. *) Angka 2025 belum rilis (menggunakan data tahun 2024)

Struktur perekonomian Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2024 menunjukkan konsentrasi pada beberapa lapangan usaha utama yang menjadi penggerak pertumbuhan daerah. Ketiga sektor tersebut secara konsisten memberikan sumbangan terbesar terhadap total PDRB dan menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi daerah. Kontribusi PDRB terbesar selama 2021–2024 adalah Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Industri Pengolahan menempati posisi tertinggi dan meningkat dari Rp4.025,97 miliar (2021) menjadi Rp4.375,48 miliar (2024), menunjukkan peran strategis sektor manufaktur dalam menopang struktur ekonomi daerah. Perdagangan Besar dan Eceran juga tumbuh signifikan dari Rp3.559,94 miliar menjadi Rp4.163,86 miliar, mencerminkan kuatnya aktivitas distribusi dan konsumsi masyarakat. Sementara itu,

sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai basis ekonomi tradisional tetap stabil dan meningkat dari Rp3.358,51 miliar menjadi Rp3.545,20 miliar, menegaskan karakter ekonomi Temanggung yang masih bertumpu pada sektor primer sekaligus mulai bergerak menuju penguatan sektor sekunder dan tersier.

Tabel 3.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021 – 2025

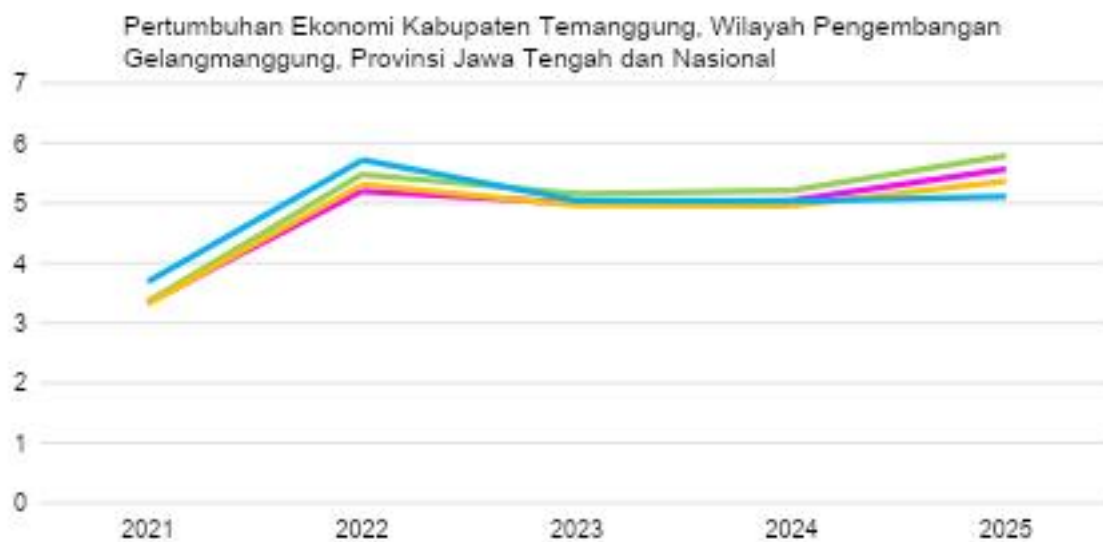
Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,86	2,92	1,28	1,27	1,27
B	Pertambangan dan Penggalan	6,75	-3,94	3,12	4,46	4,46
C	Industri Pengolahan	2,00	1,09	4,32	3,05	3,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,84	5,26	5,86	8,26	8,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,62	0,22	4,36	0,96	0,96
F	Konstruksi	7,54	3,72	7,89	13,47	13,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,40	4,30	5,82	5,98	5,98
H	Transportasi dan Pergudangan	2,37	65,39	7,90	5,82	5,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,03	15,04	12,49	10,16	10,16
J	Informasi dan Komunikasi	5,98	2,24	11,25	9,91	9,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,42	0,51	2,91	4,62	4,62
L	Real Estate	2,32	5,8	8,36	7,7	7,7
M,N	Jasa Perusahaan	3,01	5,65	8,82	11,29	11,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,26	1,60	5,11	8,01	8,01
P	Jasa Pendidikan	0,54	1,63	6,96	8,5	8,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	2,59	8,32	8,06	8,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,98	10,95	8,83	6,76	6,76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3,34	5,2	5,01	5,04	5,04

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025. *) Angka 2025 belum rilis (menggunakan data tahun 2024)

Berdasarkan data pertumbuhan PDRB tahun 2021–2024, hampir seluruh lapangan usaha menunjukkan kinerja positif dengan laju yang cenderung menguat, tercermin dari pertumbuhan PDRB total yang stabil di kisaran 5% pada 2022–2024. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada 2024 adalah Konstruksi (13,47%), diikuti Jasa Perusahaan (11,29%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,16%), serta Informasi dan Komunikasi (9,91%), yang menunjukkan akselerasi kuat pada sektor jasa dan

pembangunan fisik. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (5,98%), Industri Pengolahan (3,05%), dan Pertambangan dan Penggalian (4,46%) juga tumbuh positif dan menopang struktur ekonomi daerah. Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap tumbuh stabil di kisaran 1–3%, mencerminkan peranannya sebagai sektor basis yang relatif resilien. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah didorong oleh ekspansi sektor konstruksi dan jasa, dengan pemulihan mobilitas dan aktivitas ekonomi yang semakin menguat pascapandemi.

Untuk menilai kinerja ekonomi secara objektif, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tidak hanya dilihat secara internal, tetapi juga dibandingkan dengan wilayah pengembangan, provinsi, dan nasional. Perbandingan ini penting untuk menilai posisi dan daya saing Temanggung dalam konteks regional serta melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah selaras dengan dinamika perekonomian yang lebih luas. Perbandingan tersebut memberikan gambaran mengenai kekuatan dan tantangan struktural ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika perekonomian yang lebih luas.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 – 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada periode 2021–2024 menunjukkan pola yang stabil dan konvergen dengan capaian pertumbuhan ekonomi di Tingkat provinsi, wilayah pengembangan Gelangmanggung, maupun nasional. Pada awal periode (2021), pertumbuhannya hampir sama dengan Jawa Tengah meskipun sedikit di bawah nasional. Tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan sejalan dengan pemulihan ekonomi secara umum. Pada 2023–2024, pertumbuhan Temanggung stabil sekitar 5% dan posisinya bahkan sedikit lebih tinggi dari rata-rata provinsi serta hampir sama dengan nasional dan Gelangmanggung.

Pemerintah Kabupaten Temanggung terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi. Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain sebagaimana pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Realisasi Program Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengelolaan Pendidikan	140.911.833.310,00	135.918.890.225,00
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	111.330.061.352,00	107.696.957.123,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.149.970.500,00	1.122.141.061,00
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	205.937.000,00	172.385.490,00
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	596.665.000,00	527.919.000,00
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.057.697.200,00	1.949.313.581,00
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	109.713.000,00	108.717.198,00
8	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.526.245.500,00	2.520.455.769,00
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.655.398.000,00	6.595.234.942,00
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	285.577.800,00	282.682.352,00
11	Program Penataan Bangunan Gedung	1.041.688.258,00	1.011.303.262,00
12	Program Penataan Bangunan dan	1.998.828.500,00	1.690.208.503,00

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi
	Lingkungannya		
13	Program Penyelenggaraan Jalan	29.544.252.700,00	28.230.003.494,00
14	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	14.469.600,00	14.368.000,00
15	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	221.448.950,00	214.255.891,00
16	Program Pengembangan Perumahan	306.119.500,00	265.650.448,00
17	Program Kawasan Permukiman	1.192.231.300,00	804.773.500,00
18	Program Pemberdayaan Sosial	137.671.600,00	137.128.800,00
19	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	13.602.350,00	13.339.850,00
20	Program Rehabilitasi Sosial	682.219.430,00	676.553.732,00
21	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	22.375.621.060,00	21.526.634.834,00
22	Program Penanganan Bencana	236.374.200,00	234.027.700,00
23	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	86.552.900,00	86.327.404,00
24	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	609.703.000,00	572.953.726,00
25	Program Penempatan Tenaga Kerja	128.947.700,00	127.468.831,00
26	Program Hubungan Industrial	110.289.700,00	105.391.927,00
27	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	300.000.000,00	245.676.500,00
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	163.297.000,00	156.676.890,00
29	Program Pengawasan Keamanan Pangan	35.000.000,00	34.033.850,00
30	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.762.018.590,00	17.094.653.261,00
31	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	559.768.450,00	549.157.048,00
32	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.129.479.500,00	1.128.530.765,00
33	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	15.486.400,00	12.709.000,00
34	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	318.335.000,00	312.919.481,00
35	Program Pengembangan UMKM	73.589.500,00	72.758.375,00
36	Program Promosi Penanaman Modal	76.076.300,00	75.944.422,00
37	Program Pelayanan Penanaman Modal	119.042.000,00	116.604.024,00
38	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	25.010.500,00	24.855.831,00
39	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	255.485.600,00	216.742.500,00
40	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.162.409.080,00	3.994.150.215,00
41	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	225.000.000,00	225.000.000,00
42	Program Pengembangan Kebudayaan	8.307.736.300,00	7.141.816.411,00
43	Program Pembinaan Perpustakaan	1.166.394.115,00	1.015.302.622,00
44	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	72.894.500,00	49.441.820,00
45	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	247.023.670,00	246.627.661,00
46	Program Pengolahan dan	7.641.500,00	7.538.855,00

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi
	Pemasaran Hasil Perikanan		
47	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	364.480.800,00	351.097.310,00
48	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.273.173.157,00	17.811.236.714,00
49	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.983.647.400,00	4.949.342.702,00
50	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	458.449.800,00	455.816.913,00
51	Program Penyuluhan Pertanian	3.447.520.000,00	3.110.056.813,00
52	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	495.801.540,00	479.647.027,00
53	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	139.012.200,00	81.998.932,00
54	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	16.628.900,00	14.073.500,00
55	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	322.601.750,00	312.593.195,00
56	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	17.053.800,00	14.684.000,00
57	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	27.839.335.483,00	26.846.423.909,00
58	Program Perekonomian dan Pembangunan	855.132.136,00	617.276.113,00
	Jumlah	416.763.644.381,00	400.370.473.302,00

Sumber: BPKPAD, 2025

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung didukung oleh 58 program yang mencakup berbagai sektor strategis Pembangunan. Realisasi anggaran program untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 di Kabupaten Temanggung menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tingkat serapan mencapai 96,07% atau Rp400.370.473.302,00 dari total anggaran sebesar Rp416.763.644.381,00. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berhasil dicapai dengan efisiensi anggaran sebesar 3,93%.

Faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi biasanya berasal dari kualitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, struktur ekonomi yang kurang terdiversifikasi dan masih bergantung pada sektor bernilai tambah rendah, keterbatasan investasi skala besar, produktivitas usaha yang belum optimal, serta pengaruh eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas. Sedangkan, faktor pendorong pertumbuhan ekonomi meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, iklim

investasi yang kondusif, belanja pemerintah yang produktif, pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi industri, kemajuan infrastruktur, inovasi dan digitalisasi usaha, serta stabilitas sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi meliputi: peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri (*link and match*); diversifikasi dan hilirisasi sektor unggulan agar tercipta nilai tambah; perbaikan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian regulasi; penguatan UMKM melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan digitalisasi; pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung konektivitas dan distribusi; pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat; serta peningkatan tata kelola pemerintahan agar belanja publik lebih produktif dan tepat sasaran. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan agar mampu memperkuat struktur ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global dan masih menjadi prioritas pembangunan nasional. Potret kemiskinan Kabupaten Temanggung dilihat dari tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung tahun 2021-2025 pada gambar 3.3.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 3.3

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi dengan tren menurun, baik dari sisi jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Temanggung terjadi

kenaikan pada tahun 2020-2021 akibat dampak pandemi Covid-19. Secara perkembangan antar waktu, kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung juga semakin membaik sehingga kemiskinan berangsur turun hingga tahun 2025. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 7,78 persen, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,89 persen poin terhadap Maret 2024. Artinya, terdapat 7,78 persen penduduk Kabupaten Temanggung yang pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah Garis Kemiskinan (dibawah Rp 443.089 per kapita per bulan). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebesar 62,05 ribu orang mengalami penurunan sebesar 6,72 ribu orang jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar 68,77 ribu orang. Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dengan capaian sebelumnya dan target pada masing-masing tahun, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2021-2025 secara rinci tersaji pada tabel 3.8.

Tabel 3.8
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya dan Target Kinerja di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Tahun	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung				
	Target (%)	Realisasi (%)	Perubahan	Kinerja Pencapaian Target RKPD	Skala Nilai
2021	10,36	10,17	0,21	100%	Sangat Tinggi
2022	10	9,33	-0,84	100%	Sangat Tinggi
2023	9,8	9,26	-0,07	100%	Sangat Tinggi
2024	9,25	8,67	-0,59	100%	Sangat Tinggi
2025	7,95 – 8,1	7,78	-0,89	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung dan BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja makro daerah, Tabel 3.8 menyajikan perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 beserta tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian skala kinerja pada tingkat kemiskinan apabila disandingkan dengan target masing-masing tahun selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan nilai sangat tinggi. Sementara itu, apabila realisasi tingkat kemiskinan dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam

dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, kinerja pencapaian target RPJMD sebagaimana disajikan dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Target Jangka Menengah pada Tahun Akhir (2030)	Realisasi Tahun 2025	Kinerja Pencapaian Target Jangka Menengah
Tingkat Kemiskinan	6 – 6,4%	7,78%	70,33 – 78,44%

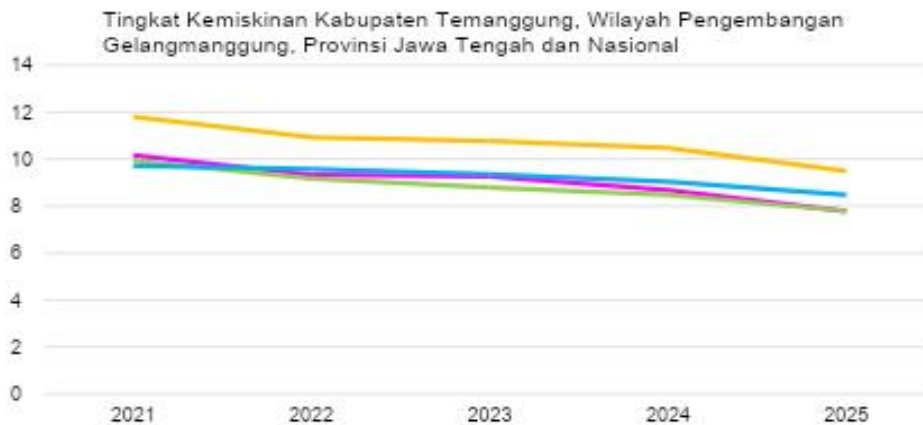
Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung dan BPS Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah

Realisasi tingkat kemiskinan pada tahun 2025 sebesar 7,78% memang melampaui target tahunan yang ditetapkan dalam rentang 7,95 – 8,1%. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada tahun akhir (tahun 2030) sebesar 6 – 6,4%, capaian tahun 2025 tersebut baru mencapai sekitar 70,33 – 78,44% (apabila disandingkan dengan batas atas dan batas bawah *range* target) dari sasaran akhir yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan meskipun kinerja tahunan telah melampaui target RKPD, masih diperlukan upaya percepatan dan penguatan penanganan kemiskinan agar penurunan tingkat kemiskinan dapat dilakukan secara maksimal untuk menuju target jangka menengah. Selain itu, tingkat kemiskinan di wilayah pengembangan Gelangmanggung (Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung), Provinsi Jawa Tengah dan Nasional secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Kabupaten / Kota	Tingkat Kemiskinan					Perubahan Tingkat Kemiskinan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Magelang	11,91	11,09	10,96	10,83	9,9	0,64	-0,82	-0,13	-0,13	-0,93
Kota Magelang	7,75	7,1	6,11	5,94	5,68	0,17	-0,65	-0,99	-0,17	-0,26
Kabupaten Temanggung	10,17	9,33	9,26	8,67	7,78	0,21	-0,84	-0,77	-0,59	-0,89
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	9,94	9,17	8,78	8,48	7,79	0,21	-0,27	0,4	-0,30	-0,69
JAWA TENGAH	11,79	10,93	10,77	10,47	9,48	0,38	-0,86	-0,16	-0,30	-0,99
NASIONAL	9,71	9,57	9,36	9,03	8,47	-0,48	-0,14	-0,21	-0,33	-0,56

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI, 2025, data diolah

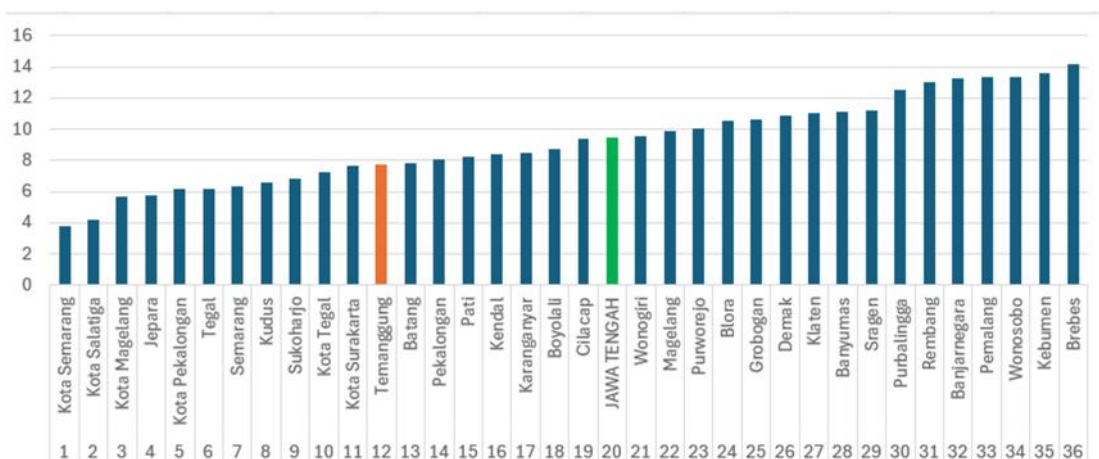


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah.

Gambar 3.4

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung, Wilayah Pengembangan Gelas Manggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan tabel 3.10, posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2025 pada wilayah pengembangan Gelas Manggung menempati posisi kedua setelah Kota Magelang, serta berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa secara posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2025 lebih baik dari kabupaten lain dalam wilayah pengembangan Gelas Manggung serta lebih baik dari rata-rata Gelas Manggung, provinsi maupun nasional (tersaji pada gambar 2.4). Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah sendiri posisi relatif Kabupaten Temanggung menempati urutan ke-12 dibandingkan kabupaten/kota lain yang tersaji pada gambar 3.5.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 3.5

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung Dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Pembahasan tentang kemiskinan tidak terlepas dari pembahasan mengenai penduduk miskin. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (dibawah Rp 443.089 per kapita per bulan). Adapun jumlah penduduk miskin dan pertumbuhannya di Kabupaten Temanggung, wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana disajikan pada tabel 3.11.

Tabel 3.11

Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin, Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin dengan Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Magelang	154,91	145,33	144,49	143,8	132,211	5,86	-6,18	-0,58	-0,48	-8,06
Kota Magelang	9,44	8,65	7,45	7,25	6,93	1,83	-8,37	-13,87	-2,68	-4,41
Kabupaten Temanggung	79,09	73,04	72,96	68,77	62,05	2,28	-7,65	-0,11	-5,74	-9,77
RATA-RATA GELANGMANG GUNG	81,15	75,67	74,97	73,27	67,06	3,32	-7,40	-4,85	-2,97	-7,41
JAWA TENGAH	4.109,75	3.831,4 4	3.704,3 3	3.791 ,50	3.367	3,24	-6,77	-3,32	2,35	- 11,2 0
NASIONAL	26.503,6 5	26.363, 27	25.220, 00	24.06 0,00	23.850	-3,80	-0,53	-4,34	-4,60	-0,87

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI, 2025, data diolah

Perbandingan perubahan jumlah penduduk miskin daerah dengan rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung sebelum pandemi Covid-19 Kabupaten Temanggung menempati urutan kedua setelah Kota Magelang. Dalam kurun waktu Tahun 2021-2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dan mengalami peningkatan cukup tinggi pada Tahun 2021-2024. Pada Tahun 2025, penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang lebih dari rata-rata wilayah pengembangan Gelangmanggung, provinsi maupun nasional. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Temanggung terus memperkuat pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang mengacu pada 3 (tiga) strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan penurunan jumlah kantong kemiskinan.

Pada tahun 2025, agenda penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas daerah, dengan penekanan pada percepatan capaian target melalui sinergi kebijakan dan optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja berdasarkan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi
1.	Program Penanggulangan Bencana	1.552.920.000,00	1.062.134.885,00
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	510.479.000,00	448.969.010,00
3.	Program Pencatatan Sipil	5.408.500,00	5.135.011,00
4.	Program Pendaftaran Penduduk	679.262.800,00	638.173.345,00
5.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	111.330.061.352,00	107.696.957.123,00
6.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	163.297.000,00	156.676.890,00
7.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	247.023.670,00	246.627.661,00
8.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	458.449.800,00	455.816.913,00
9.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	300.000.000,00	245.676.500,00
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.983.647.400,00	4.949.342.702,00
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.273.173.157,00	17.811.236.714,00
12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	318.335.000,00	312.919.481,00
13	Program Pengembangan UMKM	73.589.500,00	72.758.375,00
14	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	139.012.200,00	81.998.932,00
15	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.057.697.200,00	1.949.313.581,00
16	Program Penyelenggaraan Jalan	29.544.252.700,00	28.230.003.494,00
17	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.790.196.240,00	3.656.559.188,00

No	Program	Anggaran	Realisasi
18	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	173.102.740,00	164.875.400,00
19	Program Penataan Desa	11.508.100,00	11.321.100,00
20	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.249.053.450,00	3.985.386.230,00
21	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.470.149.000,00	5.716.323.034,00
22	Program Pengelolaan Pendidikan	140.911.833.310,00	135.918.890.225,00
23	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.762.018.590,00	17.094.653.261,00
24	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	609.703.000,00	572.953.726,00
25	Program Penempatan Tenaga Kerja	128.947.700,00	127.468.831,00
26	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	322.601.750,00	312.593.195,00
27	Program Kawasan Permukiman	1.192.231.300,00	804.773.500,00
28	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.655.398.000,00	6.595.234.942,00
29	Program Pengembangan Perumahan	306.119.500,00	265.650.448,00
30	Program Pemberdayaan Sosial	137.671.600,00	137.128.800,00
31	Program Penanganan Bencana	236.374.200,00	234.027.700,00
32	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	22.375.621.060,00	21.526.634.834,00
33	Program Rehabilitasi Sosial	682.219.430,00	676.553.732,00
Total		377.651.358.249,00	362.164.768.763,00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 3.12, secara keseluruhan realisasi sampai dengan semester II tahun 2025 dapat memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan program di tahun 2025 untuk penanggulangan kemiskinan. Realisasi program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 362.164.768.763,00 dengan pagu anggaran sebesar Rp 377.651.358.249,00 sehingga capaian realisasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan sebesar 95,90%. Melihat capaian kinerja tingkat kemiskinan sebesar 100% terhadap target tahun 2025 (tingkat kemiskinan 7,78% dari target 7,95 – 8,1%) yang disandingkan dengan capaian realisasi penggunaan anggaran untuk penanggulangan

kemiskinan sebesar 95,90%, dimana capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan capaian penggunaan anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi sumber daya. Efisiensi ini pada dasarnya merujuk pada kemampuan Kabupaten Temanggung yang dapat mencapai hasil (output) maksimal dengan penggunaan sumber daya anggaran seminimal mungkin. Selain itu, program penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan efektivitas tinggi karena capaian indikator melebihi target kinerja dengan dukungan anggaran yang terserap optimal.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa beberapa faktor penghambat dalam penanggulangan kemiskinan. Faktor penghambat secara umum antara lain transisi kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pasca ditetapkannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga berpengaruh pada kurang intensifnya koordinasi TKPKD, belum adanya rencana aksi dan *roadmap* yang jelas terkait pengentasan kemiskinan, serta adanya kebijakan baru terkait database dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, pencapaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung tahun 2025 telah melampaui target kinerja didorong oleh kombinasi kebijakan pemerintah yang terarah, optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, dan kondisi ekonomi lokal yang relatif stabil. Selain itu, faktor pendorong lainnya adalah optimalisasi strategi penanggulangan kemiskinan dimana (1) penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial, bantuan siswa miskin, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, bantuan dan rehabilitasi kelompok berkebutuhan khusus, pelayanan kesehatan dan pendidikan dll, (2) peningkatan pendapatan melalui peningkatan akses pekerjaan, peningkatan keterampilan dengan vokasi dan pelatihan, padat karya, pengembangan UMKM, pemberian dan penguatan modal untuk perorangan maupun kelompok dll, dan (3) penurunan jumlah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses pelayanan dasar infrastruktur, pendidikan, kesehatan dll, peningkatan konektivitas antar wilayah dll.

Realisasi pencapaian kinerja tingkat kemiskinan mencerminkan tantangan yang dihadapi seperti ketepatan sasaran penerima manfaat, dinamika pemutakhiran data serta hambatan teknis dan administrative dalam pelaksanaan kegiatan di sejumlah wilayah. Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang lebih intensif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat proses verifikasi dan validasi data kemiskinan, serta memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar menjangkau kelompok sasaran secara efektif. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program agar langkah-langkah perbaikan yang bersifat strategis dan teknis dapat segera diterapkan secara lebih sistematis dan kolaboratif. Dengan penguatan sinergi antar lembaga, dukungan pemerintah daerah, serta pelibatan aktif masyarakat diharapkan nantinya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat lebih optimal dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung.



Sumber: Dinkominfo Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 3.6
Penyerahan Alat Bantu Dengar

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 3.13
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017

Pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung secara umum menunjukkan kualitas yang baik, tercermin dari rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 87,66. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut mengindikasikan adanya konsistensi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik selama periode 2021 hingga 2025. Berdasarkan rekapitulasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 yang dilaksanakan secara mandiri, penilaian dilakukan terhadap 72 organisasi penyelenggara pelayanan, yang selanjutnya menjadi dasar evaluasi mutu layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.



Sumber: PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017

Gambar 3.7
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari 82,06 pada tahun 2021 menjadi 87,66 pada tahun 2025. Kenaikan bertahap setiap tahun—83,41 (2022), 84,97 (2023), dan 86,91 (2024)—menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Secara kumulatif, peningkatan sebesar 5,60 poin dalam lima tahun mencerminkan semakin meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indeks Kepuasan Masyarakat				
	Tahun	Target	Realisasi	Kinerja Pencapaian Target RKPD	Skala Nilai
1	2021	86	82,06	95,42%	Sangat Tinggi
2	2022	87	83,41	95,87%	Sangat Tinggi
3	2023	89	84,97	95,47%	Sangat Tinggi
4	2024	B/76,61 – 88,30	86,91	100%	Sangat Tinggi
5	2025	86,95	87,66	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2025

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berada pada kategori sangat

tinggi dan relatif stabil. Pada tahun 2021–2023 meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, tingkat pencapaian kinerja tetap berada di atas 95% atau sangat tinggi. Selanjutnya pada tahun 2024 dan 2025, realisasi IKM telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 sebesar 87,66 menunjukkan kinerja yang sangat baik karena telah melampaui target tahunan yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2030 sebesar 90, realisasi tersebut baru mencapai sekitar 97,4% dari sasaran akhir. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tren kinerja menunjukkan perkembangan positif, masih diperlukan penguatan inovasi layanan, peningkatan profesionalisme aparatur, serta penyempurnaan sistem pelayanan guna memastikan target jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

Tabel 3.15

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung, Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2025

Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
Kabupaten Temanggung	87,66
Kabupaten Magelang	87,71
Kota Magelang	98,33
Rata-rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung	91,23
Provinsi Jawa Tengah	88,5
Nasional	n.a

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Temanggung mencapai 87,66, yang berada sedikit di bawah Kabupaten Magelang (87,71) dan masih terpaut cukup jauh dari Kota Magelang yang mencatatkan nilai sangat tinggi sebesar 98,33. Jika dibandingkan dengan rata-rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung sebesar 91,23, capaian Kabupaten

Temanggung masih berada di bawah rerata kawasan, sehingga menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah sebesar 88,5, nilai Kabupaten Temanggung sedikit lebih rendah, menandakan bahwa kinerja pelayanan masih perlu dioptimalkan. Data nasional tidak tersedia (n.a), namun secara umum capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Temanggung sudah berada pada kategori baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan.

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Temanggung didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada setiap organisasi perangkat daerah yang berperan dalam memastikan kelancaran fungsi administrasi, koordinasi, dan tata kelola pemerintahan. Pada Tahun 2025, realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp1.132.442.494.038,00 atau sebesar 91,80% dari total pagu anggaran Rp1.233.597.592.678,00, yang menunjukkan tingkat serapan anggaran dalam kategori sangat baik. Dengan tingkat efisiensi sebesar 8,20%, target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 tetap berhasil dicapai bahkan melampaui sasaran yang ditetapkan.

Capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi didorong oleh berbagai faktor, antara lain adanya tindak lanjut perbaikan pelayanan berdasarkan hasil survei sebelumnya, kemudahan akses layanan bagi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana partisipasi masyarakat, serta meningkatnya kesadaran aparatur sipil negara terhadap budaya melayani. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat, seperti kapasitas sumber daya manusia pelayanan yang perlu terus ditingkatkan serta kondisi sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan ke depan antara lain melalui penguatan kompetensi dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas pelayanan, peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pendukung layanan, optimalisasi transformasi

digital, serta penguatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan perbaikan pelayanan berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

1. Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS 1: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			RPJMD 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2030	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,86	72,76	72,52	99,67	74,99	72,52	96,71
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	2,35	2,3 - 2,17	2,31	99,57	1,97 - 1,67	2,31	84,00
3	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	35,49	37,26	38,00	100	57,05	38,00	66,61
Capaian Kinerja Sasaran						99,75			82,44

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.16, sasaran 1 yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT), dan PDRB per Kapita pada tahun 2025 tercapai sebesar 99,75% atau kategori “Sangat Tinggi”. Realisasi kinerja pada ketiga indikator tersebut pada tahun 2025 mengalami peningkatan capaian. Pada tabel 2.15, disajikan pula data target tahun 2030 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 terkait IPM, TPT, dan PDRB per Kapita. Adapun capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 adalah 80,97% atau dengan kategori “Tinggi”, dengan rincian capaian sampai dengan tahun 2025 untuk IPM sebesar 97,71%, TPT sebesar 84,00%, dan PDRB per Kapita sebesar 62,21%.

Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran 1. adalah Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Status pencapaian IPM dikategorikan dalam empat kategori, yaitu: (a) Sangat Tinggi (IPM ≥ 80); (b) Tinggi, (IPM 70-80); (c) Sedang, (IPM 60-70); dan (d) Rendah, (IPM < 60).

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja makro daerah, tabel 2.16 menyajikan perkembangan realisasi IPM Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 beserta tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan

Tabel 3.17
Perkembangan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Target
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)				
	Target	Realisasi	Perubahan	Kinerja Pencapaian Target RKPD	Skala Nilai
2021	69,84	69,88	0,45	100%	Sangat Tinggi
2022	70,16	70,77	1,27	100%	Sangat Tinggi
2023	70,49	71,33	0,79	100%	Sangat Tinggi
2024	71,77	71,86	0,76	100%	Sangat Tinggi
2025	72,76	72,52	1,24	99,67%	Sangat Tinggi

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Berdasarkan tabel 3.17, IPM Kabupaten Temanggung selama tahun 2021-2025 cukup fluktuatif dengan pertumbuhan yang tergolong moderat, namun cenderung mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 tercapai sebesar 72,52 atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2024 (71,86). Capaian IPM tahun 2025 merupakan capaian IPM tertinggi di Kabupaten Temanggung. Adapun pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung tahun 2025 lebih tinggi (1,24%) jika dibandingkan dengan dengan tahun 2024. Sedangkan untuk pertumbuhan IPM tertinggi yaitu pada tahun 2022 (1,27%) dan pertumbuhan IPM paling rendah terjadi pada tahun 2021 (0,45%). Berikut merupakan perbandingan realisasi IPM Kabupaten dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021 – 2025 secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Perbandingan IPM Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah
Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Kabupaten/ Kota	IPM				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Magelang	79,43	80,39	81,17	82,15	82,92
Kabupaten Magelang	70,12	70,85	71,45	72,1	73,09
Kabupaten Temanggung	69,88	70,77	71,33	71,87	72,76

RATA-RATA GELANGMANGGUNG	73,14	74,00	74,65	75,37	76,26
JAWA TENGAH	72,16	72,79	73,39	73,87	74,77
NASIONAL	72,29	72,91	74,39	75,02	75,9

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Capaian IPM Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan kabupaten/kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Kabupaten Temanggung menempati urutan ke tiga setelah Kabupaten Magelang. Meski menunjukkan progress yang positif, capaian IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah capaian rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah maupun nasional, sehingga Kabupaten Temanggung masih memerlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian IPM melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi untuk mewujudkan pembangunan manusia yang semakin berkualitas.

Berikut merupakan perkembangan capaian dimensi penyusun IPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025 secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Perkembangan Capaian Dimensi Penyusun IPM
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Variabel	2021	2022	2023	2024	2025
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	69,88	70,77	71,33	71,87	72,52
A	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	75,64	75,7	75,77	75,94	76,16
B	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,08	12,55	12,61	12,62	12,63
	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	6,94	7,41	7,50	7,53	7,61
C	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	9.142	9.773	10.108	10.519	10.995

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

IPM tersusun dari 3 (empat) dimensi yaitu pendidikan (RLS dan HLS), kesehatan (UHH), dan standar hidup layak (Pengeluaran per Kapita disesuaikan). Dalam dimensi IPM Kabupaten Temanggung paling rendah berada pada sektor pendidikan, Dimana RLS penduduk usia 25 tahun ke

atas tercatat sebesar 7,61 pada tahun 2025. Artinya penduduk Kabupaten Temanggung baru menempuh pendidikan sampai kelas 1 SMP/ sederajat atau putus sekolah di kelas 2 SMP/ sederajat. Indikator pendidikan lainnya adalah HLS yang mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun keatas). Pada Tahun 2025, HLS Kabupaten Temanggung sebesar 12,63 tahun artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang sekolah sampai 12,63 tahun atau setara dengan Tingkat I di Perguruan Tinggi jika kondisinya minimal sama seperti sekarang.

Sektor kesehatan juga merupakan investasi berharga dalam pembangunan manusia. Masyarakat yang sehat akan berdampak pada meningkatnya produktivitas dan pada akhirnya mendukung membaiknya proses pembangunan ekonomi yang semakin baik. Dimensi kesehatan ini dapat ditunjukkan dengan UHH Kabupaten Temanggung yang semakin membaik, tercatat pada tahun 2025 UHH Kabupaten Temanggung sebesar 76,16 tahun atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (75,94 tahun).

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dapat menjadi indikator yang mewakili dimensi standar hidup layak yang dapat mencerminkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung. Capaian pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2025 sebesar Rp 10.995.000.

Adapun faktor pendorong dalam pencapaian IPM di Kabupaten Temanggung diantaranya untuk dimensi HLS dan RLS didukung dengan pelaksanaan SPM bidang pendidikan, adanya bantuan bagi peserta didik, pemanfaatan output pendidikan yang menjadi standar sosial dan ekonomi, pelaksanaan Kampanye Gerakan Kembali ke Sekolah, peningkatan kualitas layanan pendidikan yang didukung dengan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana prasarana pendidikan. Sedangkan dari sisi UHH didukung dengan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan,

jaminan kesehatan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan pada umumnya. Dari dimensi pengeluaran riil per kapita didukung oleh beberapa statistik lainnya diantaranya menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka serta stabilnya perekonomian di Kabupaten Temanggung.

Faktor penghambat, dan upaya pencapaian kinerja pada indikator IPM di Kabupaten Temanggung dilihat dari dimensi pendidikan (HLS dan RLS) diantaranya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih menghalangi tercapainya pemerataan akses kepada pendidikan, masih terdapat anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan, masih adanya anak tidak sekolah, kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, masih rendahnya pengelolaan kelembagaan pendidikan, serta belum banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi dan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada dimensi kesehatan (UHH) masih terdapat beberapa penghambat yaitu masih adanya stigma masyarakat yang belum menerapkan paradigma sehat (kalau belum sakit belum periksa berdampak pada skrining penyakit rendah) dan pola hidup masyarakat (kurang olahraga dan makan makanan kurang sehat) menyebabkan tingginya penyakit tidak menular (PTM) faktor risikonya, belum optimalnya informasi dan edukasi terkait TBC serta belum optimalnya pelayanan orang berisiko terinfeksi HIV menyebabkan masih tingginya penyakit menular (PM), masih terdapat permasalahan berkaitan dengan masih adanya balita gizi buruk, dan masih terdapat permasalahan kurangnya kepesertaan dan rendahnya keaktifan peserta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sedangkan pada dimensi ekonomi (Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan) yang masih terbatas dipengaruhi oleh struktur ekonomi lokal yang masih bergantung pada sektor pertanian atau usaha kecil menengah dengan produktivitas rendah sehingga daya beli masyarakat tidak cepat meningkat, masih adanya masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang belum optimal membuat masyarakat sulit mengakses pekerjaan bergaji lebih tinggi, masih adanya

pengangguran di Kabupaten Temanggung walaupun untuk pengangguran terbuka sudah relatif kecil capaiannya, serta adanya ketidakmerataan akses terhadap sarana ekonomi (transportasi, pasar, teknologi, pendidikan, kesehatan) juga dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi berdaya tambah tinggi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung kinerja indikator IPM di Kabupaten Temanggung yaitu dapat dilakukan melalui penerapan SPM pendidikan secara menyeluruh, pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik pendidikan formal dan non formal, memprioritaskan usia peserta didik 13-15 tahun dengan memberikan poin tinggi, sosialisasi secara massif kampanye Gerakan Kembali ke Sekolah, rehabilitasi dan melengkapi fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi guru, peningkatan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal, serta sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat baik melalui media sosial dan elektronik lainnya. Upaya yang dapat dilakukan pada dimensi kesehatan yaitu peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan berkualitas melalui integrasi layanan primer dan lanjutan, peningkatan kepesertaan BPJS, pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa/kelurahan, dan peningkatan infrastruktur fisik pelayanan kesehatan termasuk puskesmas pembantu dan PKD. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan pada dimensi ekonomi melalui peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat miskin, bantuan sosial bagi masyarakat miskin berbasis data terpadu, integrasi program pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi, pengembangan agroindustri dan UMKM berbasis hasil pertanian, *link and match* pelatihan dengan kebutuhan industri lokal dan regional, serta pemberlakuan operasi pasar dan stabilisasi harga bahan pokok.

Berikut merupakan rincian program, anggaran, dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian pada indikator IPM di Kabupaten Temanggung yaitu:

Tabel 3.20
Program, Anggaran, dan Realisasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian IPM di
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	140.911.833.310	135.918.890.225
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	255.485.600	216.742.500
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.162.409.080	3.994.150.215
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	225.000.000	225.000.000
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	111.330.061.352	107.696.957.123
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.149.970.500	1.122.141.061
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	596.665.000	527.919.000
8	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan. dan Makanan Minuman	205.937.000	172.385.490
9	Program Pembinaan Perpustakaan	1.166.394.115	1.015.302.622
10	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.129.479.500	1.128.530.765
11	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	25.100.800	23.180.350
12	Program Perlindungan Perempuan	38.394.370	20.235.350
13	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	18.959.200	17.833.250
14	Program Pemenuhan Hak Anak	40.335.500	39.139.500
15	Program Perlindungan Khusus Anak	88.369.400	73.931.100
16	Program Pengendalian Penduduk	493.800.000	447.330.373
17	Program Pembinaan KB	7.470.149.000	5.716.323.034
18	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.249.053.450	3.985.386.230
19	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	264.000.000	263.400.000
20	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	609.703.000	572.953.726
21	Program Penempatan Tenaga Kerja	128.947.700	127.468.831

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran
22	Program Hubungan Industrial	110.289.700	105.391.927
23	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	322.601.750	312.593.195
24	Program Pemberdayaan Sosial	137.671.600	137.128.800
25	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	22.375.621.060	21.526.634.834
26	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)	318.335.000	312.919.481
27	Program Pengembangan UMKM	73.589.500	72.758.375
28	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	495.801.540	479.647.027
29	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	139.012.200	81.998.932
30	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	16.628.900	14.073.500
31	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	15.486.400	12.709.000
	Jumlah	298.565.085.527	286.361.055.816

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Kinerja sasaran dengan indikator IPM pada tahun 2025 didukung 31 program dengan anggaran sebesar Rp. 298.565.085.527 dan realisasi sebesar Rp. 286.361.055.816 (95,91%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 4,09%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,67% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 95,91% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 3,76%.



Sumber: Dinkominfo Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 3.8

Penggalangan komitmen jejaring ambulans se-Kabupaten Temanggung dan Sosialisasi INCAKAP (program literasi digital untuk pelajar) oleh Dinkominfo

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja, yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Selain itu, TPT juga menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja di suatu daerah. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran Terbuka terdiri dari :

- a. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

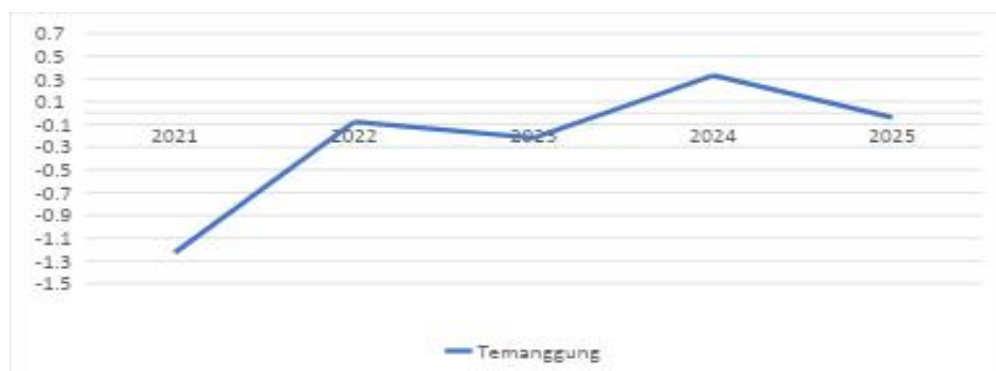
Berikut merupakan perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dengan target RKPD yang telah ditentukan Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar 3.9



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 3.9
Perbandingan Realisasi TPT dengan Target Daerah Tahun 2021 – 2025

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan target RKPD tahun 2021 – 2025 sudah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKPD. Pada tahun 2021, tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih tinggi dibandingkan target hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19, namun pada tahun selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung berangsur membaik yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih rendah dibandingkan target daerah serta tingkat perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ≤ 0 sebagaimana gambar dan tabel berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 3.10
Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Secara lebih rinci terkait perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung sebagaimana di sajikan pada tabel 3.21

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

Tahun	Target RKPD	Realisasi TPT	Perubahan TPT	Capaian Kinerja TPT
2021	3,50	2,62	-1.23	100%
2022	3,50	2,54	-0.08	100%
2023	3,50	2,32	-0,22	100%
2024	3,52	2,35	0,03	100%
2025	2,3	2,31	-0,04	99,57%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 3.21, TPT Kabupaten Temanggung mengalami kecenderungan menurun dari tahun 2021–2025. Sedangkan pada tahun 2025 menunjukkan penurunan capaian sebesar 0,04 dibandingkan dengan tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian sebesar 0,03 dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang tercapai 2,32. Tingkat perubahan dengan nilai ≤ 0 yang berarti tenaga kerja yang tidak termanfaatkan semakin berkurang dan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada pada sektor pertanian dan industri padat karya. Tabel perbandingan tingkat pengangguran terbuka (TPT) daerah rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel 3.22

Tabel 3.22
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung
dengan Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan
Nasional Tahun 2021 – 2025

Kabupaten / Kota	TPT				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Magelang	5,03	4,97	5,25	4,40	4,31
Kabupaten Magelang	8,73	6,71	4,42	3,55	3,52
Kabupaten Temanggung	2,62	2,54	2,32	2,35	2,31
RATA-RATA	5,46	4,74	4,00	3,43	3,38

Kabupaten / Kota	TPT				
	2021	2022	2023	2024	2025
GELANGMANGGUNG					
JAWA TENGAH	5,95	5,57	5,13	4,78	4,66
NASIONAL	6,49	5,83	5,32	4,91	4,85

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Secara umum TPT dan Perubahan Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara Gelangmanggung. Jika ditinjau lebih rinci, TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah pengembangan Gelangmanggung dengan perubahan sebesar -0,04 pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan rata-rata capaian wilayah setara yang dibuktikan dengan nilai TPT sebesar <3% sedangkan pada wilayah Gelangmanggung mencapai >4%.

Selain dibandingkan dengan rata-rata capaian wilayah setara, perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan capaian Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional juga menunjukkan nilai yang lebih baik. Perubahan TPT Kabupaten Temanggung juga menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nasional maupun provinsi dengan penurunan sebesar -1,23 pada Tahun 2021 dan -0,24 pada tahun 2025. Selain dari perubahannya, TPT di Kabupaten Temanggung juga jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional dengan TPT terendah pada tahun 2023 sebesar 2,32 sedangkan Jawa Tengah dan nasional secara berturut-turut mencapai 5,13 dan 5,32. Hal ini karena sektor pertanian terutama pada komoditas tembakau dan industri pengolahan kayu yang padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2025 TPT Kabupaten Temanggung sebesar 2,31 sedangkan provinsi dan nasional secara berturut-turut mencapai 4,66 dan 4,85. Capaian ini tentu menunjukkan peningkatan kinerja yang baik dari pemerintah daerah dalam penanganan ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung.

Adapun pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung dari tahun 2021–2025 cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Berikut

merupakan secara rinci rata-rata pertumbuhan dan perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel 3.23.

Tabel 3.23
Rata-Rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Penganggur di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Tahun	Kabupaten Temanggung		
	Jumlah Penganggur	Pertumbuhan (%)	Perubahan
2021	11.918	-13,36	-1.838
2022	12.024	0,89	106
2023	11.192	-6,92	-832
2024	11.832	5,72	640
2025	11.684	-1,25	-148
Rata-Rata	11.730	-3,00	-414

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung Tahun 2022–2023 cenderung fluktuatif dengan tren menurun akan tetapi pada Tahun 2024 naik dengan pertumbuhan 5,64%. Kenaikan jumlah penganggur dikarenakan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sektor jasa padat karya di Kabupaten Temanggung. Adapun rata-rata pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir <0 dengan nilai sebesar -2,99%. Rata-rata tingkat perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2021–2025 berada pada titik <0 dengan pengurangan sebanyak 414 orang.

Penurunan capaian TPT Kabupaten Temanggung didorong dengan meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja, meningkatnya minat masyarakat usia kerja untuk bekerja, adanya upaya perluasan kesempatan kerja melalui wirausaha baru, perluasan ketersediaan kesempatan kerja bagi perempuan di berbagai sektor usaha, semakin berkembangnya usaha mikro dan kecil, *networking* yang cukup baik antara pemerintah daerah dengan perusahaan sehingga pelaksanaan rekrutmen di daerah semakin meningkat, penciptaan wirausaha untuk

penyandang disabilitas, serta adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah melalui program pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian TPT di Kabupaten Temanggung yaitu pertumbuhan penduduk usia produktif yang belum diimbangi dengan perluasan lapangan kerja, dominasi angkatan kerja di sektor pertanian yang bersifat musiman, ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri. terbatasnya kesempatan kerja formal yang mampu menyerap tenaga kerja, belum optimalnya akses dan kualitas pelatihan kerja, belum optimalnya dominasi penyerapan kerja di sektor informal dengan perlindungan kerja, terbatasnya kuota pelatihan yang dihadapkan dengan animo masyarakat yang cukup tinggi untuk mengikuti pelatihan, banyak pencari kerja masa kini cenderung memilih-milih pekerjaan, kurang aktifnya pencari kerja dalam mengikuti seleksi atau rekrutmen, serta kualifikasi pencari kerja tidak memenuhi persyaratan lowongan.

Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi meningkatnya jumlah pengangguran diantaranya peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan pada Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan bakat, memperluas kesempatan kerja dengan mendorong investasi lebih banyak di Kabupaten Temanggung melalui bursa kerja/bursa kerja khusus di lingkungan sekolah-sekolah Vokasi (SMK), memberikan kemudahan berusaha khususnya perusahaan-perusahaan baik PMPN/PA yang padat kerja, dan menumbuhkan potensi ekonomi dengan disertifikasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi lokal.

Berikut merupakan rincian program, anggaran, dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian pada indikator TPT di Kabupaten Temanggung yaitu:

Tabel 3.24

Program, Anggaran, dan Realisasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian TPT di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	609.703.000	572.953.726
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	128.947.700	127.468.831

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran
3	Program Hubungan Industrial	110.289.700	105.391.927
4	Program Pengelolaan Pendidikan	140.911.833.310	135.918.890.225
5	Program Pengembangan Kebudayaan	8.307.736.300	7.141.816.411
6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	364.480.800	351.097.310
	Jumlah	150.432.990.810	144.217.618.430

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Kinerja sasaran pemerintah daerah dengan indikator Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 didukung 6 program dengan anggaran sebesar Rp. 150.432.990.810 dan realisasi sebesar Rp. 144.217.618.430 (95,87%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 4,13%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,57% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 95,87% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 3,70%.



inkominfo Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 3.11
Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan produktivitas di BLK
Kabupaten Temanggung

c. PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu, baik ADHB maupun ADHK. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan

oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB per Kapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB per Kapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut.

Tabel 3.25
Perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Tahun	Target PDRB Perkapita (Rupiah)	Realisasi PDRB Perkapita (Rupiah)	Pertumbuhan PDRB Perkapita (%)	Kinerja Pencapaian Target RKPD
2021	22.000.000	28.484.021	4,24	100%
2022	23.000.000	30.938.180	8,62	100%
2023	29.570.000	33.290.000	7,60	100%
2024	31.992.800	35.490.000	6,61	100%
2025	37.260.000	38.002.300	7,08	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan tabel 3.25, pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif dengan tren realisasi yang terus meningkat. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 8,62%. Realisasi PDRB per Kapita tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu Rp38.002.300, dengan pertumbuhan sebesar 7,08%.

Berikut merupakan perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung secara rinci disajikan pada tabel 3.26

Tabel 3.26
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2021	28.484.021	4,24	19.370.430	0,78
2022	30.938.180	8,62	20.190.000	2,44
2023	33.290.000	7,60	21.030.000	5,10
2024	35.490.000	6,61	21.910.000	7,79
2025	38.002.300	7,08	22.973.000	4,35

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per Kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Adapun pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebesar 4,35%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Temanggung jika dibandingkan rata-rata capaian wilayah yang setara tersaji pada tabel 3.27

Tabel 3.27
Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025 dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional

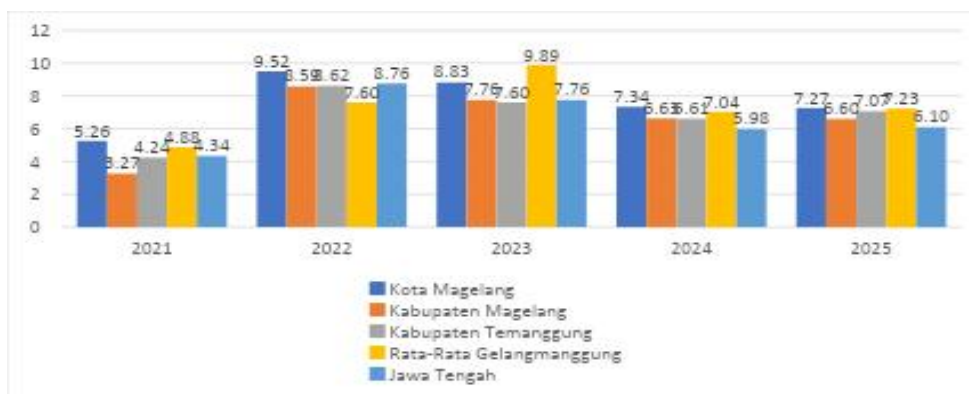
Kabupaten /Kota	2021		2022		2023		2024		2025	
	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
Kota Magelang	75.476.930,00	5,26	82.660.000,00	9,52	89.960.000,00	8,83	96.560.000,00	7,34	103.577.000,00	7,27
Kabupaten Magelang	26.124.724,57	3,27	28.370.000,00	8,59	30.571.677,86	7,76	32.600.000,00	6,63	34.751.000,00	6,60
Kabupaten Temanggung	28.484.021,00	4,24	30.938.180,00	8,62	33.290.000,00	7,60	35.490.000,00	6,61	38.002.000,00	7,07

Kabupaten /Kota	2021		2022		2023		2024		2025	
	Nilai (Ribu Rupiah)	Per tum-buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Per tum-buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Per tum-buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Per tum-buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum-buhan (%)
Rata-Rata Gelangmanggung	43.361.891,86	4,88	46.659.071,52	7,60	51.273.892,62	9,89	54.883.333,33	7,04	58.776.666,67	7,23
Jawa Tengah	38.568.000,00	4,34	41.946.000,00	8,76	45.199.000,00	7,76	47.900.000,00	5,98	50.823.640,00	6,10
Nasional	62.236.441,00	9,31	71.030.850,00	14,15	74.964.701,00	5,63	78.617.420,00	4,87	83.747.734,00	6,53

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2026

Berdasarkan tabel 3.27, menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB pada wilayah Gelangmanggung mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 (8,62%) dari tahun 2021 (4,24%). Namun pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, pada tahun 2023 pertumbuhannya sebesar 7,60%, sedangkan pada tahun 2024 menjadi 6,61%. Namun, pada tahun 2025 PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp38.002.000 atau dengan pertumbuhan 7,07%. Jika dibandingkan dengan capaian selama kurun waktu empat tahun terakhir pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Kabupaten Temanggung menempati urutan ketiga setelah Kabupaten Magelang, namun pada tahun 2025 menjadi di atas Kabupaten Magelang.

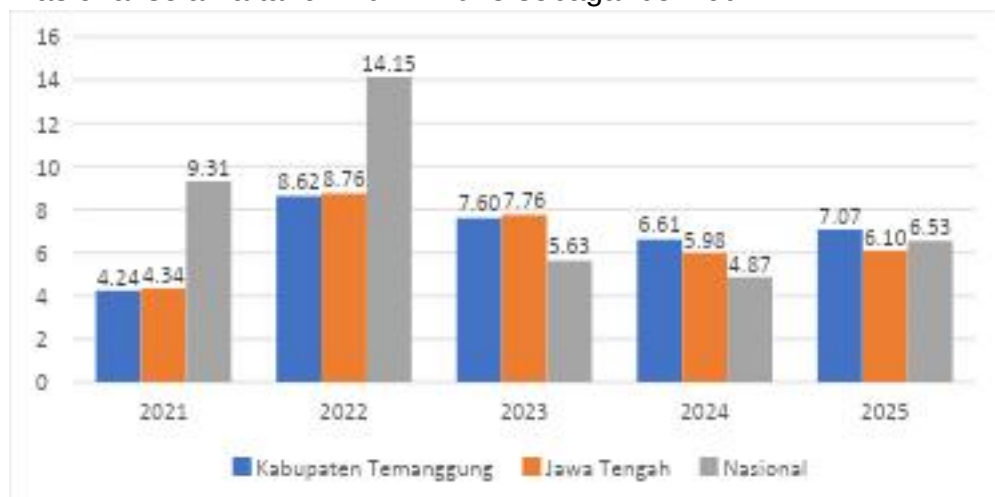
Berikut merupakan grafik Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB pada wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025 sebagaimana gambar 3.12



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Gambar 3.12
Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021–2025

Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan rata-rata wilayah setara. Pada tahun 2025, pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Temanggung sedikit dibawah rata-rata capaian wilayah setara sebesar 7,23%, akan tetapi jika dibandingkan dengan Kabupaten Magelang masih lebih tinggi capaiannya, namun masih dibawah Kota Magelang. Hal ini disebabkan melonjaknya pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB di Kota Magelang yang merupakan kawasan perkotaan bergerak pada sektor sekunder (non-pertanian), sedangkan Kabupaten Temanggung didominasi oleh kawasan perdesaan bergerak pada sektor primer (pertanian). Sedangkan untuk perbandingan pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional selama tahun 2021–2025 sebagai berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Gambar 3.13

Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021–2025

Pertumbuhan PDRB per Kapita antara Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional cenderung bergerak secara fluktuatif. Pada periode Tahun 2021–2023, kondisi pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung masih berada dalam *range* pertumbuhan provinsi dan nasional dimana Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibandingkan nasional namun lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Pada masa pasca pandemi covid-19 tahun 2021, Kabupaten Temanggung berhasil bangkit yang dibuktikan dengan pertumbuhan

PDRB per Kapita yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Akan tetapi, pada tahun 2024 pertumbuhan PDRB per Kapita berada di bawah pendapatan per kapita provinsi dan nasional.

Adanya peningkatan pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, adanya peningkatan interaksi ekonomi antara Kabupaten Temanggung dengan wilayah di sekitarnya, Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, seperti olahan kopi, produk hortikultura, dan hasil perkebunan lainnya, peningkatan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan konektivitas wilayah, adanya dukungan sumber daya alam, sumber daya manusia, komoditas unggulan, maupun sektor ekonomi tertentu yang memiliki daya saing tinggi, dan tingkat pengangguran yang semakin rendah.

Sedangkan dalam pencapaian PDRB per Kapita di Kabupaten Temanggung juga terdapat faktor-faktor penghambat antara lain, masih adanya pengangguran di Kabupaten Temanggung, masih tingginya ketimpangan pendapatan, masih terdapat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan yang masih rendah dilihat dari rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah yang masih rendah, infrastruktur dan teknologi produksi yang kurang memadai sehingga biaya produksi masih tinggi, produk pertanian sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah, peran sektor pertanian masih sangat dominan daripada sektor lainnya seperti industri pengolahan dan perdagangan, masih rendahnya investasi, upah minimum Kabupaten Temanggung yang masih rendah, dan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Upaya untuk meningkatkan distribusi produk barang dan jasa lokal sehingga selain dapat melayani permintaan dan kebutuhan lokal namun juga dapat melayani wilayah sekitarnya, membuka peluang investasi dari berbagai sektor baik dalam maupun luar wilayah, membangun infrastruktur dasar yang dapat dilakukan melalui pembangunan prasarana jalan, penyediaan perlengkapan jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan). Selain itu, Kabupaten Temanggung juga untuk mendorong pertumbuhan PDRB per Kapita serta pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong UMKM agar bertumbuh

dan naik kelas. Adapun upaya dari sektor pertanian yaitu dapat dilakukan melalui pengembangan sarana pertanian berupa pemberian pupuk, bantuan bibit, pelatihan dan bantuan saprodi, pembangunan atau rehabilitasi prasarana pertanian seperti pembangunan irigasi, jalan usaha tani (JUT), dan embung, pencegahan dan pengendalian penyakit pada hewan strategis, pemberian bantuan ternak, serta meningkatkan produksi komoditas unggulan. Selain itu, harus didukung dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD), melalui pajak reklame, pajak air tanah, PBB-P2, BPHTB, pajak barang jasa tertentu, serta peningkatan pelaksanaan elektronifikasi pajak daerah melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) dengan menyajikan semua informasi pelaporan satu realisasi pendapatan terintegrasi dalam sistem <https://pajak.temanggungkab.go.id>.

Berikut merupakan rincian program, anggaran, dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian pada indikator PDRB per Kapita di Kabupaten Temanggung yaitu:

Tabel 3.28
Program, Anggaran, dan Realisasi Anggaran yang Mendukung PDRB per Kapita di
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	322.601.750	312.593.195
2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	17.053.800	14.684.000
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	609.703.000	572.953.726
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	128.947.700	127.468.831
5	Program Hubungan Industrial	110.289.700	105.391.927
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)	318.335.000	312.919.481
7	Program Pengembangan UMKM	73.589.500	72.758.375
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	495.801.540	479.647.027
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	139.012.200	81.998.932
10	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	16.628.900	14.073.500

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran
11	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	15.486.400	12.709.000
12	Program Promosi Penanaman Modal	76.076.300	75.944.422
13	Program Pelayanan Penanaman Modal	119.042.000	116.604.024
14	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	25.010.500	24.855.831
15	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat	300.000.000	245.676.500
16	Program Penanganan Kerawanan Pangan	163.297.000	156.676.890
17	Program Pengawasan Keamanan Pangan	35.000.000	34.033.850
18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	247.023.670	246.627.661
19	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	7.641.500	7.538.855
20	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.273.173.157	17.811.236.714
21	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.983.647.400	4.949.342.702
22	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	458.449.800	455.816.913
23	Program Penyuluhan Pertanian	3.447.520.000	3.110.056.813
24	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	364.480.800	351.097.310
25	Program Pengembangan Kebudayaan	8.307.736.300	7.141.816.411
26	Program Pengelolaan Pendidikan	140.911.833.310	135.918.890.225
27	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.998.828.500	1.690.208.503
28	Program Penyelenggaraan Jalan	29.544.252.700	28.230.003.494
29	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	173.102.740	164.875.400
	Jumlah	211.683.565.167	202.838.500.512

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Kinerja sasaran pemerintah daerah dengan indikator PDRB per Kapita pada tahun 2025 didukung 29 program dengan anggaran sebesar Rp. 211.683.565.167 dan realisasi sebesar Rp. 202.838.500.512 (95,82%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 4,18%. Efisiensi sumber daya

dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95,25% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 95,82% sehingga terdapat inefisiensi sumber daya sebesar 0,57%.



Sumber: Dinkominfo Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 3.14

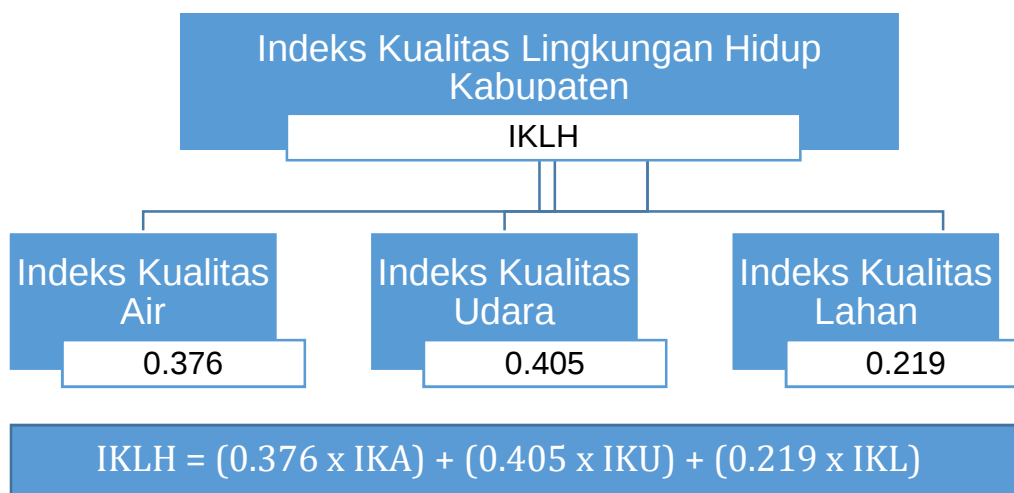
Peningkatan ekonomi masyarakat melalui inovasi Bata Kingdom dan Car Free Day (CFD) Panorama Ngadirejo

2. Sasaran Strategis 2 Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan.

Cara perhitungan IKLH mulai akhir tahun 2020 menggunakan rumus sebagai berikut:



Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH

Sangat Baik	90 -100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9

Sumber Data : Metode Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 -2024 KLHK

Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH

Baik	90 -100
Sedang	70 - 89,9
Kurang	50 - 69,9

Sumber Data : Metode Perhitungan Permen LH Nomor 14 Tahun 2025

Pada Periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, IKLH digunakan sebagai salah satu Tujuan Daerah yaitu Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman. Selanjutnya terkait dengan capaian Indikator kinerja disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.29
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 2 : Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			RPJMD 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2030	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68,25	75,46	72,54	96,13	75,68	72,54	95,85
Capaian Kinerja Sasaran					96,13%				

Tabel 3.30
Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2020 s/d 2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi IKLH	65,61	69,51	69,86	74,83	68,25	72,54

Berdasarkan data di atas realisasi IKLH Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020-2025 cenderung fluktuatif dengan realisasi tertinggi tercapai pada tahun 2023. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 72,54 dari target 75,46 sehingga secara persentase capaian sebesar 96,13%. Realisasi tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Sedangkan realisasi capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 apabila dibandingkan realisasi provinsi dan nasional, secara capaian, IKLH Kabupaten Temanggung dibawah Nasional dan Provinsi Jawa Tengah akan tetapi secara realisasi, IKLH Kabupaten Temanggung lebih tinggi dari realisasi provinsi Jawa Tengah tetapi lebih rendah dari realisasi nasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi IKLH Tahun 2025

No	Uraian	IKA			IKU			IKL			IKAL			IKLH		
		Tar get	Real isasi	Capai an	Tar get	Real isasi	Capai an	Tar get	Real isasi	Capai an	Tar get	Real isasi	Capai an	Tar get	Realisa si	Capaian
1	Nasional		72,97			82,62			78,19			82,6 9		76,49	78,76	102,97
2	Jawa Tengah	50, 66	52,03	102,7 0	85,01	87,73	103,2 0	42,45	48,37	113,9 5	83,8	78,6 7	93,88	67,55	69,46	102,83
3	Kabupaten Temang gung	74, 17	74,71	100,7 3	85,00	77,23	90,86	60,02	60,07	100	-	-	-	75,46	72,54	96,13

Faktor pendorong capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 antara lain:

1. Uji Kualitas Air dilaksanakan pada semester I dan II dengan dukungan anggaran dari APBD dan APBN
2. Adanya sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengujian kualitas udara tahun 2025
3. Potensi penambahan nilai IKL dari Deliniasi Ruang Terbuka Hijau/RTH meskipun koefisien perhitungannya relatif kecil yakni 0,005.

Selain faktor pendorong terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi capaian IKLH Tahun 2025 yaitu:

1. Perubahan Regulasi tentang IKLH mempengaruhi hasil indeks Kualitas Air/IKA
2. Parameter PM 2,5 merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyebabkan nilai IKU Kabupaten Temanggung tahun 2025 menjadi turun.

Sebagai upaya tindaklanjutnya, dapat dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan untuk meningkatkan kualitas air sungai dengan pengurangan beban pencemaran air
- b. Kegiatan untuk meningkatkan kualitas udara.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 didukung dengan program sebagai berikut:

Tabel 3.32
Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025

No.	Program	Tahun 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	43.643.400	43.532.350	99,75
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	337.157.200	328.101.832	97,31
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	306.169.700	301.840.103	98,59
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	6.337.500	6.257.600	98,74

No.	Program	Tahun 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	16.671.400	16.652.532	99,89
6	Program Pengelolaan Persampahan	6.266.970.700	5.995.936.245	95,68
	JUMLAH	6.976.949.900	6.692.320.662	95,92

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel di atas, kinerja sasaran pemerintah daerah dengan indikator IKLH tahun 2025 didukung 6 program pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan total anggaran sebesar Rp6.976.949.900,- dan realisasi sebesar Rp6.692.320.662,- (95,92%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,08%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 96,13% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 95,92% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,21%.





Gambar 3.15
Kegiatan Penanaman Pohon di Kabupaten Temanggung

3. Sasaran 3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Merata Guna Mendukung Aktivitas Ekonomi Dan Layanan Publik

Sasaran 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Merata Guna Mendukung Aktivitas Ekonomi dan Layanan Publik. Dalam mewujudkan sasaran didukung dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran:

1. Persentase Infrastruktur Kewilayahan Yang Berdaya Saing;
2. Indeks Integritas Nasional; dan
3. Indeks Reformasi Birokrasi

Adapun hasil Pengukuran Kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Merata Guna Mendukung Aktivitas Ekonomi dan Layanan Publik pada Tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.33
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Merata Guna Mendukung Aktivitas Ekonomi dan Layanan Publik									
No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			RPJMD 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2030	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8	9	$10 = \frac{9}{8} \times 100$
1	Persentase Infrastruktur Kewilayahannya Yang Berdaya Saing	Persen	69,67	71,62	70,72	98,74	80,66	70,72	87,68
2	Indeks Integritas Nasional	Angka	n.a	77,72	77,93	100	81,80	77,93	95,27
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,13	86,13	87,27	100	86,63	87,27	100
Rata-rata Capaian Kinerja				99,58					94,32

Sumber Data : Perangkat Daerah, data diolah Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat diketahui untuk Sasaran 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 didukung dengan tiga Indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 99,58%, masuk dalam kategori skala penilaian sangat tinggi. Sedangkan capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target kinerja akhir Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 rata-rata tercapai 94,32%.

Secara rinci capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Merata Guna Mendukung Aktivitas Ekonomi dan Layanan Publik sebagai berikut:

a. Persentase Infrastruktur Kewilayahannya Yang Berdaya Saing

Persentase infrastruktur kewilayahannya yang berdaya saing adalah ukuran atau indikator yang menunjukkan sejauh mana infrastruktur di suatu wilayah memenuhi standar kualitas, efisiensi, konektivitas, dan kemampuan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan wilayah lain. Indikator ini biasanya dihitung dalam bentuk persentase berdasarkan jumlah infrastruktur yang memenuhi kriteria berdaya

saing dibandingkan total infrastruktur yang ada di wilayah tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana infrastruktur dasar di wilayah Kabupaten Temanggung berfungsi, berkualitas, dan memenuhi standar sebagai pendukung daya saing wilayah. Komponen Infrastruktur Berdaya Saing dapat meliputi :

- a. Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum;
- b. Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas;
- c. Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan;
- e. Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi.

Rumus Perhitungan Indikator Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing yaitu nilai rata-rata komponen infrastruktur berdaya saing (Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum, persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas, persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman, persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan, persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi).

Tabel 3.34
Persentase Infrastruktur Wilayah Berdaya Saing Tahun 2025

No	Komponen Infrastruktur Wilayah	Persentase	OPD
1	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	61%	DPUPR
2	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	57,56%	DPUPR
3	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	71,11%	DPRKPLH
4	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	73,12%	DINHUB
5	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	90,81%	DINHUB
	Total rata-rata	70,72%	

Sumber: DPUPR, Tahun 2025

Pada Tahun 2025, capaian indikator Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing menunjukkan peningkatan kualitas dan fungsi infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Peningkatan ini tercermin dari bertambahnya jumlah infrastruktur yang berada dalam kondisi baik dibandingkan total infrastruktur yang tersedia, meliputi jaringan jalan, jaringan irigasi, drainase, serta sarana pendukung layanan publik.

Pencapaian indikator ini didorong oleh pelaksanaan pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas infrastruktur, dukungan pendanaan pembangunan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur di wilayah masing-masing. Selain itu, koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan turut memperkuat capaian kinerja.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi tingkat capaian, antara lain kondisi beberapa infrastruktur yang memerlukan rehabilitasi skala besar, keterbatasan alokasi anggaran untuk pemeliharaan, serta faktor eksternal seperti bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada beberapa jaringan infrastruktur. Meskipun demikian, pemerintah daerah terus melakukan langkah strategis melalui monitoring dan evaluasi berkala, penguatan kolaborasi dengan pemerintah desa, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendanaan untuk menjaga keberlanjutan kualitas infrastruktur.

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kewilayahan telah berada pada arah yang tepat dan mendukung peningkatan daya saing daerah, terutama dalam mendorong aksesibilitas, konektivitas, dan produktivitas masyarakat. Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan serta perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Infrastruktur dasar yang berkelanjutan mencakup penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum, penyelenggaraan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, aspek aksesibilitas dan konektivitas wilayah didukung melalui penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan serta pelayanan transportasi

yang memenuhi standar dan saling terkoneksi untuk mendorong pemerataan perkembangan wilayah di Kabupaten Temanggung.

Pada tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 71,62%, dengan realisasi mencapai 70,72%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 98,75%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan berbagai komponen infrastruktur kewilayahan telah berjalan cukup baik dalam mendukung pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dasar, serta penguatan konektivitas antarwilayah, meskipun masih terdapat sedikit selisih terhadap target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, kinerja ini mencerminkan upaya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung yang semakin mendukung peningkatan daya saing wilayah.

Tabel 3.35
 Persentase Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Infrastruktur Kewilayahan Yang Berdaya Saing		NA	NA	NA	NA	69,67
Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan						
1	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	NA	NA	NA	NA	62,64
2	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	44,25	44,27	44,28	44,78	53,43
3	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	NA	NA	NA	NA	70,83
Perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah						
4	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	62,57	65,17	66,76	67,31	72,24
5	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	69,89	74,21	79,34	83,91	89,72

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029

Capaian indikator persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing menunjukkan adanya peningkatan kinerja pembangunan infrastruktur kewilayahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Indikator ini merupakan indikator komposit yang mulai digunakan pada tahun 2024 dan dibentuk dari beberapa komponen penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan serta aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Pada tahun 2024 capaian indikator ini tercatat sebesar 69,67%, yang menggambarkan kondisi infrastruktur wilayah yang semakin baik dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pada aspek penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, terdapat tiga indikator pembentuk, yaitu penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum, penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas, serta penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Indikator penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum memiliki capaian 62,64% pada tahun 2024 dan terbentuk dari beberapa komponen kinerja infrastruktur yang meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, dan bina konstruksi. Sementara itu, indikator penataan ruang berkualitas menunjukkan tren peningkatan dari 44,25% pada tahun 2020 menjadi 53,43% pada tahun 2024, yang menunjukkan semakin meningkatnya kualitas pengendalian dan pemanfaatan ruang. Adapun indikator infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman pada tahun 2024 mencapai 70,83%.

Pada aspek aksesibilitas dan konektivitas wilayah, dua indikator juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan meningkat dari 62,57% pada tahun 2020 menjadi 72,24% pada tahun 2024, sedangkan pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi meningkat dari 69,89% menjadi 89,72% pada periode yang sama. Secara keseluruhan, peningkatan capaian pada masing-masing komponen tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan dan daya saing wilayah.

Capaian kinerja indikator Persentase Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target dalam RPJMD tahun 2025–2029 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Target akhir RPJMD pada tahun 2030 ditetapkan sebesar 80,66, sedangkan realisasi pada tahun 2025 telah mencapai 70,72, sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 mencapai 87,68% terhadap target akhir RPJMD.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pertama periode Renstra, kinerja pembangunan infrastruktur kewilayahan telah berada pada jalur yang cukup positif menuju target jangka menengah. Meskipun masih terdapat selisih terhadap target akhir, realisasi yang telah mencapai lebih dari delapan puluh persen dari target RPJMD menunjukkan bahwa upaya penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan serta peningkatan

aksesibilitas dan konektivitas wilayah di Kabupaten Temanggung telah berjalan dengan baik dan perlu terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Capaian kinerja indikator Persentase Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing pada tahun 2025 yang mencapai 70,72 menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan wilayah, meningkatnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam penyediaan infrastruktur dasar, serta optimalisasi pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya peningkatan kualitas penataan ruang serta pengembangan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan dan pelayanan transportasi juga turut mendukung peningkatan daya saing wilayah.



Gambar 3.16
Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penyusunan RDTR Kota Parakan

Di sisi lain, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja, seperti dinamika pemanfaatan ruang yang berkembang cukup cepat, kebutuhan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur di beberapa wilayah, serta proses pengendalian pemanfaatan ruang dan integrasi antar sektor yang masih perlu diperkuat. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai langkah telah dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur kewilayahan,

peningkatan kualitas pemeliharaan infrastruktur agar tetap berfungsi optimal, serta pemanfaatan sistem informasi dan data infrastruktur sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan wilayah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan



Gambar 3.17
Peningkatan kualitas infrastruktur

b. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Penilaian Integritas. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal,

dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan omprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/ PD tertentu.

Perhitungan Indeks Integritas juga memasukkan faktor koreksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan Indeks Integritas. Faktor koreksi berperan menyeimbangkan indeks yang dihasilkan dari penilaian internal, eksternal, dan eksper/ahli sesuai dengan kondisi riil integritas K/L/PD. Faktor koreksi selanjutnya dijadikan pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder, jumlah kasus dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian pengarahannya yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi pelaksanaan survei.

Penentuan bobot pada masing-masing perspektif, dimensi, hingga variabel dalam survei dihitung menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) yang ditetapkan pada 2021. Metode PCA digunakan sekaligus untuk melihat pengelompokan variabel yang ditanyakan ke dalam satu dimensi yang sama. Pembobotan menggunakan PCA memiliki keunggulan, yaitu bobot yang terbentuk berasal dari distribusi data itu sendiri dengan melakukan perhitungan korelasi antar-variabel. PCA lebih tepat digunakan untuk menganalisis multivariat yang komprehensif, karena dapat mengukur seberapa penting sebuah variabel dan dimensi relatif terhadap variabel dan dimensi lainnya.

Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menjumlahkan perkalian bobot dengan masing-masing penilaian pada tiga dimensi utama, kemudian hasilnya dikurangi dengan perkalian bobot dari faktor koreksi. Integritas berkisar dari skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati 100 menunjukkan suatu lembaga makin berintegritas.

Tabel 3.36
Klasifikasi Skor hasil Hasil Survei Penilaian Integritas

No	Skor	Kategori
1	0-72,9	Rentan (merah)
2	73-77,9	Waspada (kuning)
3	78-100	Terjaga (hijau)

Sumber: Jaga.id

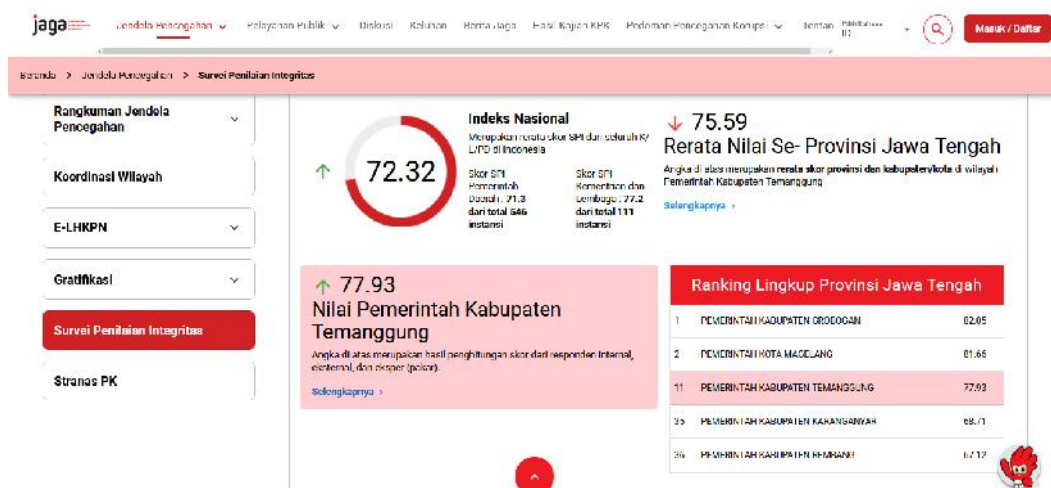
$$0.305 X_1 + 0.328 X_2 + 0.367 X_3 - (X_4 + X_5)$$

dimana:

- X_1 : Indeks Penilaian Internal
- X_2 : Indeks Penilaian Eksternal
- X_3 : Indeks Penilaian Ekspers
- X_4 : Prevalensi Korupsi
- X_5 : Integritas Pelaksanaan SPI

Sumber : Jaga.id

Gambar 3.18
Rumus Perhitungan Indeks Integritas Tahun 2025



Sumber : Jaga.id

Gambar 3.19
Hasil Penilaian Survey Penilaian Integritas
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Pada Tahun 2025 KPK Republik Indonesia telah melaksanakan Survei Penilaian Integritas pada Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan hasil skor 77,93, masuk pada kategori waspada, menempatkan Pemerintah Kabupaten Temanggung Peringkat ke 3 se Jawa Tengah setelah Pemkab Grobogan dan Pemkot Magelang. Secara nasional melebihi 5,61 diatas nilai Indeks Nasional (72,32) dan lebih besar 2,34 dibandingkan dengan nilai rata-rata se Provinsi Jawa Tengah.

Capaian Kinerja Indikator Indeks Integritas Nasional pada Tahun 2025 mencapai angka 77,93, melebihi 0,21 point dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2025 (77,72). Dibandingkan dengan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 mencapai 95,28% dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan (81,79).

Tabel 3.37
Realisasi Kinerja Indeks Integritas Nasional
Tahun 2025

Varibel	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi	78,71	77,37	76,08	76,91	77,93

Sumber : Jaga.id

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai Indeks Integritas Nasional pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 mengalami penurunan, namun demikian pada Tahun 2024 mengalami sedikit kenaikan 0, 97 dari tahun sebelumnya 76,08.

Pada Tahun 2025 nilai Indeks Integritas Tahun 2025 mencapai 77,93 naik sebanyak 1.02 pont dari Tahun 2024. Faktor penghambat tercapainya indikator Indeks Integritas Nasional:

1. Responden dipilih secara acak oleh KPK
2. Instrumen kuisioner yang diberikan kepada Responden terlalu panjang pertanyaannya dan jumlah terlalu banyak sehingga Responden enggan untuk menyelesaikan
3. banyak dijumpai link palsu yang membuat Responden ragu-ragu untuk mengisi

4. Masih dijumpai oknum petugas pelayanan yang melakukan tindakan korupsi

Faktor Pendorong tercapainya indikator Indeks Integritas Nasional:

1. Telah memiliki regulasi terkait pengendalian korupsi
2. Telah memiliki Sekretariat Antikorupsi dan Penyuluh Antikorupsi
3. Telah melaksanakan sosialisasi Antikorupsi

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan Indeks Integritas Nasional :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparansi serta peningkatan akuntabilitas yang lebih baik sebagai upaya memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Pimpinan organisasi untuk memimpin perbaikan nyata, menjadi teladan perubahan, dan mendukung konsistensi pencapaian tujuan organisasi;
3. Secara massive melaksanakan sosialisasi antikorupsi kepada legislatif, eksekutif dan masyarakat

Penyampaian Materi Antikorupsi pada Latsar CPNS dan PPPK



Pemkab Temanggung Tandatangani MoU Terkait PTUN dengan Kejaksaan Negeri





Gambar 3.20
Kegiatan pendukung Indeks Integritas Nasional

c. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Panduan bagi instansi dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan Reformasi Birokrasi seperti yang tercantum pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi tahun 2025 yaitu : a) Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Emas Tahun 2045; b) Agenda Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2025-2029; dan c) Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

Arah kebijakan RB Nasional Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan memperhatikan tantangan dan pembelajaran pelaksanaan RB sebelumnya, yaitu: Birokrasi sebagai mesin penggerak pembangunan; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan; Berdampak pada capaian

target pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global; Penguatan Sumber Daya Manusia ASN sebagai Modal Utama; Mengatasi Tantangan Struktural: Netralitas, Patronase, dan Fragmentasi.

Tujuan RB dalam periode 2025–2029 adalah terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (human-based) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan, melalui penerapan digital *governance* yang berkualitas

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*). Evaluasi Eksternal RB melibatkan peran Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan /atau pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
2. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau
3. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen, Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.38
Penilaian Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	A-		Memuaskan dengan catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
4	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
6	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
7	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
8.	D	0 - 30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Capaian kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2025 tercapai 100% dengan terealisasi 87,27 dari target yang ditetapkan (86,13).

Dibandingkan dengan sedangkan capaian kinerja Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 telah tercapai 100% dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2029 (86,33).

Tabel 3.39
 Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung Tahun 2021 – 2025

No.	TAHUN	NILAI
1	2021	63,42
2	2022	64,61
3	2023	69,05
4	2024	86,13
5	2025	87,27

Sumber : Bagian Organisasi, 2026

Nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 87,27. Jika dibandingkan dengan tahun Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.40
 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2024-2025

No.	Komponen	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025
1	RB General	74,79	75,51
2	RB Tematik	11,34	11,76
Index RB		86,13	87,27
Kategori		A-	A-

Sumber : Kementerian PANRB, 2026

Dari tabel diatas hasil evaluasi RB tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,14 dari 86,13 di Tahun 2024 menjadi 87,27. Nilai ini lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 94,06. Dari hasil ini dua komponen RB General dan RB tematik keduanya mengalami kenaikan poin. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya

saing karena sebagian besar agenda reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ada sebagian kecil yaitu pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum dapat dilaksanakan dengan optimal, dan juga apa yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata pada pembangunan. Hal ini kedepan akan menjadi prioritas utama sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dapat berpengaruh dan memiliki dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang mendorong pencapaian nilai ini adalah:

1) RB General:

- a. Pelaksanaan RB yang dilakukan sudah sesuai Road Map yang ditetapkan;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan berbagai macam perbaikan seperti sarana prasarana, peningkatan kompetensi SDM dengan pelatihan pelayanan prima, reviu standar pelayanan, pelaksanaan Forum konsultasi publik terkait pelayanan, melaksanakan pembinaan pelayanan publik dan melaksanakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
- c. Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP sebagai langkah perbaikan ketatalaksanaan;
- d. Perbaikan tata kelola manajemen data,dan layanan digital;
- e. Penyusunan kebijakan daerah terkait arsitektur SPBE;
- f. Pelaksanaan tindak lanjut LHE AKIP dari KemenpanRB
- g. Peyusunan RTP termasuk pencantuman risiko operasional dalam kerangka logis penyusunan RKA pada RTP (Rencana Tindak Pengendalian) pemda;
- h. Bimbingan teknis pada pejabat administrator dan pengawas tentang peyusunan Risiko sesuai kategori risiko sera evaluasi terhadappenyelenggaraan manajemen risiko;
- i. Mengkatkan kualitas layanan aduan dari masyaraka dan penyusunan rencana aksi tindak lanjut aduan masyarakat;
- j. Penerapan manajemen talenta;
- k. Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berkinerja tinggi untuk meningkatkan tanggung jawab profesional;

2) RB Tematik

1. Tema Kemiskinan :

- a. Melaksanakan Bimbingan teknis pendamping Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE (Kelompok usaha bersama);
- b. Penyaluran penerima JPS (Jaringan Pengaman Sosial), serta melakukan assesmen dan verifikasi data penerima sasaran;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis untuk petugas pendamping PPKH dan TKSK terkait program JKK dan JKM (penanggulangan kemiskinan melalui program pendidikan dan kesehatan).
- d. Pembangunan gedung UMKM untuk menampung produk lokal;
- e. Penyelesaian pembangunan dan pelaporan pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- f. Membentuk Tim pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat kabupaten dan monev program JKN;
- g. Pelaksanaan perbaikan ruas jalan di daerah kantong kemiskinan;
- h. Integrasi layanan RSUD dengan program pengentasan kemiskinan daerah, kemitraan dengan Dinsos dan Dinkes.

2. Tema Investasi:

- a. Membuat MoU dengan wartawan dalam rangka promosi/penyebarluasan informasi terkait penanaman modal;
- b. Melaksanakan pendampingan kepada pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan LKPM;
- c. Melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha antara perusahaan dengan UMKM;
- d. Pendampingan dan fasilitasi jemput bola OSS;
- e. Melaksanakan pelayanan MPP digital.

3. Tema Peningkatan kualitas layanan dan akses layanan kesehatan

- a. Penyelesaian pekerja, BAST pencairan dana tahap 3;
- b. Pembinaan dan pemantauan pengelola SPAM pedesaan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan RME pada setiap fasyankes melalui medsos;
- d. Monev prevelensi wasting balita;
- e. Pendampingan dan pembinaan pra dan pasca akreditasi puskesmas;

- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan akses layanan masyarakat melalui integrasi layanan primer dengan sosialisasi ke masyarakat dan advokasi serta koordinasi dengan pemerintah desa, lintas sektor, dan stake holder terkait untuk pemenuhan sarpras pendukung layanan kesehatan ditingkat desa;
 - g. Peningkatan SDM IT bidang kesehatan;
 - h. Melakukan KIE kontrasepsi bagi PUS muda;
 - i. Pemantauan dan pendampingan keluarga beresiko Stunting (KRS).
4. Tema Hilirisasi
- a. Sosialisasi dan koordinasi dengan pihak lingkungan calon APHT (Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau);
 - b. Membuat MoU dengan pabrik rokok untuk memberikan program pelatihan kepada IKM rokok;
 - c. Bantuan Asin perajang tembakau;
 - d. Koordinasi lintas sektor terkait dengan harga, mutu produk, sistem perdagangan dan pengemasan produk yang low cost.
5. Tema Ketahanan Pangan
- a. Koordinasi lintas sektoral dan terintegrasi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. Pemberian bantuan bibit, obat-obatan, bibit ternak, dan sarana budidaya perikanan;
 - c. Pembangunan dan rehabilitasi sumber-sumber air;
 - d. Pembangunan dan rehabilitasi embung pertanian;
 - e. Pelaksanaan gerakan pengendalian hama;
 - f. Pembangunan/rehabilitasi lahan usaha tani;
 - g. Stabilitas harga pangan melalui gerakan pangan murah.
6. Tema Peningkatan Akses Kualitas dan Mutu Pendidikan
- a. Pembinaan GTK SD dengan monitoring pada 20 korwilcam;
 - b. Menyelenggarakan bimbingan teknis penguatan karakter bagi guru PPPK SD;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi Akreditasi PKBM;
 - d. Pengelolaan ULD (unit layanan Disabilitas);
 - e. Menyalurkan beasiswa miskin untuk peserta didik dari keluarga miskin dan peserta didik inklusi SD;

- f. Menyalurkan beasiswa miskin untuk peserta didik dari keluarga miskin SMP;

Sedangkan faktor penghambatnya adalah :

1. Belum adanya *Roadmap* RB, masih menunggu *Roadmap* RB Nasional.
2. Masih perlu peningkatan efektifitas koordinasi untuk menyelaraskan agenda-agenda RB antar perangkat daerah.
3. Komitmen dan kesadaran pimpinan perangkat daerah terhadap pelaksanaan RB yang masih perlu ditingkatkan.
4. Belum terinternalisasi budaya kerja melayani dengan baik dan menyeluruh di seluruh tataran unit kerja dan individu pegawai.
5. Menurunnya nominal dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, yang membuat daerah harus melakukan efisiensi-efisiensi pada banyak kegiatan, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan Reformasi Birokrasi, baik general maupun tematik sehingga tidak bisa maksimal sesuai target.

Upaya dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja yaitu melakukan evaluasi setiap triwulan, peningkatan koordinasi, sosialisasi dan penyadaran terhadap ASN bahwa ASN adalah pelayan publik, meningkatkan kordinasi dengan perangkat daerah terkait, meningkatkan kualitas rencana aksi yang bisa berdampak, dan meningkatkan komitmen semua pimpinan unit teriat dengan pelaksanaan RB berdampak.

Temanggung Raih Penghargaan Nasional
atas Perbaikan Akses Pendidikan



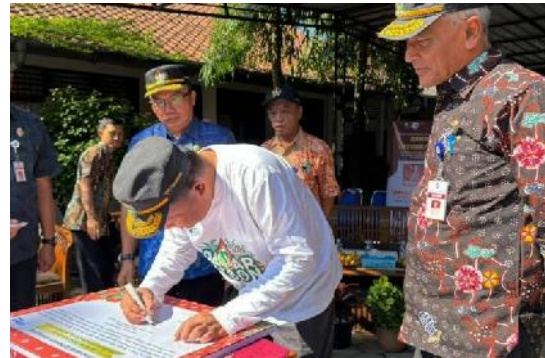
Wabup Nadia Muna Dorong Masyarakat
Optimalkan Keberadaan Layanan MPP



Penyerahan SK PPPK untuk pengelolaan
SDM Aparatur



Kegiatan Zona integritas



Gambar 3.21
Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Sasaran 3 “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas Antar Wilayah yang Merata Guna Mendukung Aktivitas Ekonomi dan Layanan Publik” menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,58% dengan kategori sangat tinggi. Sementara itu, capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD Tahun 2025–2029 telah mencapai 94,32%, yang menandakan sebagian besar target jangka menengah telah tercapai pada awal periode perencanaan.

Pada sasaran ini pelaksanaan kegiatan didukung oleh 34 (tiga puluh empat) program yang dilaksanakan oleh 19 (Sembilan belas) perangkat daerah, Sinergi antarperangkat daerah tersebut mencerminkan upaya terpadu Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran guna mendukung pencapaian Sasaran 3 secara efektif dan berkelanjutan. Tabel berikut menyajikan gambaran alokasi anggaran serta capaian kinerja program yang mendukung pencapaian Sasaran 3.

Tabel 3.41
Anggaran dan Capaian Kinerja Program Yang Mendukung Pencapaian Sasaran 3

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.998.828.500,00	1.690.208.503,00	84,56
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	306.169.700,00	301.840.103,00	98,59
3	Program Pemerintahan dan	27.839.335.483,00	26.846.423.909,00	96,43

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	(%)
	Kesejahteraan Rakyat			
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.162.409.080,00	3.994.150.215,00	95,96
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	364.480.800,00	351.097.310,00	96,33
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	495.801.540,00	479.647.027,00	96,74
7	Program Penyelenggaraan Jalan	29.544.252.700,00	28.230.003.494,00	95,55
8	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar Pertanian (Jut Dankereta Gantung)	495.801.540,00	479.647.027,00	96,74
9	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.762.018.590,00	17.094.653.261,00	96,24
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	109.713.000,00	108.717.198,00	99,09
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.655.398.000,00	6.595.234.942,00	99,10
12	Program Pengembangan Perumahan	306.119.500,00	265.650.448,00	86,78
13	Program Promosi Penanaman Modal	76.076.300,00	75.944.422,00	99,83
14	Program Perekonomian dan Pembangunan	855.132.136,00	617.276.113,00	72,18
15	Program Hubungan Industrial	110.289.700,00	105.391.927,00	95,56
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	30.287.851.815,00	28.707.383.088,00	94,78
17	Program Kepegawaian Daerah	633.479.100,00	278.115.503,00	43,90
18	Program Perencanaan,P Engendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	827.177.000,00	806.418.026,00	97,49
19	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan P Embangunan Daerah	510.479.000,00	448.969.010,00	87,95
20	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	299.082.000,00	264.582.643,00	88,46
21	Program Riset Dan Inovasi			
22	Program Pendaftaran Penduduk	679.262.800,00	638.173.345,00	93,95
23	Program Pencatatan Sipil	5.408.500,00	5.135.011,00	94,94
24	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	184.032.500,00	170.558.106,00	92,68
25	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.084.250.000,00	660.810.002,00	13,00
26	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.615.750.000,00	528.920.798,00	14,63
27	Pogram Pengelolaan Pendapatan	704.647.930,00	323.647.686,00	45,93

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	(%)
	Daerah			
28	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	27.839.335.483,00	26.846.423.909,00	96,43
29	Program Perekonomian dan Pembangunan	855.132.136,00	617.276.113,00	72,18
30	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	15.126.999.808,00	11.024.291.632,00	72,88
31	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.979.224.753,00	1.971.622.782,00	99,62
32	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.790.196.240,00	3.656.559.188,00	96,47
33	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	173.102.740,00	164.875.400,00	95,25
34	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.129.479.500,00	1.128.530.765,00	99,92
		184.310.916.334,00	164.998.531.879,00	89,52

Untuk mencapai target kinerja Sasaran 3 Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025, didukung anggaran sebesar Rp184.310.926.334,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.164.998.531.879,00 atau 89,52%. Dengan demikian, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.19.312.382.455,00 atau 10,48%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang ditetapkan.

Terkait dengan efisiensi sumber daya, terjadi efisiensi sebesar 10,15%, yang diperoleh dari selisih antara capaian kinerja Sasaran 3 sebesar 99,67% dengan realisasi anggaran sebesar 89,52%. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara sangat optimal, di mana capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan.

Dengan mempertimbangkan tingginya capaian kinerja serta adanya efisiensi anggaran dan sumber daya, maka pelaksanaan Sasaran 3 Tahun 2025 dapat dinilai sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah berorientasi pada hasil (outcome oriented),

didukung oleh sinergi antarperangkat daerah, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel.

4. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Peningkatan Kesenjangan Akses dan Partisipasi Seluruh Masyarakat dalam seluruh aspek Pembangunan

Pengukuran sasaran strategis 4 Terwujudnya Peningkatan Kesenjangan Akses dan Partisipasi Seluruh Masyarakat dalam seluruh aspek Pembangunan hasil sebesar 100% dari target 100% dengan kategori **“Sangat Tinggi”** sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.42
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4

SASARAN STRATEGIS 4: Terwujudnya Peningkatan Kesenjangan Akses dan Partisipasi Seluruh Masyarakat dalam seluruh aspek Pembangunan									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			RPJMD 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2030	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indeks Gini	Angka	0.383	0,382-0,370	0.356	100	0,345-0,340	0.356	96,91
2	Indeks Pembangunan Gender	Angka	96,27	96,78	96,27	99,47	96,27	98,50	98,19
Capaian Kinerja Sasaran						99,735			97,55

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2025

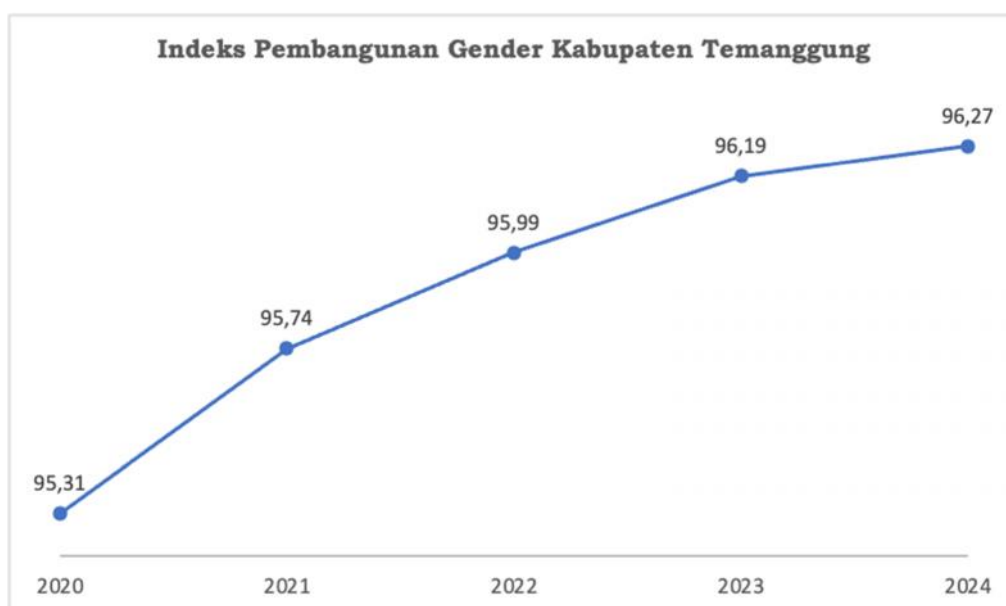
Realisasi indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada periode Tahun 2024–2025 menunjukkan peningkatan dan telah mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun realisasi Tahun 2025 masih menggunakan capaian Tahun 2024, karena pada saat dokumen ini disusun, data resmi Indeks Pembangunan Gender Tahun 2025 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

Sementara itu, Indeks Gini Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2025 terus mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Temanggung semakin berkurang.

a. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. IPG mengukur perbedaan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG mengukur pembangunan manusia dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, pendapatan. IPG dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan gender. IPG yang <100 menandakan adanya ketidakseimbangan gender dalam pembangunan manusia.

Nilai IPG Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 adalah 96,19 mengalami kenaikan sebesar 0,2 dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 95,99. Sedangkan pada tahun 2024 capaian IPG Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan menjadi 96,27.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.

Gambar 3.22

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tabel 3.43

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender

Tahun		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2023	Indeks Gini	Angka		95,71	100
2024		Angka	95,75	96,27	100
2025		Angka	96,78	96,27	100

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Temanggung terus meningkat karena dipengaruhi oleh meningkatnya akses pendidikan untuk

perempuan, adanya pemberdayaan ekonomi yang mendukung perempuan berperan lebih aktif dalam ekonomi keluarga dan masyarakat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Meskipun demikian, terbatasnya peran perempuan di sektor-sektor tertentu dan pola pikir tradisional yang membatasi peran perempuan menjadi permasalahan dalam Pembangunan gender.



Gambar 3.23
Kegiatan Peningkatan Pembangunan Gender

b. Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menggambarkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sasaran pembangunan tidak hanya pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin banyak masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama karena ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, oleh sebab itu Pemerintah Daerah seharusnya mendistribusikan pendapatan ke seluruh masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan

masyarakat sekitarnya. Ketimpangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui indikator indeks gini atau rasio gini. Indeks Gini atau Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Nilai rasio gini berkisar antara 0-1, dimana semakin tinggi nilai rasio gini menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Perubahan Rasio Gini juga merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk.

Tabel 3.44
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender

Tahun		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2023	Indeks Gini	Angka	0,363	0.359	98,89
2024		Angka	0,357	0.383	100
2025		Angka	0.382 - 0.370	0.356	100

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, Tahun 2025

Tabel 3.45
Perbandingan Rasio Gini pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dengan Capaian Jawa Tengah dan Nasional Tahun Sebelumnya

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Magelang	0,452	0,427	0,419	0,46	0,375
Kabupaten Magelang	0,384	0,363	0,358	0,33	0,330
Kabupaten Temanggung	0,374	0,370	0,359	0,38	0,356
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	0,403	0,387	0,379	0,39	0,354
JAWA TENGAH	0,372	0,374	0,369	0,37	0,359
NASIONAL	0,381	0,381	0,388	0,38	0,375

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Perkembangan indeks gini Kabupaten Temanggung Tahun 2021 hingga Tahun 2025 fluktuatif. Nilai indeks gini yang terus menurun mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan dalam periode tersebut, namun mengalami penurunan positif di Tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kecenderungan ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Meskipun angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata wilayah Gelangmanggung, kenaikan ini menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat menikmati hasil pembangunan secara merata. Faktor-faktor seperti akses yang tidak merata terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang ekonomi lainnya dapat menjadi penyebab utama meningkatnya ketimpangan ini.

Indeks gini Kabupaten Temanggung Tahun 2025 lebih tinggi daripada Jawa Tengah hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten temanggung berada di atas rata-rata ketimpangan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan sama dengan nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya inklusif, sehingga sebagian besar manfaat dari pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Indeks gini Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 0,356 yang menunjukaarah positif pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.46

Perbandingan Rasio Perubahan Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Kabupaten Temanggung				Nasional			
	Gini Ratio	Perubahan	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan	Gini Ratio	Perubahan	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan
2021	0,374	-0,008	3,34	5,47	0,381	-0,004	3,7	5,77
2022	0,37	-0,004	5,2	1,86	0,381	0	5,31	1,61
2023	0,359	-0,013	5	-0,2	0,388	0,007	5,04	-0,27
2024	0,383	0,024	5,04	0,03	0,381	-0,007	5,03	-0,02
2025	0,356	-0,027	5,04	0	0,375	-0,006	5,03	0

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Ketimpangan pendapatan memiliki kaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang digambarkan menggunakan Rasio Gini, dapat diukur dengan pendapatan per kapita atau pengeluaran per kapita yang mana kedua hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian penduduk di suatu wilayah. Dilihat dari tabel di atas, peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung berkorelasi positif terhadap penurunan ketimpangan (Rasio Gini).

Tabel 3.47

Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2021	0,374	-0,008	0,403	-0,008	0,381	-0,004
2022	0,37	-0,004	0,387	-0,004	0,381	0
2023	0,359	-0,011	0,379	-0,011	0,388	0,007

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2024	0,383	0,024	0,393	0,014	0,381	-0,007
2025	0,356	-0,027	0,354	-0,039	0,375	-0,006

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024, Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Rasio Gini Kabupaten Temanggung mencatatkan nilai sebesar 0,356. Setelah tahun 2020 atau pasca pandemi Covid-19, nilai Rasio Gini mengalami penurunan seiring dengan kondisi perekonomian yang berangsur pulih sehingga pemerataan pendapatan juga dapat meningkat. Jika dibandingkan dengan rata-rata Purwomanggung dan nasional, Rasio Gini Kabupaten Temanggung memiliki nilai yang lebih kecil meskipun berada pada kategori yang sama yaitu kategori ketimpangan sedang. Sasaran ini didukung oleh program di Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.48

Program yang Mendukung Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kesetaraan Akses dan Partisiapasi Seluruh Masyarakat dalam seluruh aspek Pembangunan

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Program pendukung Indeks Pembangunan Gender			
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	25.100.800,00	23.180.350,00	92,35
2	Program Perlindungan Perempuan	38.394.370,00	20.235.350,00	52,70
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	18.959.200,00	17.833.250,00	94,06
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	40.335.500,00	39.139.500,00	97,03
5	Program Perlindungan Khusus Anak	88.369.400,00	73.931.100,00	83,66
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.470.149.000,00	5.716.323.034,00	76,52
7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.249.053.450,00	3.985.386.230,00	93,79
	Program Perangkat Daerah yang Mendukung Indeks Gini			
8	Program Pemberdayaan Sosial	137.671.600,00	137.128.800,00	99,61
9	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	13.602.350,00	13.339.850,00	98,07
10	Program Rehabilitasi Sosial	682.219.430,00	676.553.732,00	99,17
11	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	22.375.621.060,00	21.526.634.834,00	96,21
12	Program Penanganan Bencana	236.374.200,00	234.027.700,00	99,01
13	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	781.702.700,00	743.249.150,00	95,08
	JUMLAH	36.157.533.060,00	33.206.962.880,00	91,83

Sumber : BPKPAD Tahun 2025, data diolah

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender dan indeks Gini pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar realisasi dari program telah terlaksana dengan baik, meskipun realisasi anggaran tidak mencapai 100%.

Belum optimalnya realisasi program pendukung tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di tengah tahun anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan efisiensi tersebut berdampak pada penyesuaian kegiatan dan alokasi belanja, sehingga beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara penuh sesuai dengan rencana awal.

Meskipun demikian, capaian yang mendekati target tersebut tetap memberikan kontribusi positif terhadap upaya pengendalian ketimpangan pendapatan serta peningkatan kesetaraan gender di daerah. Ke depan, diperlukan perencanaan yang lebih adaptif dan penguatan prioritas program agar target kinerja dapat tercapai secara optimal meskipun terdapat dinamika kebijakan fiskal.

Untuk mencapai target kinerja Sasaran 4 Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025, didukung anggaran sebesar 36.157.533.060,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.206.962.880,00 atau 91,83%. Dengan demikian, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.950.570.180,00 atau 91,83%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang ditetapkan.

Terkait dengan efisiensi sumber daya, dari capaian kinerja yang mencapai 99,735 bila dibandingkan dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 91,830, maka pada sasaran ini terjadi efisiensi sebesar 7,905%. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara sangat optimal, di mana capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan.



Gambar 3.23
Kegiatan Penanganan Ketimpangan

5. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Peningkatan Rasa Aman Bagi Seluruh Masyarakat Dalam Menjalankan Kehidupan dan Aktivitasnya

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan sistem pengukuran yang dirancang untuk menilai tingkat harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada tingkat kabupaten/kota. Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dihitung menggunakan riset public dengan pendekatan Wellbeing Metodologi yang melibatkan survey, pengumpulan data dari berbagai daerah dan analisis mendalam oleh tim penyusun yang melibatkan pakar dan instansi terkait seperti Kementrian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menggunakan *system* online dengan minimal responden 1.250 di tiap kab/kota.

Berdasarkan hasil *Preliminary Study* Tim Peneliti IHaI, dan kemudian dilakukan *Expert Group Discussion* (EGD), Uji Publik dan Sosialisasi, ada 4 (empat) dimensi yang diukur dalam IHaI Tahun 2025, yaitu:

1) Dimensi Ekonomi;

- 2) Dimensi Sosial;
- 3) Dimensi Budaya; dan
- 4) Dimensi Keberagamaan.

IHal kemudian diuraikan menjadi 8 (delapan) variabel yang telah disesuaikan dengan substansi Asta Cita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran, yaitu:

- Variabel X1: Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan, dengan bobot 15%;
- Variabel X2 : Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, dengan bobot 15%;
- Variabel X3 : Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis, dengan bobot 11,5%;
- Variabel X4 : Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Komunitas Marginal, dengan bobot 11,5%;
- Variabel X5 : Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal, dengan bobot 11%;
- Variabel X6 : Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya, dengan bobot 11%;
- Variabel X7 : Moderasi Beragama dan Toleransi Antarumat Beragama, dengan bobot 12,5%;
- Variabel X8 : Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Sehari-hari, dengan bobot 12,5%.

Berikut ini adalah hasil pengukuran Indeks Harmoni yang dilaksanakan oleh Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Dengan responden berjumlah 1.284 orang yang tersebar di 289 desa kelurahan di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung. Dengan waktu pelaksanaan yang dimulai tanggal 3 Maret s.d 24 Maret 2025.

Tabel 3.49
Tabulasi Skor PPA; Skor Variabel Xi, Skor Dimensi Di dan Skor IHaI
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Skor IHaI 2025 : Direct Measurement																									
Riset Publik Indeks Harmoni (IHaI)2025 : Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah (Data 3-24 Maret 2025)																									
Dimensi Ekonomi						Dimensi Sosial						Dimensi Budaya						Dimensi Keberagamaan							
Variabel X1 (15,0%)						Variabel X3 (11,5%)						Variabel X5 (11,0%)						Variabel X7 (12,5%)						Variabel X8 (12,5%)	
No. Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	X7.1	X7.2	X7.3	X8.1	X8.2	8.3	
1	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	
2	5	5	6	6	5	6	6	7	8	6	6	6	7	5	7	4	5	5	8	6	7	7	8	8	
3	7	7	7	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
4	/	/	6	5	6	5	6	6	6	6	6	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	6	6	6	6	7	6	6	6	7	6	6	6	7	7	6	5	6	6	6	6	6	6	7	6	
6	4	1	5	5	3	1	5	3	1	4	4	2	3	3	3	2	2	3	2	3	4	2	3	4	
7	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	
8	6	6	6	6	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	6	6	6	6	6	6	6	6	
9	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	6	6	6	6	6	6	6	6	
10	6	7	7	7	3	7	8	7	8	7	8	7	7	7	8	7	7	7	7	7	6	8	7	7	
11	7	7	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
1271	5	9	7	4	5	5	6	7	6	7	6	7	8	6	7	7	6	6	7	7	8	7	7	7	
1272	6	7	6	6	5	6	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
1273	8	8	8	8	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	3	8	8	8	8	8	8	8	8	
1274	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	3	8	8	8	8	8	8	8	8	
1275	5	5	5	6	5	6	0	0	7	6	0	3	7	6	6	5	7	6	0	7	7	0	0	0	
1276	/	/	/	/	3	8	8	/	8	/	8	8	/	8	8	/	8	8	8	/	8	8	8	8	
1277	8	8	8	7	7	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	7	8	7	8	8	8	8	8	8	
1278	3	5	1	5	4	3	7	7	6	5	5	5	8	8	8	7	7	7	8	8	8	8	8	8	
1279	7	7	5	7	3	5	6	7	6	8	8	9	7	6	6	5	6	6	7	9	6	6	7	6	
1280	6	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
1281	7	9	7	7	3	5	7	7	5	7	8	7	8	9	9	3	7	8	8	8	8	8	8	8	
1282	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	5	8	7	8	3	7	8	8	8	8	7	7	
1283	7	8	8	7	3	6	7	8	9	7	7	7	8	8	7	7	7	7	8	8	8	7	7	7	
1284	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Skor PPA Var.	6,39	5,70	6,26	6,35	6,67	6,21	6,73	6,94	6,56	6,53	6,81	6,50	5,78	6,03	6,73	6,65	6,80	6,63	7,00	7,15	6,94	6,97	7,12	5,95	
Standby	1,00	1,58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Skor Var Xi	5,46					6,42					6,79					6,82					6,70				
Skor Dimensi L	6,44					5,71					6,76					6,70					7,04				
Skor IHaI 2025	5,72																				6,03				

Skor nilai Indeks Harmoni Kabupaten Temanggung adalah 6,72 yang masuk dalam kategori “baik”. Skor penilaian menggunakan skala 9 dengan pendekatan Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA), yang memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan di Kabupaten Temanggung. Data yang dikumpulkan mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu:

1. Data identifikasi responden, yang mencerminkan karakteristik demografi dan sosial masyarakat;
2. Data skor penilaian PPA, yang menunjukkan tingkat kepuasan serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan; dan
3. Data usul,saran, dan kritik (DUSK), yang menggambarkan aspirasi serta tantangan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil analisis tidak hanya menggambarkan kondisi objektif tetapi juga memperhitungkan sudut pandang serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

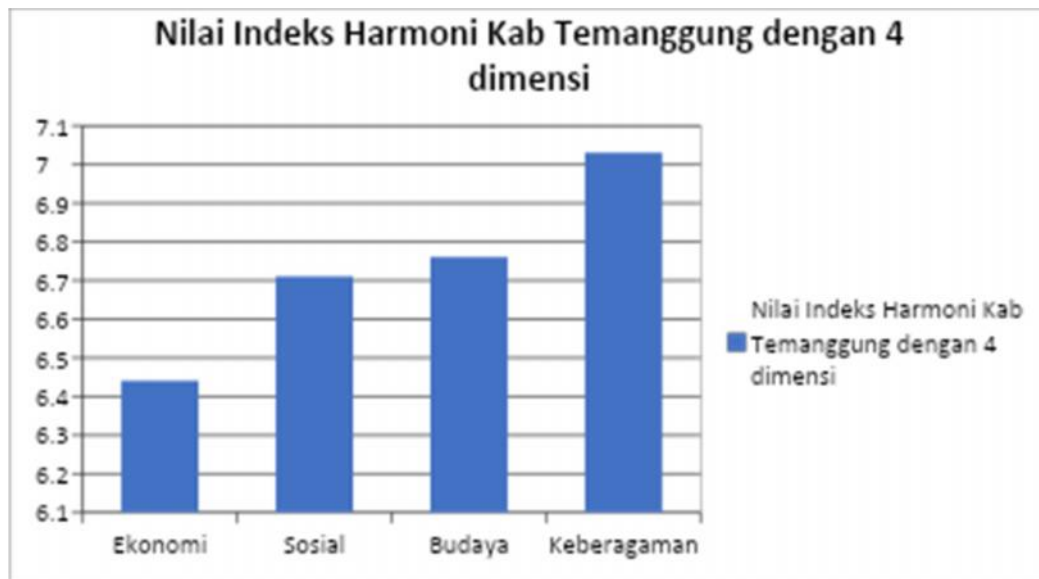
Tabel 3.50
Capaian Kinerja Sasaran 5

Sasaran 5 : Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			RPJMD 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2030	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100$	8	9	$10=9/8 \times 100$
1	Indeks Harmoni	Angka	N.a	6,72	6,72	100	7,07	6,72	95,05
Capaian Kinerja Sasaran						100%			

Indeks Harmoni merupakan indikator sasaran ke 5 dari sasaran “Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya”. Pengukuran Indeks Harmoni dilaksanakan pertama kali di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 dengan target penilaian Indeks Harmoni di tahun 2025 adalah 6,72. Dari data responden yang dikumpulkan sejumlah 1.284 orang, realisasi skor Indeks Harmoni di Kabupaten Temanggung adalah 6,72. Yang berarti capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 adalah 100% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Kemudian apabila realisasi pengukuran Indeks Harmoni tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2030) maka capaian kinerja sampai dengan 2025 telah tercapai 95,05%. Nilai Indeks Harmoni belum bisa dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, karena tahun 2025 merupakan tahun pertama pengukuran Indeks Harmoni di Kabupaten Temanggung.

Indeks Harmoni Indonesia pertama kali rilis pada tahun 2023 namun belum semua Kabupaten/Kota di Indonesia melakukan pengukuran. Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia tahun 2023 hanya dilaksanakan pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota sebagai pilot project (sumber: Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023).

Pengukuran Indeks Harmoni di Kabupaten Temanggung menggunakan 4 dimensi, Dimensi keberagaman menunjukkan nilai tertinggi yang disusul dengan nilai dimensi budaya, dimensi sosial dan dimensi ekonomi seperti yang tercantum pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.24
Nilai Indeks Harmoni Kabupaten Temanggung dengan 4 Dimensi

Unggulnya dimensi keberagaman sebagai unsur pembentuk indeks harmoni Kabupaten Temanggung tahun 2025 ini didorong oleh :

1. Kuatnya toleransi antar umat beragama di Kabupaten Temanggung. Keberagaman agama di Kabupaten Temanggung justru meningkatkan toleransi dalam masyarakat, menciptakan kerukunan antar umat beragama, dan saling menghargai perbedaan.
2. Adanya peran tokoh agama dan pemerintah dalam membangun solidaritas social di Kabupaten Temanggung contohnya dengan melaksanakan dialog lintas agama, penguatan nilai-nilai kebersamaan, serta kebijakan inklusif yang memastikan seluruh kelompok masyarakat merasa dihormati dan dilibatkan.
3. Berfungsinya mekanisme deteksi dini yang merupakan salah satu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik untuk mengantisipasi potensi konflik di masyarakat yang bisa timbul kapan saja.

Keterbatasan dalam pengukuran Indeks Harmoni yang dapat menghambat pencapaian nilai Indeks Harmoni dipengaruhi oleh :

1. **Faktor Sosial dan Budaya:** adanya keyakinan bahwa budaya atau kelompok sendiri lebih unggul dibandingkan yang lain, adanya kecenderungan kelompok tertentu (suku/agama/ras),

2. **Faktor Ekonomi** : Kesenjangan pendapatan, tingginya pengangguran, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah memicu ketidakadilan sosial dan konflik
3. Pengukuran indeks harmoni mengandalkan persepsi dan partisipasi masyarakat sehingga faktor ketidakpahaman akan banyaknya unsur pertanyaan menjadi salah satu ancaman validitas data.

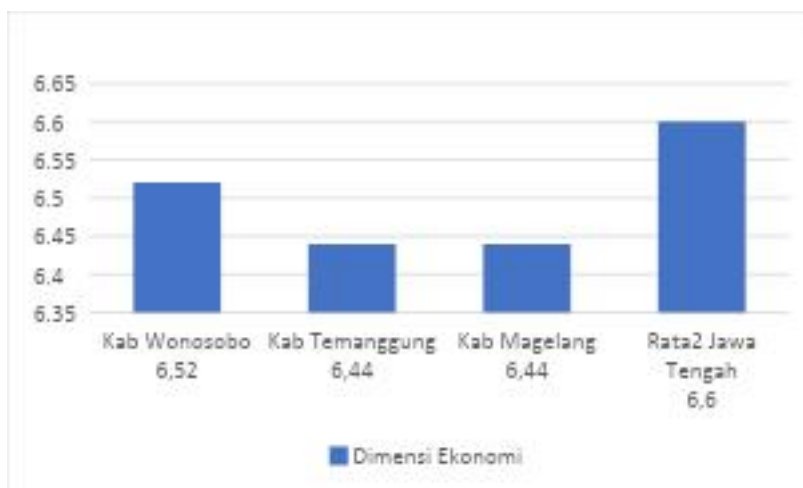
Upaya yang dapat dilakukan menjaga dan meningkatkan skor Indeks Harmoni :

1. Penguatan kohesi sosial, toleransi, dan partisipasi masyarakat dalam dimensi ekonomi, sosial, serta budaya. Langkah strategis meliputi dialog antaragama, gotong royong, edukasi literasi budaya, pemberdayaan masyarakat marginal, serta kebijakan pemerintah untuk menjaga kerukunan
2. Mewujudkan interaksi sosial melalui kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan guna harmonisasi seluruh elemen dalam masyarakat (melalui kegiatan bakti sosial, sarasehan, dialog keagamaan)
3. Penguatan peran FKUB sebagai sebuah wadah dialog, koordinasi, dan mediasi antarumat beragama untuk menjaga kerukunan, toleransi, serta harmoni di masyarakat.



Gambar 3.25
Perbandingan Nilai Indeks Harmoni Tahun 2025
Kabupaten Temanggung, Magelang, Wonosobo dan rata-rata Jawa Tengah

Skor Indeks Harmoni Kabupaten Temanggung tahun 2025 sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten Wonosobo, namun sudah lebih tinggi bila dibandingkan Kabupaten Magelang. Akan tetapi bila dibandingkan dengan skor rata-rata Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung masih tertinggal 0,09 poin. Berikut ini disajikan perbandingan 4 dimensi pembentuk Indeks Harmoni di Kabupaten Temanggung, kabupaten terdekat dan rata-rata Jawa Tengah.



Gambar 3.26
Perbandingan Indeks Harmoni dari Dimensi Ekonomi



Gambar 3.27
Perbandingan Indeks Harmoni dari Dimensi Sosial



Gambar 3.28
Perbandingan Indeks Harmoni dari Dimensi Budaya



Gambar 3.29
Perbandingan Indeks Harmoni dari Dimensi Keberagaman

Pada pengukuran Indeks Harmoni tahun 2025, Kabupaten Temanggung unggul dalam dimensi budaya bila dibandingkan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo. Keunggulan dimensi budaya mencerminkan keragaman seni dan budaya yang ada di Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk dimensi keberagaman, Kabupaten Temanggung masih dibawah Kabupaten Magelang. Akan tetapi untuk dimensi ekonomi Kabupaten Temanggung setara dengan Kabupaten Magelang, selanjutnya Kabupaten Wonosobo yang paling unggul pada dimensi ekonomi dan sosial. Namun apabila dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, nilai empat dimensi dari ketiga kabupaten ini masih jauh dibawah nilai rata-rata Indeks Harmoni Jawa Tengah. Kemudian untuk nilai Indeks Harmoni Indonesia tahun 2025 di tingkat nasional belum rilis sampai dengan laporan ini diselesaikan.

Adapun program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pengukuran Indeks Harmoni di Kabupaten Temanggung yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dengan alokasi anggaran pada tahun 2025 Rp. 90.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 90.000.000,00. Capaian kinerja anggaran pada program tersebut sebesar 100%, begitu juga dengan capaian kinerja sasarannya. Tidak ada efisiensi anggaran dan tidak ada efisiensi sumber daya pada program penunjang pengukuran Indeks Harmoni.

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mencakup pengukuran kinerja sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan. Fokus manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun lebih ditekankan pada keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari program/kegiatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD maupun dana Tugas Pembantuan terhadap persoalan di masyarakat. Adapun realisasi anggaran tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.51
Realisasi APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (*unaudited*)

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.094.249.204.054,0 0	2.051.319.266.447,0 0	97,95
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	440.934.104.015,00	451.057.543.778,00	102,30
4101	Pajak Daerah	147.148.634.896,00	139.695.644.317,00	94,94
4102	Retribusi Daerah	210.613.471.272,00	224.639.886.979,00	106,66
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.016.530.223,00	24.742.792.414,00	107,50
4104	Lain-lain PAD yang Sah	60.155.467.624,00	61.979.220.068,00	103,03
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.653.315.100.039,0 0	1.600.261.722.669,0 0	96,79
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.542.401.412.317,0 0	1.501.354.684.035,0 0	97,34
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.913.687.722,00	98.907.038.634,00	89,17
5	BELANJA DAERAH	2.128.782.319.282,0 0	1.962.247.213.381,0 0	92,18
51	BELANJA OPERASI	1.616.059.823.766,0	1.489.026.727.000,0	92,14

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		0	0	
5101	Belanja Pegawai	982.633.463.249,00	902.874.395.619,00	91,88
5102	Belanja Barang dan Jasa	522.406.878.617,00	479.605.846.266,00	91,81
5105	Belanja Hibah	107.387.139.400,00	103.330.342.615,00	96,22
5106	Belanja Bantuan Sosial	3.632.342.500,00	3.216.142.500,00	88,54
52	BELANJA MODAL	109.382.729.815,00	101.749.549.226,00	93,02
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.450.144.646,00	58.718.617.204,00	94,02
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.689.179.400,00	5.624.549.729,00	73,15
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.148.278.000,00	29.400.525.601,00	94,39
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.082.127.769,00	8.001.856.692,00	99,01
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	13.000.000,00	4.000.000,00	30,77
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5301	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0,00
54	BELANJA TRANSFER	402.339.765.701,00	371.470.937.155,00	92,33
5401	Belanja Bagi Hasil	14.988.600.364,00	13.659.810.224,00	91,13
5402	Belanja Bantuan Keuangan	387.351.165.337,00	357.811.126.931,00	92,37
	Total Surplus/(Defisit)	(34.533.115.228,00)	89.072.053.066,00	(257,93)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			0,00
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.533.115.228,00	99.628.418.838,00	100,10
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.533.115.228,00	99.533.115.228,00	100,00
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	95.303.610,00	0,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	65.000.000.000,00	68.249.999.994,00	105,00
6201	Pembentukan Dana Cadangan	65.000.000.000,00	68.249.999.994,00	105,00
	Pembiayaan Netto	34.533.115.228,00	31.378.418.844,00	90,86
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	120.450.471.910,00	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban tersebut. Keuangan daerah diatur oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (money follow program), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPJMD tahun 2025-2029. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, di mana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

3. Dana Tugas Pembantuan

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program dan/atau kegiatan berupa tugas pembantuan pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tugas pembantuan yang dilaksanakan pada bidang pertanian sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 9) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-018.08.4.039158/2025 Tanggal 2 Desember 2025 (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian);
- 10) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-018.13.4.691347/2025 Tanggal 18 Juli 2025 (Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian)

b. Gambaran Umum

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 pada bidang pertanian yaitu :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian, Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dan Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
2. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

c. Target Kinerja

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, terdiri dari:
 - Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian meliputi kegiatan Irigasi perpompaan sebanyak 3 unit.
 - Kegiatan Pengelolaan sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
 - Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
2. Program Dukungan Manajemen meliputi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana yang terdiri atas honor operasional satuan kerja, kegiatan rapat koordinasi, koordinasi/konsultasi ke propinsi maupun ke pusat.

d. Realisasi

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan total pagu anggaran sebesar Rp 780.313.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu *Rupiah*) terealisasi sebesar Rp 776.850.150,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) atau sebesar 99.55%. Sedangkan realisasi capaian program tercapai 100%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian terdiri atas kegiatan irigasi perpompaan 3 unit. Adapun lokasi kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	KEGIATAN
1	Lambang Bibit	Gondangwayang	Kedu	Irigasi Perpompaan
2	Sri Sadono	Mergowati	Kedu	Irigasi Perpompaan
3	Rukun Santoso	Pendowo	Kranggan	Irigasi Perpompaan

Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (Pagu Rp 479.853.000,- realisasi keuangan Rp 476.775.150,- atau 99,35% realisasi fisik 100%)

2. Kegiatan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Pagu Rp 15.000.000,- Realisasi Rp 14.990.000,- atau 99,93% dan realisasi fisik 100%) meliputi kegiatan Monitoring pemanfaatan alsintan ke kelompok penerima dan fasilitasi untuk petugas Input BAST dan petugas pemeriksa alsintan.
3. Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (Pagu Rp 248.680.000,- Realisasi Rp 248.680.000,- atau 100%) meliputi kegiatan Fasilitasi e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi, verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi, input/entry e-RDKK serta laporan

pengawasan pupuk dan pestisida di 20 Kecamatan yang dilaksanakan oleh petugas verifikasi dan validasi tingkat kecamatan setiap bulan, dan pelaporan hasil verifikasi pupuk bersubsidi dikirim ke dinas kabupaten. Laporan pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan oleh petugas kabupaten.

- 4 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian (Pagu Rp 36.780.000,- realisasi Rp 36.395.000,- atau 98,95% realisasi fisik 100%). Kegiatan ini mendukung pelaksanaan kegiatan baik fisik di lapangan maupun pendampingannya.

Tabel 3.52
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	Perangkat Daerah PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
1	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian	DIPA Nomor : SP DIPA-018.08.4.039/2025 Tanggal 18 Juli 2025 (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian) serta Nomor : SP DIPA-018.13.4.691/2025 Tanggal 10 Oktober 2025 (Ditjen Lahan dan Irigasi	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	780.313.000	776.850.150	99,55		100	APBN

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	Perangkat Daerah PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
		Pertanian)									
	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian		Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan				Terlaksananya kegiatan irigasi perpompaan di Kabupaten Temanggung		
			Rincian Kegiatan								
			IRIGASI PERPOMPAAN	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	479.853.000	476.775.150	99,35		100	

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	Perangkat Daerah PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
			1. Persiapan			6.000.000	4.425.000	73,75		100	
			Belanja Bahan			1.050.000	1.050.000	100		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4.950.000	3.375.000	68,18		100	
			2. Pelaksanaan Kontruksi Irigasi Perpompaan			467.853.000	467.850.150	99,99		100	
			Belanja Jasa Konsultan			8.178.000	8.175.150	99,97		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			675.000	675.000	100		100	
			Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat / pemda dalam			459.000.000	459.000.000	100		100	

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	Perangkat Daerah PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
			bentuk uang								
			Irigasi Perpompaan	KT Lambang Bibit Gondangwa yang Kedu		153.000.000	153.000.000	100		100	
			Irigasi Perpompaan	KT Sri Sadono Mergowati Kedu		153.000.000	153.000.000	100		100	
			Irigasi Perpompaan	KT Rukun Santoso Pendowo Kranggan		153.000.000	153.000.000	100		100	
			3. Monitoring dan pelaporan			6.000.000	4.500.000	75		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.000.000	4.500.000	75		100	

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	Perangkat Daerah PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Nomor : SP DIPA-018.08.4.039 158/2025 Tanggal 18 Juli 2025 (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian) serta Nomor : SP DIPA-018.13.4.691 347/2025 Tanggal 10 Oktober 2025 (Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian)	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		15.000.000	14.990.000	99,93	Terlaksananya pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian di Kabupaten Temanggung	100	
			Rincian Kegiatan :								

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	Perangkat Daerah PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
			Belanja Bahan			1.400.000	1.400.000	100		100	
			Belanja Honor Output Kegiatan			3.600.000	3.600.000	100		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000	9.990.000	99,99		100	
	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Nomor : SP DIPA-018.08.4.039/2025 Tanggal 18 Juli 2025 (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian) serta Nomor : SP DIPA-018.13.4.691/2025 Tanggal 10 Oktober 2025 (Ditjen	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan				Terlaksananya kegiatan Fasilitasi e RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubdidi, Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi serta laporan pengawasan pupuk dan pestisida		

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	Perangkat Daerah PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
		Lahan dan Irigasi Pertanian)									
			Rincian Kegiatan								
			I. Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi			55.030.000	55.030.000	100		100	
			Belanja Bahan			15.430.000	15.430.000	100		100	
			Belanja Honor Output Kegiatan			31.500.000	31.500.000	100		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8.100.000	8.100.000	100		100	
			II. Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi			164.450.000	164.450.000	100		100	

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	Perangkat Daerah PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
			Belanja Bahan			46.200.000	46.200.000	100		100	
			Belanja Honor Output Kegiatan			118.250.000	118.250.000	100		100	
			III. Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida								
			Belanj Bahan			6.200.000	6.200.000	100		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			23.000.000	23.000.000	100		100	
	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Nomor : SP DIPA-018.08.4.039 158/2025 Tanggal 18 Juli 2025 (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian)	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian Output: Terlaksananya Kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		36.780.000	34.905.000	98,95	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis kegiatan prasarana dan sarana pertanian	100	

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	Perangkat Daerah PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
		serta Nomor : SP DIPA-018.13.4.691 347/2025 Tanggal 10 Oktober 2025 (Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian)	Dukungan Manajemen Kegiatan								
			Rincian Kegiatan								
			Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			17.880.000	16.030.000	97,99		100	
			Belanja Bahan			12.600.000	12.600.000	100		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.300.000	6.275.000	99,6		100	

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN PADA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Sepanjang tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memperoleh prestasi dan Penghargaan antara lain:

1. Kabupaten Terinovatif IGA Tahun 2025



Gambar 3.30
Piagam Penghargaan Kabupaten Terinovatif IGA Tahun 2025

2. Juara 1 PPD Tingkat Nasional Tahun 2025



Gambar 3.31
Piagam Penghargaan Juara 1 PPD Tingkat Nasional Tahun 2025

3. Pemerintah Daerah Tercepat Melaporkan Inovasi Dearah IGA Tahun 2025



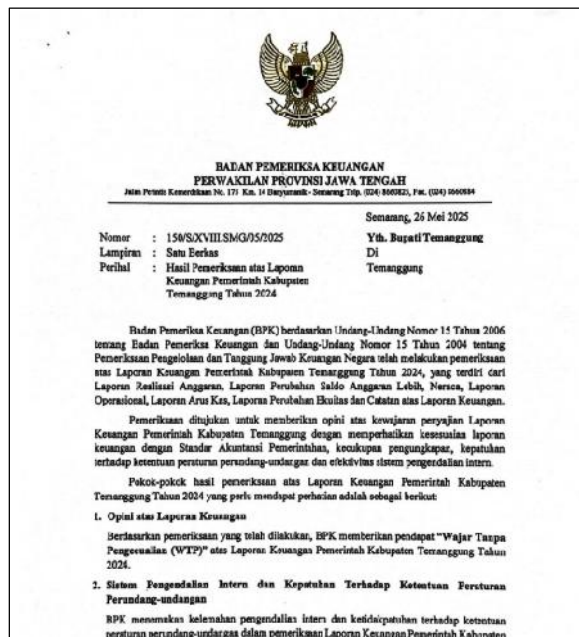
Gambar 3.32
Piagam Penghargaan Juara 1 PPD Tingkat Nasional Tahun 2025

4. Best Improvement Menuju Smart City, Implementasi Program Smart City Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan Kategori Tingkat Improvement Gerakan Menuju Smart City Tahun 2025 dari Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi RI)



Gambar 3.33
Bupati Temanggung menerima penghargaan dalam ajang “Smart City Award” Tahun 2025 dari Kementerian Komunikasi dan Digital

5. Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2024 merupakan opini WTP ke 13 yang diterima pada bulan Mei 2025 sehingga menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Opini Laporan keuangan Tahun anggaran 2025 akan diumumkan sekitar bulan April Mei di tahun 2026.



Gambar 3.34
Opini WTP 2024 yang diterima di tahun 2025

6. Juara 1 PPD Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



Gambar 3.35
Piagam Penghargaan Juara 1 PPD Tingkat Provinsi Jawa Tengah

7. TOP 4 SDG's Action Award Tahun 2025



Gambar 3.36
Piagam Penghargaan TOP 4 SDG's Action Award Tahun 2025

8. Juara I kategori Infografis Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah yang diadakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah



Gambar 3.37
Juara I kategori Infografis Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah

9. KPID Award 2025 sebagai LPPL dengan Kelembagaan Terbaik dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah.



Gambar 3.38
KPID Award 2025 sebagai LPPL dengan Kelembagaan Terbaik

10. Juara III Lomba Pertunjukan FK Metra Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.39
Juara III Lomba Pertunjukan FK Metra Tahun 2025
Tingkat Provinsi Jawa Tengah

11. Juara Harapan III kategori Film Pendek Program Diseminasi Informasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.



Gambar 3.40
Penghargaan Juara Harapan III kategori Film Pendek Program Diseminasi Informasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)

12. Kategori “Informatif” Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



Gambar 3.41
Penerimaan Penghargaan KIP Award Tahun 2025

13. Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapat prestasi “Peringkat 1 dalam penilaian SKP Tahun 2025 se-Kanreg I BKN Yogyakarta”.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 secara keseluruhan dari 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis yang diukur dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Untuk indikator tujuan rata-rata tercapai **100%** atau kategori **“sangat tinggi”**, sedangkan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata tercapai sebesar **99,04%** atau kategori **“sangat tinggi”**. Hasil pengukuran kinerja terhadap 5 Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat disimpulkan bahwa 5 Sasaran Strategis tercapai dengan dikategorikan **“sangat tinggi”**.

Pencapaian target kinerja dari 5 Sasaran Strategis 2025-2029 untuk tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar 2.128.782.319.282,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp 1.962.247.213.381,00 atau 92,18%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 166.535.105.901 (7,82%). Dana tugas pembantuan tahun 2025 Kabupaten Temanggung sebesar Rp 780.313.000,00 dengan realisasi Rp 776.850.150,00 atau 99,55% dan realisasi fisik telah tercapai 100% yang digunakan untuk program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dan program dukungan manajemen, dengan kegiatan pengelolaan air Irigasi untuk pertanian.

Secara umum dapat disimpulkan tahun 2025 rata-rata capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 tercapai sebesar 99,52% atau kategori **“sangat tinggi”**. Hal menunjukkan capaian kinerjanya sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

B. STRATEGI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA MASA MENDATANG

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029, pada tahun 2025, secara umum tercapai dengan baik namun tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja telah diuraikan pada Bab III termasuk strategi dalam mengatasinya. Agar kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung kedepan semakin meningkat, langkah yang telah dan/atau akan dilaksanakan pada masa mendatang sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SAKIP dan mendorong Perangkat Daerah untuk tidak hanya melaporkan realisasi kinerja, tetapi juga melakukan analisis capaian, identifikasi permasalahan, serta penyusunan solusi dan tindak lanjutnya;
2. Melakukan reviu *Critical Success Factor* (CSF) yang logis dan mampu menggambarkan keterkaitan antara isu strategis, sasaran, sampai pada level operasional beserta penetapan indikator kinerja yang relevan;
3. Rapat koordinasi bersama Perangkat Daerah agar meningkatkan pemanfaatan laporan kinerja dalam penyusunan target kinerja tahun berikutnya dan perbaikan perencanaan berikutnya, serta diputuskan bahwa target kinerja di Perjanjian Kinerja tidak harus sama/sesuai dengan renstra khususnya bagi target-target yang telah tercapai;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas Tindak Lanjut seluruh rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah melalui Aplikasi SIMWAS
5. Menetapkan standardisasi format, metodologi, dan instrumen penilaian evaluasi internal termasuk definisi operasional per kriteria penilaian dan format bukti dukung (*evidence*) yang spesifik dengan menggunakan Aplikasi EVAKIP, yaitu aplikasi untuk melakukan evaluasi mandiri baik oleh masing-masing Perangkat Daerah maupun Tim Evaluator AKIP Kabupaten Temanggung;

6. Mengupayakan perbaikan tiada henti terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan agar capaian indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 tercapai keseluruhan hingga akhir periode;
7. Mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini disusun. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, pada tahun 2025 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator maupun sasaran yang belum memenuhi sesuai dengan target, akan dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga dimasa yang akan datang capaian kinerja akan lebih baik.

Temanggung, 26 Maret 2026

Bupati Temanggung,



Agus Setyawan, S.E.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	TUJUAN 1		
1	Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,27 (Angka)
	SASARAN STRATEGIS		
	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS)	7,95 (Tahun) 12,65 (Tahun)
	2. Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indeks Pembangunan Olahraga Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	4,23 (Angka) 3,81 (Angka) 4,66 (Angka)
	3. Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	4,51 (Angka)
	4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,72 (Tahun)
	5. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,77 (Angka)
	TUJUAN 2		
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,28 (%)
	SASARAN STRATEGIS		
	6. Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per kapita Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	33,5 (Ribu Rp) 19 (Angka) 8,10 (%) 2,51 (%)
	7. Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Rasa Aman	75,2 (Angka) 64,05 (Angka) 4,69 (Angka)
	TUJUAN 3		
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	B/>60-70 (Predikat/Nilai)
	SASARAN STRATEGIS		
	8. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	66 (Angka)

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	9. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	Indeks Merit System	0,55 (Angka)
	10. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, Bersih dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B>60-70 (Predikat/Nilai)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B>76,61-88,30 (Predikat/Nilai)

Temanggung, 2 Januari 2024

Pi. BUPATI TEMANGGUNG



MARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARY AGUNG PRABOWO

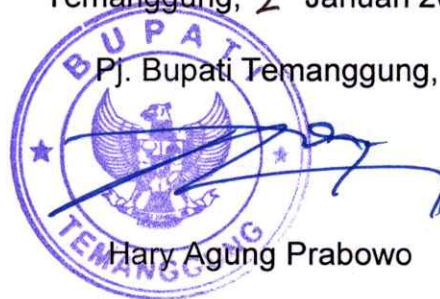
Jabatan : Pj. BUPATI TEMANGGUNG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pj. Bupati Temanggung,



Hary Agung Prabowo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,27 (Angka)
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan		
2	Pertumbuhan Ekonomi	5,28 (%)
Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN		
3	Indeks Reformasi Birokrasi	B/>60-70 (Predikat/Nilai)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,95 (Tahun)
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,65 (Tahun)
2	Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	4,23 (Angka)
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,81 (Angka)
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	4,66 (Angka)
3	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	4,51 (Angka)
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,72 (Tahun)
5	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,77 (Angka)
6	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan per Kapita	33,50 (Ribu Rp)
		Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	19 (Angka)
		Angka Kemiskinan	8,10 (%)
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,51 (%)
7	Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	75,20 (Angka)
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,05 (Angka)
		Indeks Rasa Aman	4,69 (Angka)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	66 (Angka)
9	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	Indeks Merit System	0,55 (Angka)
10	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, Bersih dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B >60-70 (Predikat/Nilai)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B>76,61-88,30 (Predikat/Nilai)

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 582.973.074.376,37
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 139.588.898.600,00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 307.404.887.153,00
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 108.098.154.518,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 1.153.781.000,00
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 205.937.000,00
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 318.360.000,00
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.274.292.190,00
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp 17.409.949.000,00
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 125.000.000,00
11	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 2.536.400.000,00
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 6.655.398.000,00
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 300.000.000,00
14	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 125.000.000,00
15	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 2.829.804.338,00
16	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 33.700.631.000,00
17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 20.000.000,00
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 315.000.000,00
19	Program Pengembangan Perumahan	Rp 316.091.000,00
20	Program Kawasan Permukiman	Rp 1.209.000.000,00
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.787.896.026,00
22	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 1.007.362.500,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
23	Program Penanggulangan Bencana	Rp 440.000.000,00
24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 548.685.000,00
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.925.545.159,00
26	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 255.000.000,00
27	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 15.000.000,00
28	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 690.871.300,00
29	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 23.715.352.110,00
30	Program Penanganan Bencana	Rp 255.000.000,00
31	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 88.000.000,00
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.725.911.799,00
33	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 613.000.000,00
34	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 150.000.000,00
35	Program Hubungan Industrial	Rp 150.000.000,00
36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.576.461.471,00
37	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 35.000.000,00
38	Program Perlindungan Perempuan	Rp 42.842.200,00
39	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 25.000.000,00
40	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp 45.000.000,00
41	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 35.000.000,00
42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 32.380.893.754,00
43	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 300.000.000,00
44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 20.000.000,00
45	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp -
46	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.252.379.584,00
47	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 50.000.000,00
48	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 345.000.000,00
49	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 175.000.000,00
50	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 10.000.000,00
51	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 25.000.000,00
52	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 6.000.000.000,00
53	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.537.556.015,00
54	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 693.500.000,00
55	Program Pencatatan Sipil	Rp 10.000.000,00
56	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 100.848.300,00
57	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.525.472.258,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
58	Program Penataan Desa	Rp 15.000.000,00
59	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp -
60	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 3.575.000.000,00
61	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 230.000.000,00
62	Program Pengendalian Penduduk	Rp 493.800.000,00
63	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 7.474.989.000,00
64	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 4.268.200.000,03
65	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.203.218.408,00
66	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 17.861.800.000,00
67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.202.059.764,00
68	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 500.000.000,00
69	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 1.100.000.000,00
70	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.280.407.753,00
71	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 25.000.000,00
72	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 320.000.000,00
73	Program Pengembangan UMKM	Rp 25.000.000,00
74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.549.759.263,00
75	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp -
76	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 7.000.000,00
77	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 182.000.000,00
78	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 35.000.000,00
79	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 75.000.000,00
80	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 4.399.000.000,00
81	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 250.000.000,00
82	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp 15.000.000,00
83	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 375.000.000,00
84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.251.227.229,00
85	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 8.630.000.000,00
86	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.411.519.712,00
87	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 1.222.715.450,00
88	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 72.894.500,00
89	Program Pengelolaan Arsip	Rp 9.995.000,00
90	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp -
91	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 140.000.000,00
92	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 10.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
93	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 350.000.000,00
94	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 22.624.066.407,00
95	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 7.065.879.000,00
96	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 498.800.000,00
97	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp -
98	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 2.800.000.000,00
99	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 400.000.000,00
100	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 47.000.000,00
101	Program Pengembangan Ekspor	Rp -
102	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 25.000.000,00
103	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 340.000.000,00
104	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 25.000.000,00
105	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 32.302.892.094,98
106	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 27.189.699.150,00
107	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 950.048.800,00
108	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 35.581.532.555,00
109	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 22.457.675.551,00
110	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.842.309.749,00
111	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 482.472.000,00
112	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 515.000.000,00
113	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 23.749.734.985,00
114	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 396.286.888.874,00
115	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 564.876.125,00
116	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 791.448.200,00
117	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.572.719.031,62
118	Program Kepegawaian Daerah	Rp 630.470.000,00
119	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 700.000.000,00
120	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 350.000.000,00
121	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.814.916.251,00
122	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 5.050.000.000,00
123	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 3.650.000.000,00
124	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 53.756.675.292,00
125	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 2.006.700.710,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
126	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 12.741.062.232,00
127	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 264.000.000,00
128	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 559.230.095,00
129	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.467.315.885,00
130	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 425.000.000,00
131	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 2.606.855.000,00
132	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp -
133	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 100.000.000,00
134	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 782.485.500,00

Temanggung, 2 Januari 2025

Pj. Bupati Temanggung,



Hary Agung Prabowo



BUPATI TEMANGGUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SETYAWAN, S.E.

Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG.

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Temanggung, 1 Oktober 2025



BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN, S.E.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tujuan: Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman		
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,75-5,28 (%)
2	Tingkat Kemiskinan	7,95-8,1 (%)
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,95 (Angka)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	72,76 (Angka)
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,30-2,17 (%)
		PDRB Perkapita	37,26 (Juta Rupiah)
2	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,46 (Angka)
3	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase Infrastruktur Kewilayahan Yang Berdaya Saing	71,62 (%)
		Indeks Integritas Nasional	77,72 (Angka)
		Indeks Reformasi Birokrasi	86,13 (Angka)
4	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini/Gini Rasio	0,382-0,370 (Angka)
		Indeks Pembangunan Gender	96,78 (Angka)
5	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	6,72 (Angka)

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 596.588.535.875,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 140.911.833.310,00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 338.706.655.034,00
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 111.330.061.352,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 1.149.970.500,00
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 205.937.000,00
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 596.665.000,00
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.679.559.465,00
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 2.057.697.200,00
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 109.713.000,00
11	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 2.526.245.500,00
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 6.655.398.000,00
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 285.577.800,00
14	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 1.041.688.258,00
15	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 1.998.828.500,00
16	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 29.544.252.700,00
17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 14.469.600,00
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 221.448.950,00
19	Program Pengembangan Perumahan	Rp 306.119.500,00
20	Program Kawasan Permukiman	Rp 1.192.231.300,00
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.274.134.512,00
22	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 1.006.377.500,00
23	Program Penanggulangan Bencana	Rp 1.552.920.000,00
24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 613.647.400,00
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.744.117.378,00
26	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 137.671.600,00
27	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 13.602.350,00
28	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 682.219.430,00
29	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 22.375.621.060,00
30	Program Penanganan Bencana	Rp 236.374.200,00
31	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 86.552.900,00
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.390.113.735,00
33	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 609.703.000,00
34	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 128.947.700,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
35	Program Hubungan Industrial	Rp 110.289.700,00
36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.230.485.522,00
37	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 25.100.800,00
38	Program Perlindungan Perempuan	Rp 38.394.370,00
39	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 18.959.200,00
40	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 40.335.500,00
41	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 88.369.400,00
42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25.330.224.240,00
43	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 300.000.000,00
44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 163.297.000,00
45	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 35.000.000,00
46	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17.881.333.259,00
47	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 43.643.400,00
48	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 337.157.200,00
49	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 306.169.700,00
50	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 6.337.500,00
51	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 16.671.400,00
52	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 6.266.970.700,00
53	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.545.704.472,00
54	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 679.262.800,00
55	Program Pencatatan Sipil	Rp 5.408.500,00
56	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 184.032.500,00
57	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.619.098.800,00
58	Program Penataan Desa	Rp 11.508.100,00
59	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp -
60	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 3.790.196.240,00
61	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 173.102.740,00
62	Program Pengendalian Penduduk	Rp 493.800.000,00
63	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 7.470.149.000,00
64	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 4.249.053.450,00
65	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.864.566.164,00
66	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 17.762.018.590,00
67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.170.370.502,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
68	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 559.768.450,00
69	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 1.129.479.500,00
70	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.377.198.120,00
71	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 15.486.400,00
72	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 318.335.000,00
73	Program Pengembangan UMKM	Rp 73.589.500,00
74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.356.088.148,00
75	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp
76	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 76.076.300,00
77	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 119.042.000,00
78	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 25.010.500,00
79	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 255.485.600,00
80	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 4.162.409.080,00
81	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 225.000.000,00
82	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp 9.901.500,00
83	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 374.880.000,00
84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.714.551.552,00
85	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 8.307.736.300,00
86	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.144.788.842,00
87	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 1.166.394.115,00
88	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 72.894.500,00
89	Program Pengelolaan Arsip	Rp 5.349.500,00
90	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp -
91	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 247.023.670,00
92	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 7.641.500,00
93	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 364.480.800,00
94	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 18.273.173.157,00
95	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 4.983.647.400,00
96	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 458.449.800,00
97	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp -
98	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 3.447.520.000,00
99	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 495.801.540,00
100	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 139.012.200,00
101	Program Pengembangan Ekspor	Rp -
102	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 16.628.900,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
103	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 322.601.750,00
104	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 17.053.800,00
105	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30.287.851.815,00
106	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 27.839.335.483,00
107	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 855.132.136,00
108	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 33.267.785.577,00
109	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 15.126.999.808,00
110	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.229.351.958,00
111	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 827.177.000,00
112	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 510.479.000,00
113	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.785.748.553,00
114	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 404.145.305.101,00
115	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 502.808.175,00
116	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 704.647.930,00
117	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.989.663.811,00
118	Program Kepegawaian Daerah	Rp 633.479.100,00
119	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 623.535.750,00
120	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 299.082.000,00
121	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.850.827.593,00
122	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 5.084.250.000,00
123	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp 3.615.750.000,00
124	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.301.396.514,00
125	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.979.224.753,00
126	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 12.518.095.969,00
127	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 264.000.000,00
128	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 456.491.757,00
129	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.267.441.237,00
130	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 495.522.680,00
131	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.874.832.100,00
132	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 80.000.000,00
133	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 90.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
134	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 781.702.700,00

Temanggung, 1 Oktober 2025



BURATI TEMANGGUNG,

GUS SETYAWAN, S.E.